



PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

2020



JALAN : DR. SAM RATULANGI NO. 1010 PALU, Kode Pos 94111, TELP. 421411 - 421812 Fax. (0451) 423612 - 421411



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH INSPEKTORAT DAERAH

JALAN DEWI SARTIKA NOMOR 47 TELP. 0451- 488152 PALU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Palu, 31 Maret 2021

INSPEKTUR,


★ **Drs. M. MUCHLIS, MM**
Pembina Utama Madya
NIP. 19710222 199012 1 001



VISI DAN MISI

2016 – 2021

VISI : *Sulawesi Tengah Maju, Mandiri dan Berdaya Saing*

MISI :

1. Melanjutkan Reformasi Birokrasi, mendukung penegakan supremasi hukum dan HAM.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah dan mendukung kemadirian energi.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
4. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya agribisnis dan maritim yang optimal dan berkelanjutan sejajar dengan provinsi maju di kawasan timur Indonesia.
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berbudaya.



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat Pemerintah Daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Sekian dan terima kasih.

Palu, Maret 2021
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, M.Si

DAFTAR ISI

1.	Visi dan Misi	i
2.	Kata Pengantar	ii
3.	Daftar Isi	iii
4.	Pernyataan Telah Direviu	iv
5.	Daftar Gambar	v
6.	Daftar Tabel	viii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Tengah	2
	1.3 Capaian Kinerja Pembangunan Ekonomi dan Sosial	20
	1.4 Isu Strategis	33
	1.5 Permasalahan Utama	38
	1.6 Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	61
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	65
	2.1 Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	65
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	112
	3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 2020	112
	3.2 Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja	118
	3.3 Realisasi Anggaran.....	232
BAB IV	PENUTUP	241
Lampiran	Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2020.....	5
Tabel 1.2	Potensi Minyak dan Gas Bumi di Provinsi Sulawesi Tengah.....	9
Tabel 1.3	Produksi Perikanan Menurut Jenis Usaha di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2020 (Ton).....	10
Tabel 1.4	Perkembangan Produksi Padi dan Palawija Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2015-2020	11
Tabel 1.5	Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2017	12
Tabel 1.6	Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2015-2020 (000 000 US \$	14
Tabel 1.7	Struktur PDRB ADHB Menurut Komponen Pengeluaran Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 - 2020	24
Tabel 1.8	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah, periode 2015-2020...	26
Tabel 1.9	Dampak Covid-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja Periode Agustus 2020	26
Tabel 1.10	Inflasi Kelompok Pengeluaran Kota Palu, Tahun 2020	29
Tabel 1.11	Perkembangan Komponen IPM di Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2015-2020	31
Tabel 1.12	Kondisi Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Perspektif Pulau Sulawesi Periode Sep	33

	2019–Sep 2020	
Tabel 1.13	Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	38
Tabel 2.1	Perumusan Penjelasan Visi	66
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran 2016-2021.....	71
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.....	73
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020	79
Tabel 2.5	Strategi dan Arah Kebijakan Periindustrian dan Parawisata	82
Tabel 2.6	Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Tertinggal dan Desa	87
Tabel 2.7	Strategi dan Arah Kebijakan Maritim dan Kelautan	89
Tabel 2.8	Strategi dan Arah Kebijakan Kedaulatan Pangan	96
Tabel 2.9	Strategi dan Arah Kebijakan Maritim dan Kelautan	101
Tabel 2.10	Strategi dan Arah Kebijakan Pendidikan	103
Tabel 2.11	Strategi dan Arah Kebijakan Kedaulatan Energi.....	108
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	112
Tabel 3.2	Capaian IKU Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.....	113
Tabel 3.3	Pencapaian IKU Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di ukur dengan skala nilai peringkat kinerja	117
Tabel 3.4	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase IKM Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD	118

Tabel 3.5	Survei IKM Tahun 2020	119
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Opini BPK tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 terhadap target akhir RPJMD	121
Tabel 3.7	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD	122
Tabel 3.8	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja indeks reformasi birokrasi Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD	124
Tabel 3.9	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD	129
Tabel 3.10	Rasio Elektrifikasi Kab/Kota Sulawesi Tengah Tahun 2020	132
Tabel 3.11	Lokasi Pemasangan Instalasi dan Sambungan Listrik Gratis Tahun 2020	133
Tabel 3.12	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD	134
Tabel 3.13	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kab/Kota Tahun 2020	135
Tabel 3.14	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD	135

Tabel 3.15	Data Kondisi Perumahan di Sulawesi Tengah	136
Tabel 3.16	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Kontribusi Sektor Perdagangan Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD	137
Tabel 3.17	Data PNBPN Sektor Perdagangan Sulawesi Tengah Tahun 2020	138
Tabel 3.18	PDRB Sulawesi Tengah Sektor Perdagangan dan Penggalan atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2010 eriode 2018-2020 (Milyar Rupiah)	138
Tabel 3.19	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD	140
Tabel 3.20	Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Sulawesi tengah menurut daerah posisi September 2019 - september 2020	143
Tabel 3.21	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Indeks Gini Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD	144
Tabel 3.22	Gini Ratio Provinsi Se Sulawesi Periode Sep 2019 – Sep 2020	147
Tabel 3.23	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase Koperasi Aktif Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD	147
Tabel 3.24	Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Tahun 2016 - 2020 (dalam unit)	149

Tabel 3.25	Perbandingan relisasi kinerja dan capaian kinerja ekspor bersih perdagangan Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD	155
Tabel 3.26	Ekspor berdasarkan Nilai Tahun 2013-2020 (US\$ Juta)	156
Tabel 3.27	Kinerja Ekspor Daerah Tahun 2020 (US\$ Juta)..	157
Tabel 3.28	Rekapitulasi Ekspor menurut Negara Tujuan Tahun 2020 (SKA)	157
Tabel 3.29	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja pertumbuhan industri Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD	159
Tabel 3.30	Jumlah Unit Usaha Industri Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan kelompok industri	160
Tabel 3.31	Jumlah unit usaha industri Provinsi Sulawesi Tengah 2017 - 2020.....	161
Tabel 3.32	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja nilai realisasi investasi PMDN dan PMA Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD.....	163
Tabel 3.33	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD	169
Tabel 3.34	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD	171
Tabel 3.35	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus	

	Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD	172
Tabel 3.36	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kab/Kota (Persen) Periode Agustus 2019- Agustus 2020	180
Tabel 3.37	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD	181
Tabel 3.38	Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Jenis Kegiatan Utama 2019 - 2020	182
Tabel 3.39	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Kontribusi PDRB Sub Sektor Kehutanan Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD	187
Tabel 3.40	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase Kerusakan Hutan Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD.....	190
Tabel 3.41	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD	195
Tabel 3.42	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Nilai Tukar Petani Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD	197
Tabel 3.43	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Sektor Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD	200
Tabel 3.44	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Jumlah PDRB Sektor Perkebunan Tahun	

	2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD	202
Tabel 3.45	Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Provinsi Sulteng Tahun 2020.....	205
Tabel 3.46	Capaian NTN dan NTPi Sulawesi Tengah Tahun 2020	208
Tabel 3.47	Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2020 Per Kab/Kota	210
Tabel 3.48	Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020 Per Kab/Kota	211
Tabel 3.49	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Nilai Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD.....	215
Tabel 3.50	Nilai Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2020.....	216
Tabel 3.51	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja persentase angka melek aksara Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD	217
Tabel 3.52	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD	219
Tabel 3.53	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD	220
Tabel 3.54	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Usia Harapan Hidup Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD	223

Tabel 3.55	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD.....	227
Tabel 3.56	Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi Tahun 2020	
Tabel 3.57	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD.....	228 229
Tabel 3.58	Rekapitulasi Tahapan Keluarga Sejahtera Sulawesi Tengah Tahun 2020	230
Tabel 3.59	Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran	233

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Penduduk Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	6
Gambar 1.2	<i>Trend</i> Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2020 (Persen).....	22
Gambar 1.3	Laju pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah dalam perspektif regional SALAMPUA Tahun 2020 (Persen)	23
Gambar 1.4	<i>Perkembangan nilai PDRB</i> Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2020 (Miliar Rupiah)	23
Gambar 1.5	Perkembangan Laju Inflasi Tahunan Kota Palu, periode 2014-2020.....	28
Gambar 1.6	Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020.....	30
Gambar 1.7	<i>Trend</i> Gini Ratio provinsi Sulawesi Tengah Periode Maret 2016 – September 2020	32
Gambar 3.1	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja persentase jaringan jalan dalam kondisi baik Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD	127
Gambar 3.2	Akumulatif Panjang Peningkatan Jalan 2017-2020	128
Gambar 3.3	Konsumsi listrik per Kapita Sulawesi Tengah (kWh/kapita) Sektor Rumah Tangga	130
Gambar 3.4	<i>Trend</i> Rasio Elektrifikasi 2014 - 2020	131
Gambar 3.5	Jumlah dan Persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah Tahun 2012 - 2020	141
Gambar 3.6	Perkembangan Gini Ratio Sulawesi Tengah Maret 2016 – September 2020.....	145
Gambar 3.7	Jumlah Koperasi Per Kab/Kota Tahun 2016-2020.....	149

Gambar 3.8	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD	151
Gambar 3.9	Perbandingan realisasi investasi dan Perbandingan Perusahaan yang Masuk	165
Gambar 3.10	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD	178
Gambar 3.11	Perkembangan TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan pada Periode 2019-2020	179
Gambar 3.12	Dampak Covid-19 keadaan ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah Periode Agustus 2020	181
Gambar 3.13	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Menurut Jenis Kelamin di Sulawesi Tengah, 2019-2020.....	183
Gambar 3.14	Persentase Pekerja Penuh, Setengah Penganggur dan Paruh Waktu Sulawesi Tengah, 2019-2020	184
Gambar 3.15	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase Kabupaten/Kota Tidak Tertinggal Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD	185
Gambar 3.16	Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan	191
Gambar 3.17	Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.....	193
Gambar 3.18	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Nilai Tukar Nelayan Tahun 2017, 2018, 2019 dan capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD	206

Gambar 3.19	Pelatihan Bandeng Bebas Duri.....	212
Gambar 3.20	Pengembangan Rumput Laut Sistem Kultur Jaringan..	213
Gambar 3.21	Kolam Budidaya Hemat Air di Kab. Sigi	213
Gambar 3.22	Kolam Ikan Semi Intensif Teknologi Bioflok	214
Gambar 3.23	Tren Jumlah Kasus Gizi Buruk di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020	224
Gambar 3.24	Trend jumlah dan angka kematian bayi Provinsi Sulawesi tengah Tahun 2016-2020	225

Bab 1

Pendahuluan



PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat demi terlaksananya pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas segala kinerja Pemerintah, baik kinerja yang melebihi target, sesuai dengan target maupun kegagalan memenuhi target yang telah ditentukan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap perangkat daerah untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 GAMBARAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

A. Kondisi Geografis

Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 yang meliputi empat wilayah kabupaten yaitu: Donggala, Poso, Banggai dan Buol Tolitoli. Pada tahun 1994 dibentuklah Kotamadya Palu dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994. Dalam perkembangannya selama kurang lebih tiga puluh lima tahun, tepatnya sejak Tahun 1964 sampai dengan Tahun 1999, terjadi suatu perubahan yang ditandai dengan era Reformasi sebagai konsekuensi perubahan tatanan politik bangsa, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Seiring dengan harapan masyarakat terhadap pemekaran wilayah maka diterbitkan pula Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-una, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara, dengan demikian maka hingga akhir 2018 Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki 12 (dua belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang terdiri dari 175 Kecamatan serta 1845 Desa dan 175 Kelurahan.

1. *Batas Administrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*

Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makasar dan Provinsi Sulawesi Barat

2. Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tengah adalah 61.841,29km². Sementara untuk wilayah Perairan Laut seluas 193.923,75km², dan secara geografis Provinsi Sulawesi Tengah terletak antara 2⁰22' Lintang Utara dan 3⁰48' Lintang Selatan serta 119⁰22 dan 124⁰22' Bujur Timur.

3. Topografis

Dilihat dari letak wilayahnya, Provinsi Sulawesi Tengah sebagian besar merupakan daerah pegunungan dan daratan tinggi serta daratan rendah yang terdapat didaratan, lembah dan berada di daerah pantai. Pembagian wilayah berdasarkan ketinggian dari permukaan laut sbb :

- Daratan rendah dengan ketinggian 0-100 meter dari permukaan laut sekitar 20,20 persen.
- Wilayah dengan ketinggian 100-500 meter dari permukaan laut sekitar 27,20 persen,
- Wilayah dengan ketinggian 500-1000 meter dari permukaan laut sekitar 26,27 persen.
- Wilayah dengan ketinggian diatas 1000 meter dari permukaan laut sekitar 26,33 persen.

Demikian juga dengan tingkat kemiringan lahan, yakni:

- Kemiringan 0-2 derajat sekitar 13,00 persen
- Kemiringan 2,1-15 derajat sekitar 1,00 persen
- Kemiringan 15,1-40 derajat sekitar 16,10 persen

- Kemiringan diatas 40,1 derajat sekitar 50,60 persen
- Pulau-pulau kecil (belum terdata) sekitar 19,30 persen.

Sulawesi Tengah adalah salah satu Provinsi di Pulau Sulawesi yang mempunyai kekayaan alam yang cukup beragam, kandungan mineral,air dan segala isinya,flora dan fauna yang beraneka ragam. Kawasan lindung di Sulawesi Tengah dengan proporsi 35,55% dari luas total wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, daerah kawasan lindung ini menyebar merata diseluruh wilayah Sulawesi Tengah.

Jenis kawasan lindung di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan kriteria kawasan lindung terdiri dari :

1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, meliputi :
 - a. Kawasan hutan lindung
 - b. Kawasan resapan air
2. Kawasan Perlindungan setempat, meliputi :
 - a. Sempadan Pantai
 - b. Sempadan Sungai
 - c. Kawasan sekitar danau
 - d. Kawasan sekitar mata air
3. Kawasan suaka alam, meliputi :
 - a. Kawasan cagar alam
 - b. Kawasan suaka marga satwa.
4. Kawasan pelestarian alam, meliputi :
 - a. Kawasan Taman Nasional
 - b. Kawasan Taman Hutan Rakyat
 - c. Taman Wisata Alam
5. Kawasan Cagar Budaya
6. Kawasan rawan Bencana Alam

7. Kawasan lindung lainnya meliputi :

- a. Kawasan taman baru
- b. Kawasan Pantai berhutan bakau

B. Kondisi Demografis

Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan karena bukan hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan, namun juga menjadi sasaran pembangunan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk, pembangunan harus diarahkan pada pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas, serta pengerahan mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang bersinergi dengan tujuan pembangunan. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk suatu wilayah dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk mengetahui kecenderungan penyebaran penduduk. Jumlah penduduk yang besar cenderung mengelompok pada lokasi tertentu, sehingga menyebabkan pola penyebaran tidak merata. Kepadatan penduduk yang tinggi pada umumnya ditemukan di wilayah perkotaan, karena merupakan sentra aktivitas ekonomi.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk
dan Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2017 - 2020

NO.	INDIKATOR	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.966.325	3.010.443	3.054.023	2.985.734
	- Laki-Laki (Jiwa)	1.514.457	1.536.491	1.558.233	1.534.706
	- Perempuan (Jiwa)	1.451.868	1.473.952	1.495.790	1.451.028
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,53	1,49	1,45	1,22
3.	Tingkat Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	48	49	49	48

Sumber: BPS Sulteng, 2021

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Sulawesi Tengah selama 4 tahun terakhir dari 2017-2020 cenderung meningkat, yakni dari 2.966.325 jiwa pada tahun 2017 menjadi 2.985.734 jiwa pada tahun 2020. Sementara tingkat laju pertumbuhan penduduk dari 1,53 persen pada tahun 2017 berhasil ditekan hingga menjadi 1,22 persen pada tahun 2020. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk Sulawesi Tengah cenderung sama pada tahun 2017 dan tahun 2020 yakni dari 48 jiwa/km².

Gambar 1.1
Jumlah Penduduk Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah Total
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 4	83 869	78 331	162 200
5 – 9	134 039	125 935	259 974
10 – 14	146 338	137 530	283 868
15 – 19	156 460	147 245	303 705
20 – 24	146 566	133 401	279 967
25 – 29	124 698	118 795	243 493
30 – 34	119 071	113 855	232 926
35 – 39	120 955	116 707	237 662
40 – 44	114 970	110 080	225 050
45 – 49	101 547	97 578	199 125
50 – 54	84 199	79 413	163 612
55 – 59	64 287	60 140	124 427
60 – 64	48 546	46 195	94 741
65 – 69	32 564	29 929	62 493
70 – 74	19 489	19 832	39 321
75 +	22 114	21 848	43 962
Tidak Tahu/Unknow	14 994	14 214	29 208
Jumlah/Total	1 534 706	1 451 028	2 985 734

Sumber: BPS Sulteng, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 penduduk di Sulawesi Tengah didominasi oleh kelompok usia muda. Adapun kelompok usia dengan jumlah tertinggi yaitu kelompok muda (15 - 19 tahun) yang sebanyak 303.705 jiwa. Sementara itu untuk usia produktif, kelompok penduduk dengan jumlah paling sedikit yaitu kelompok usia 70-74 tahun sebanyak 39.321 jiwa.

C. Potensi Sumber Daya Daerah

1. Potensi Sumber Daya Alam

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah, antara lain terdapat potensi bahan galian dan mineral, serta potensi gas dan minyak bumi. Beberapa kandungan mineral yang menjadi andalan Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

- Batubara; Lokasi bahan galian terletak di Desa Ensa. Tomata, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali dengan ketebalan lapisan mencapai 0,3-1,0 meter. Batubara jenis gambut (*peat*), lignit, dan brown coal dapat ditemukan di sekitar desa Toaya dan Tamarenja, Kecamatan Sidue, Kabupaten Donggala dengan lokasi penyebaran sekitar 15 Ha. Dari hasil analisa “*grab sampling*”, menunjukkan adanya kadar air 20,79 persen, abu 9,68 persen, *fixed carbon* 29,55 persen, dan belerang 1,26 persen dengan nilai kalori mencapai 4130 Kkal.
- Nikel; kandungan Nikel banyak terdapat di Kecamatan Petasia, Bungku Tengah, Bungku Selatan, Kabupaten Morowali dengan Luas Wilayah tambang sekitar 36.635 Ha.
- Galena; Galena banyak ditemukan di sungai lewara hulu, Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala.
- Emas; produk tambang paling bernilai ini banyak terdapat di beberapa wilayah antara lain Kecamatan Palu Selatan dan Palu Utara, Kota Palu seluas 561.050 Ha; Kecamatan Parigi dan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong seluas 46.400 Ha; Kecamatan Paleleh, Bunobogu, Dondo, Kabupaten Buol seluas 746.400 Ha; Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso seluas 19.180 Ha; dan Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi seluas 228.700 Ha.

- Molibdenum; Jenis tambang ini dapat ditemukan di Desa Malala, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli.
- Chromit; Mineral ini terdapat di Kecamatan Mori Atas seluas 229 Ha; Kecamatan Bungku Barat dan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali seluas 1.003 Ha; dan tersebar di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol serta Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Tembaga; tambang ini dapat ditemukan di Moutong, Kabupaten Parigi Moutong dan Sungai Bukal, Kabupaten Buol.
- Belerang; Terdapat di Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una.
- Marmer; Marmer ini terdapat di Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali.
- Gibsum; Gibsum ini terdapat di Mamboro Kecamatan Palu Utara, Kota Palu dan Kendek, Kecamatan Banggai Kabupaten Bangkep.
- Batu Gamping; Batu gamping terdapat di Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol dan Kabupaten Donggala.
- Posfat; Pospat ini terdapat di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Poso.
- Koalin; Koalin ini terdapat di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Lempung dan Tanah Liat; Lempung dan Tanah Liat ini terdapat di kabupaten Poso, Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Donggala.

- Batu Giok (Jade); Terdapat di pegunungan Pompangio, S. Kusek, S. Salimuru, S. Mambulaba, S. Uemaramu, S. Uemadago dan S.Kusehmalino, Kabupaten Poso.
- Pasir Kuarsa; Terdapat di Desa Moutong, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong dan Desa Lambaku (cadangan 2,5 juta m³) di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Batu Apung; Terdapat di daerah Bulagi, Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan.

Selanjutnya potensi minyak bumi dan gas bumi yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Potensi Minyak dan Gas Bumi Di Provinsi Sulawesi Tengah

NO	LOKASI	POTENSI	KETERANGAN
1	Lapangan Tiaka Kec. Bungku Utara Kab. Morowali dan Kec. Toili Barat Kab. Banggai	16,5 – 23 Juta Barel	Produksi mencapai 2000 bph – 5000 bph (Barel per hari)-Minyak Bumi
2	Lokasi Senoro Kec. Toili Kab.Banggai, Terdiri dari Blok Senoro, Donggi dan Matindok (Pertamina EP, Medco dan Mitsubishi,Co)	9,6 Triliun Kaki Kubik	Rencana Eksplorasi
3	Blok Surumana	5.339,63 Km ²	Eksplorasi pada sumur Rangkong, Parangko Pulu dan Tangkasi oleh Exxon Mobile Eksploration)
4	Blok Tomini	10.690 Km ²	Survey
5	Blok Ebuni	7.960,4 Km ²	Survey

Sumber: Dinas Pertambangan dan ESDM Sulteng

2. Potensi Kelautan dan Perikanan

Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor unggulan Provinsi Sulawesi Tengah. Perkembangan jumlah produksi perikanan budidaya sepanjang lima tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2016 produksi perikanan budidaya mencapai 1.335.116,07 ton kemudian turun menjadi 1.059.050,74 ton pada tahun 2017. Sementara itu, pada tahun 2016 produksi perikanan tangkap mencapai 212.330,60 ton kemudian turun menjadi 174.049,30 ton pada

tahun 2017. Penurunan produksi semakin terlihat pada tahun 2018 yakni 918.174, 41 ton lalu naik kembali pada tahun 2019. Pada tahun 2020 Pemerintah Daerah berusaha memaksimalkan upaya peningkatan produksi sehingga dapat naik pada angka 966.953 ton, pencapaian ini belum dapat melebihi dari tahun-tahun sebelumnya di karenakan keterbatasan benih berkualitas, biaya pengiriman yang semakin tinggi, faktor cuaca serta adanya pandemi Covid-19. Secara rinci perkembangan produksi perikanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Produksi Perikanan Menurut Jenis Usaha di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2016 – 2020 (Ton)

JENIS USAHA PERIKANAN	2016	2017	2018	2019	2020
Perikanan Budidaya	1.335.116,07	1.059.050,30	918.174,41	942.336,92	966.953
a. Tambak	120.098,80	104.939,86	128.481,71	37,300	37.300
b. Budidaya Laut	1.206.664,25	937.070,10	769.223,47	901.476,34	925.339
c. Kolam	7111,94	4.524,64	18.014,59	2.976,29	3.051
d. Karamba	26,29	27,00	24,71	25,09	25
e. Jaring Apung dan Sawah	1.214,79	12.473,70	2.429,93	559,44	1,238
Perikanan Tangkap	212.330,60	174.964,00	171.115,1	193.178,74	135.360
a. Laut	210.140,20	174.049,30	918.174,41	942.336,92	133.997
b. Perairan Umum	2.190,40	914,70	128.481,71	37,300	1,363

Sumber: BPS Sulteng, 2021

3. Potensi Pertanian dan Perkebunan

a. Pertanian Tanaman Pangan

Kebijakan pembangunan bidang ekonomi nasional diarahkan pada peningkatan sektor industri dengan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Sehubungan dengan hal

tersebut, maka kebijakan pembangunan daerah di Sektor Pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis.

Tabel 1.4
Perkembangan Produksi Padi dan Palawija (Ton)
Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2015-2020

NO	KOMODITI	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Padi (Sawah+Ladang)	1.015.368	1.086.074	1.133.122	954.794	1.150.437	180.100,44
2.	Jagung	131.123	317.717	337.239	386.606	555.589	568.473
3.	Kedelai	13.270	15.358	4.257	26.573	8.073	3.654
4.	Kacang Tanah	4.943	4.409	3.176	3.432	2.147	2.099
5.	Kacang Hijau	628	779	524	573	384	373
6.	Ubi Kayu	47.295	34.909	51.299	58.429	47.656	40.046
7.	Ubi Jalar	16.650	15.735	15.622	19.791	20.396	14.857

Sumber : Dinas Pangan Prov. Sulteng, 2021

Pembangunan di sektor pertanian menjadi lebih penting disebabkan sebagian besar wilayah Sulawesi Tengah merupakan daerah pertanian dan mata pencaharian penduduknya adalah bercocok tanam/berkebun dan nelayan. Perkembangan produksi palawija di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2015 - 2020 cenderung meningkat. Pada Tahun 2020, produksi tertinggi yakni komoditi padi sawah dengan produksi mencapai 1.032.355 ton, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah komoditi jagung dengan produksi mencapai 568.473 ton dan komoditi ubi jalar dengan produksi mencapai 14.857 ton .

b. Perkebunan

Perkembangan usaha perkebunan di Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan yang cukup nyata dengan beberapa komoditas unggulan yang melebihi target seperti : kelapa dalam,

pala, lada, kelapa sawit dan karet. Disamping itu terdapat juga beberapa komoditi potensi lainnya seperti : cengkeh, kopi dan kakao.

Bantuan bibit, peremajaan, pengendalian OPT dan bantuan pupuk untuk komoditas Kelapa Dalam, Pala, Lada, Kelapa Sawit dan Karet yang diberikan tahun 2012-2015 telah menunjukkan keberhasilan, melalui bimbingan dan pendampingan penyuluh dan tenaga lapangan, sehingga produksi kelima komoditas tersebut dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

Komoditi tanaman perkebunan yang merupakan komoditi perdagangan mempunyai peranan strategis, karena disamping merupakan sumber penghasilan devisa negara, juga yang lebih penting lagi adalah mencakup rangkaian kegiatan produksinya termasuk peluang terbukanya lapangan kerja yang cukup menyerap banyak tenaga kerja.

Tabel 1.5
Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)
Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020

NO.	KOMODITI	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kakao	168.733	134.322,50	125.473	127.669,3 47	128.154
2.	Kelapa	184.486	187.404	193.885	189661,8 1	191.669
3.	Kopi	2.927	2.647,60	2.816	2437,674	2.548
4.	Cengkeh	17.171	5.314,10	15.132	17897,33 3	18.108
5.	Lada	162	203,90	223	256,307	229
6.	Pala	406	389	337	378,464	423
7.	Karet	3.384	2.301,60	3.698	3933,718	2.978
8.	Kelapa Sawit	410.128	156.763,70	444.894	445.892,9 57	421.526

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulteng 2021

Pada tahun 2020 produksi terbesar masih didominasi oleh tanaman kelapa sawit, kelapa dalam, kakao, dan cengkeh. Produksi tanaman kelapa sawit pada tahun 2020 sebesar 421.526

ton, menurun dibanding tahun 2019 yakni 445.892,957. Produksi tanaman kelapa dalam pada tahun 2020 sebesar 191.669 ton mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Produksi komoditas kakao tahun 2020 sebesar 128.154 ton, sedikit meningkat dibandingkan produksi tahun 2019.

c. Potensi Pasar Luar Negeri

Perdagangan luar negeri Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan melalui transaksi ekspor dan impor. Komoditas andalan ekspor Sulawesi Tengah yang diperdagangkan terutama berasal dari sebagian besar potensi sumber daya alam dan hasil industri domestik yang dimiliki wilayah Sulawesi Tengah. Adapun negara tujuan ekspor meliputi benua Asia, Amerika, dan Eropa. Transaksi ekspor dan impor dilakukan melalui beberapa pelabuhan utama yakni Banggai, Loli, Kolonodale, dan Pantoloan.

Pada tahun 2020 neraca perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami surplus yang cukup besar, lebih besar dibandingkan dengan surplus pada tahun 2019. Selama 5 tahun terakhir ekspor Sulawesi Tengah terus mengalami surplus, hal ini berarti terjadi peningkatan yang lebih baik dari tahun 2015 yang mengalami defisit. Sepanjang tahun 2020, total nilai ekspor Sulawesi Tengah sebesar US\$ 7.480,65 juta, sementara total nilai impor Sulawesi Tengah tercatat US\$ 2.384,94 juta. Dengan demikian maka neraca perdagangan Sulawesi Tengah tahun 2019 mengalami surplus sebesar US\$ 5.095,71 juta.

Tingginya nilai ekspor Sulawesi Tengah didominasi dua komoditas yakni kelompok komoditas besi dan baja senilai US\$ 734,88 atau 89,97 persen dari total ekspor dan bahan bakar mineral senilai US\$ 66,60 juta (8,15 persen). Kontribusi ekspor kelompok komoditas lainnya relatif kecil masing-masing di bawah 2,00% .

Tabel 1.6
Perkembangan Neraca Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2015-2020
(000 000 US \$)

TAHUN	NILAI EKSPOR	NILAI IMPOR	SURPLUS/DEFISIT PERDAGANGAN
2015	503,27	707,84	-204,57
2016	1.470,34	1.137,85	332,49
2017	3.028,97	1.294,74	1.734,23
2018	5.109,18	2 821,08	2.288,10
2019	5.893,47	3.134,92	2.758,55
2020	7,480,65	2.384,94	5.095,71

Sumber: BPS Sulteng, 2021

d. Potensi Sosial Budaya

Suku bangsa Kaili merupakan penduduk mayoritas di Provinsi Sulawesi Tengah, disamping suku-suku bangsa besar lainnya seperti Dampelas, Kulawi dan Pamona. Orang Kaili dan Dampelas menganut agama Islam, sedangkan orang Kulawi dan Pamona merupakan penganut agama Kristen. Selain itu secara keseluruhan masih ada suku-suku bangsa lainnya yang tidak begitu besar jumlahnya, yaitu Balaesang, Tomini, Lore, Mori, Bungku, Buol Tolitoli, Saluan, Balantak dan lain-lain.

Secara tradisional, masyarakat Sulawesi Tengah memiliki seperangkat pakaian adat yang dibuat dari kulit kayu ivo (sejenis pohon beringin) yang halus dan tinggi mutunya. Pakaian adat tersebut dibebankan untuk kaum pria dan kaum wanita. Adapun unsur-unsur adat dan budaya yang dimiliki dan melekat dikultur masyarakat Sulawesi Tengah antara lain:

- Pakaian adat terbuat dari kulit kayu ivo.
- Rumah adat yang disebut tambi.

- Upacara adat seperti:
 - Upacara perkawinan
 - Upacara kelahiran
 - Upacara kematian
 - dan upacara adat lainnya
- Kesenian yang meliputi:
 - Modero-Tari pesta panen
 - Vaino-Pembacaan syair-syair pada saat kedukaan.
 - Dadendate.
 - Kakula
 - Lumense dan Paule Cinde-tari untuk menyambut tamu terhormat
 - Mamosa-Tarian perang
 - Morego-Tari menyambut pahlawan
 - Pajoge-Tari pelantikan raja/pejabat
 - Balia-Tarian yang berkaitan dengan kepercayaan animisme, yaitu pemujaan terhadap benda keramat, khususnya yang berhubungan dengan pengobatan tradisional, terutama kepada orang yang terkena pengaruh roh jahat

Selain adat dan budaya yang merupakan ciri khas daerah, di Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki kerajinan-kerajinan yang unik, yaitu antara lain:

- Kerajinan kayu hitam (ebony)
- Kerajinan anyaman
- Kerajinan kain tenun Donggala
- Kerajinan pakaian kulit ivo

e. Potensi Wisata

Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi yang banyak memiliki hasil kekayaan alam (panorama alam) yang sangat menarik dan mempesona untuk dijadikan sebagai obyek wisata

yang perlu dan patut untuk dikembangkan dalam rangka menggali dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah. Adapun obyek-obyek wisata yang terdapat di Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

(1) *Obyek Wisata Alam*, terdapat di:

Kabupaten Sigi, yaitu :

- Taman Nasional Lore Lindu (Hutan Wisata Lindu) seluas 230.000 Ha, yang mengandung potensi flora dan fauna tropis khas Sulawesi Tengah dan patung megalit.
- Hutan wisata Kamarora
- Air terjun Wera
- Camping Ground Paneki
- Lokasi penghijauan Ngata Baru
- Permandian air panas Bora
- Taman rekreasi Mantikole (Kec. Dolo)

Kabupaten Parigi Moutong, yaitu :

- Pemandangan alam kebun kopi
- Air terjun Lingkungavali (Kec. Ampibabo)
- Tugu khatulistiwa Sinei (Kec. Tinomo)

Kabupaten Poso, yaitu :

- Kawasan Danau Poso
- Air Luncur bertingkat 12 “Saluopa”
- Air terjun Sulewana
- Taman anggrek Hitam Bancea, Goa Pamona
- Air panas di Bokokau, Lengkeka, Lageroa, Tuare (Kecamatan Lore Selatan)
- Permandian Matiandano (Desa Bancea)
- Taman Nasional Lore Lindu (Kecamatan Lore Utara-Selatan)
- Permandian Alam Tanjung Poso
- Permandian Pantai Madale Kecamatan Poso Kota Utara
- Pantai Penghibur Poso

- Hutan Mangrove Labuan Kecamatan Poso Kota Utara.

Kabupaten Morowali, yaitu :

- Kawasan Taman Nasional Morowali

Kabupaten TojoUna-una, yaitu :

- Taman Laut kepulauan Togian terletak di Kecamatan Walea Kepulauan
- Cagar Alam Tanjung Api (Kecamatan Ampana)
- Pantai Malotong (Kecamatan Ampana Kota)

Kabupaten Tolitoli, yaitu :

- Suaka Margasatwa Pulau Dolagon (Kec. Tolitoli Utara)
- Air terjun Pandaelo (Kecamatan Dampal Selatan)
- Air Panas Sojol (Cagar Alam Gunung Sojol)
- Air terjun Lungutu
- Air terjun Saloding (Kecamatan Baolan)
- Goa Pampaile
- Permandian Pakka Saloe, Soni (Kecamatan Dampal Selatan)
- Air terjun Kalasi (Kecamatan Dondo)

Kabupaten Buol, yaitu :

- Air terjun Kalokan (Kecamatan Paleleh)
- Irigasi Kinegi (Kecamatan Galang)

Kabupaten Banggai, yaitu :

- Permandian Kilometer Dua
- Air terjun Hanga-Hanga (Kecamatan Luwuk Kota)
- Suaka marga satwa Pulau Bangkiring (Kecamatan Batui)
- Suaka Margasatwa Lambujan
- Hutan Wisata Salodeng (Kecamatan Pagimana)
- Suaka marga satwa Pati-pati (Kecamatan Pagimana)
- Panorama alam koyuan (Kecamatan Luwuk)

Kota Palu, yaitu :

- Panorama alam senja di Bukit Poboya (Kecamatan Palu Timur)

- Air Terjun Tunggu Indah (Kecamatan Palu Utara)

(2) Obyek Wisata Tirta/Bahari, terdapat di:

Kabupaten Donggala, yaitu :

- Pantai Pasir Putih Tanjung Karang Donggala
- Pantai Pasir Putih Towale (Kecamatan Banawa)
- Permandian Loli (Kecamatan Sindue)
- Pantai Enu (Kecamatan Sindue)
- Danau Talaga (Kecamatan Damsol)
- Danau Laut Tolongano (Kecamatan Banawa)

Kabupaten Sigi, yaitu :

- Danau Lindu (Kecamatan Kulawi)

Kabupaten Parigi Moutong, yaitu :

- Pantai Nalera (Kecamatan parigi)

Kabupaten Poso, yaitu :

- Taman laut Teluk Tomori (Kecamatan Bungku Utara)
- Permandian Pasir Putih Siuri Danau Poso (Kecamatan Pamona Utara)

Kabupaten Tojo Unauna, yaitu :

- Taman Laut Tanjung Api (Kecamatan Ampana)
- Taman laut Kepulauan Togian (Kecamatan Walea Kepulauan)
- Pantai Matako (Kecamatan Tojo)

Kabupaten Tolitoli, yaitu :

- Pulau Buol (Kecamatan Tolitoli Utara)
- Pantai Batu Bangga (Kecamatan Galang)
- Teluk Kuliao
- Tanjung Santigi
- Pulau Tumpangan (Kecamatan Boalan)
- Pantai Tantiola (Kecamatan Damsel)
- Pantai Kombo (Kecamatan Damsel)
- Pantai Bangkari (Kecamatan Damsel)

- Pantai Lunggaina dan Pantai Koko (Kecamatan Dampal Utara)

Kabupaten Buol, yaitu :

- Permandian Alam Kulanggo (Kecamatan Momunu)
- Pulau Raja (Kecamatan Paleleh)

Kabupaten Banggai, yaitu :

- Pantai Bangkiri (tempat bertelur Burung Maleo)
- Pantai Pulau Tikus (Kecamatan Batui).

Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu :

- Pantai Lokutoi (Pulau Banggai)

Kota Palu, yaitu :

- Pantai Buluri (Kecamatan Palu Barat)
- Pantai Tumbelaka (Kecamatan Palu Barat)
- Pantai Talise (Kecamatan Palu Timur)
- Pantai Mamboro (Kecamatan Palu Utara)

(3) *Obyek Wisata Budaya*, terdapat di :

Kabupaten Sigi, yaitu :

- Taman Budaya Watunonju (Kecamatan Biromaru)
- Taman Purbakala (Kecamatan Biromaru)

Kabupaten Poso, yaitu :

- Taman Budaya Seppe (Bada), Kecamatan Lore Selatan
- Taman Batuan Megalitik Basoa, Kecamatan Lore Utara
- Taman Batuan Megalitik Napu Kecamatan Lore Utara

Kabupaten Morowali, yaitu :

- Goa Tapak Tangan Teluk Tomori Kecamatan Bungku Utara.

Kabupaten Banggai, yaitu :

- Makam Raja-Raja (Kecamatan Luwuk)
- Bekas Benteng Kembang Marta (Kecamatan Lamala)
- Mesjid Tua di Desa Lemba (Kecamatan Lamala)
- Meriam Kuno di Desa Boniotek (Kecamatan Lamala)

Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu :

- Karaton Kerajaan Banggai (Kecamatan Banggai)
- Makam Tua di Desa Liang (Kecamatan Liang)

Kota Palu, yaitu :

- Museum Kota Palu (Kecamatan Palu Barat)
- Makam Datu Karama (Kecamatan Palu Barat)
- Rumah Adat Souraja (Kecamatan Palu Barat)

(4) *Obyek Wisata Agro, terdapat di :*

Kabupaten Sigi, yaitu :

- Taman Ternak Sidera (Kecamatan Biromaru)

Kabupaten Morowali Utara, Yaitu :

- Perkebunan Karet Beteleme (Kecamatan Lembo)
- Perkebunan Cengkeh Morowali (Kecamatan Lembo)
- Perkebunan Kelapa Sawit di Bungku.

Kabupaten Poso, Yaitu :

- Hutan Anggrek Bancea (Kecamatan Pamona Selatan)
- Perkebunan Teh dan Kopi di Lembah Napu

Kabupaten Tolitoli, yaitu :

- Hutan Cengkeh Tolitoli

Kabupaten Banggai, yaitu :

- Pertanian Transmigrasi Toili

1.3. Capaian Kinerja Pembangunan Ekonomi dan Sosial

A. Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan pembangunan ekonomi secara substansi adalah untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang ada, dengan tujuan akhir yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan terciptanya kondisi dasar, yakni: (1) Pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan; (2) Penciptaan sektor ekonomi yang kokoh; serta (3) Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Ekonomi Sulawesi Tengah tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 (*c-to-c*) tumbuh 4,86 persen melambat dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 8,83 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 23,68 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor sebesar 27,78 persen. Sedangkan Ekonomi Sulawesi Tengah triwulan IV tahun 2020 bila dibandingkan triwulan IV tahun 2019 (*y-on-y*) tumbuh sebesar 4,45 persen lebih lambat bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,92 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 25,25 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 28,67 persen. Selanjutnya ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah triwulan IV tahun 2020 dibandingkan triwulan sebelumnya (*q-to-q*) mengalami pertumbuhan sebesar 4,12 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 19,89 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 19,78 persen.

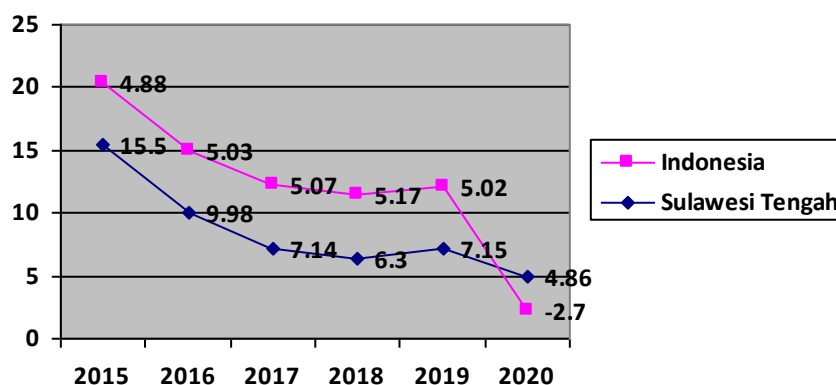
Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp197,44 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp134,15 triliun.

Pada bulan Februari tahun 2020, dunia secara global dan Indonesia termasuk wilayah Sulawesi Tengah mengalami wabah pandemi *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* yang berakibat pada pembatasan aktivitas ekonomi secara langsung sebagai upaya meminimalisir cakupan

penyebarannya yang sangat masif. Kondisi ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang berawal pada penutupan beberapa industri barang dan jasa, pemberhentian hubungan kerja-PHK, penundaan investasi, pembatasan transportasi laut, udara dan darat, penutupan daerah wisata dan turunnya tingkat hunian hotel (*lower-occupational*).

Berdasarkan PDRB tahun dasar 2010, laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada tahun 2015 sebesar 15,50 persen kemudian mengalami penurunan selama 4 tahun berturut-turut mulai tahun 2016 sampai tahun 2019 dengan pertumbuhan mencapai 7,15 persen. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali yang signifikan sebesar 4,86 persen dan masih berada diatas laju pertumbuhan ekonomi nasional.

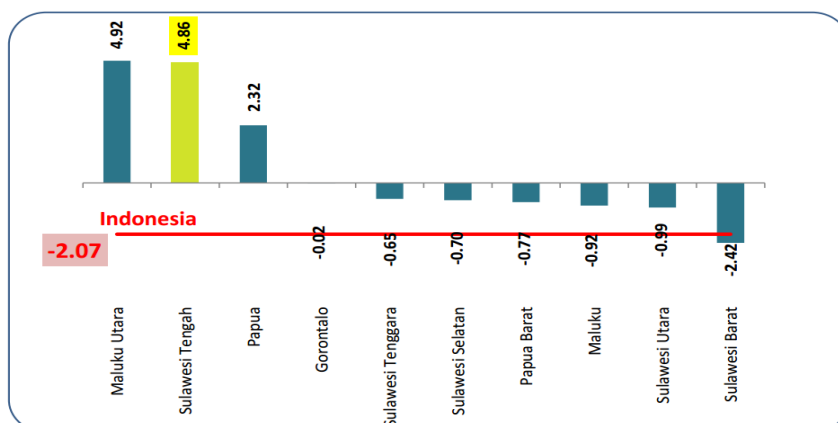
Gambar 1. 2
Trend Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2015-2020 (Persen)



Sumber: BPS Sulteng 2021

Dalam perspektif regional Sulawesi, Maluku, dan Papua (SULAMPUA) Tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah menempati peringkat kedua dari 10 provinsi yang ada. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 4,92 persen dan terendah di Provinsi Sulawesi Barat yang mengalami kontraksi sebesar 2,42 persen.

Gambar 1.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah
Dalam Perspektif Regional SULAMPUA Tahun 2020 (Persen)

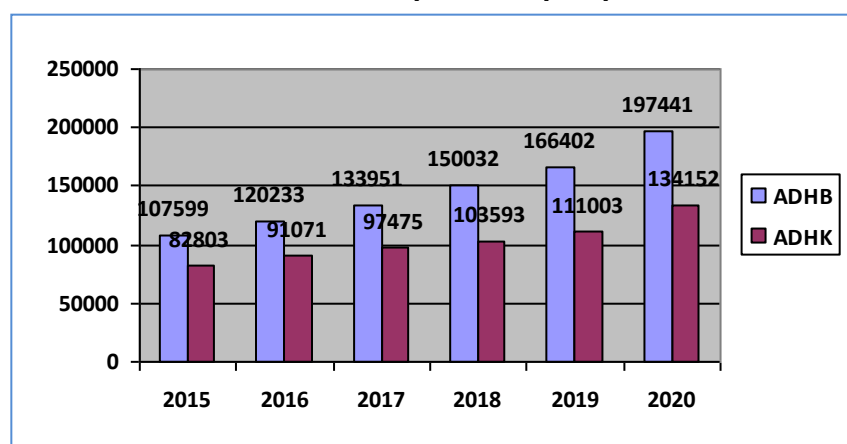


Sumber: BPS Sulteng, 2021

B. Nilai dan Komposisi Struktur PDRB

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2015-2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 Nilai PDRB ADHB mencapai Rp107.599 milyar menjadi Rp197.441 milyar pada tahun 2020, sedangkan PDRB ADHK 2010 dari Rp82.803 miliar pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp134.152 milyar pada tahun 2020.

Gambar 1.4
Perkembangan Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2015-2020 (Miliar Rupiah)



Sumber: BPS Sulteng, 2021

Dilihat dari struktur PDRB menurut lapangan usaha, sepanjang tahun 2020 sektor industri pengolahan secara umum masih dominan dalam pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah dengan kontribusi rata-rata sebesar 27,61 persen pertahun, disusul terbesar kedua adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi rata-rata sebesar 21,76 persen pertahun dan Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi rata-rata sebesar 13,40 persen pertahun.

Sementara dilihat dari sisi pengeluaran, struktur PDRB Provinsi Sulawesi Tengah didominasi oleh komponen ekspor barang dan jasa dengan kontribusi rata-rata pertahun sebesar 80,11 persen, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Komponen impor barang dan jasa dengan kontribusi rata-rata pertahun sebesar 65,86 persen dan Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan kontribusi rata-rata pertahun sebesar 39,32 persen. Secara rinci perkembangan kontribusi masing-masing komponen pengeluaran terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7
Struktur PDRB Menurut Komponen Pengeluaran
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2020 (Persen)

Komponen (1)	Struktur Ekonomi		
	2018 (2)	2019* (3)	2020** (4)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	43,66	42,76	39,32
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,73	1,81	1,68
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,73	10,66	10,17
4 PMTB	34,92	38,84	34,06
5 Perubahan Inventori	3,37	- 0,24	0,53
6 Ekspor Barang dan Jasa	68,34	71,16	80,11
7 Impor Barang dan Jasa	62,76	64,98	65,86
PDRB	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Sulteng, 2021

Keterangan *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

C. Kondisi Ketenagakerjaan

Penciptaan kesempatan kerja merupakan masalah yang amat mendasar dalam membangun masyarakat yang berpendapatan dan memiliki daya beli yang memadai. Oleh karena itu pembangunan di bidang ekonomi harus diarahkan pada upaya penciptaan dan perluasan lapangan kerja.

Sepanjang periode 2015-2018 jumlah angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Tengah cenderung meningkat, yakni pada tahun 2015 sebanyak 1.426.527 orang meningkat menjadi 1.494.757 orang pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017 jumlah angkatan kerja meningkat menjadi 1.557.099 orang dan pada tahun 2018 jumlah angkatan kerja meningkat menjadi 1.570.386 orang. Akan tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1.548.639 orang. Lalu pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 1.575.73 orang.

Daya serap tenaga kerja di sektor ekonomi dapat dilihat dari besarnya porsi keterlibatan angkatan kerja (yang bekerja) dalam proses kegiatan produksi yang ditunjukkan oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Perkembangan TPAK di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi, yakni pada tahun 2015 tercatat TPAK mencapai 70,21 persen menurun menjadi 69,44 persen pada tahun 2020.

Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2015 sebesar 2,99 persen, lalu mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 3,46%. Kemudian pada tahun 2017 TPT mengalami penurunan sebesar 2,97 persen lalu TPT kembali mengalami peningkatan selama 3 tahun berturut pada tahun 2018, 2019 dan 2020 yaitu sebesar 3,19 persen, 3,5 persen dan 3,77 persen.

Tabel .1.8
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan
Provinsi Sulawesi Tengah, Periode 2015-2020

Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Angkatan Kerja	1.426.527	1.494.757	1.557.099	1.570.386	1.548.639	1.575,73
Bekerja	1.383.919 (97,01%)	1.443.060 (96,54%)	1.510.782 (97,03%)	1.520.304 (96,81%)	1.493.796 (96,46%)	1,516,35 (3,43%)
Penganggur	42.608 (2,99%)	51.697 (3,46%)	46.317 (2,97%)	50.082 (3,19%)	54.843 (3,54%)	59,38 (26,36%)
Bukan Angkatan Kerja	605.408	575.544	550.900	572.570	633.737	693,42
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70,21	72,20	73,87	73,28	70,96	69,44
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,99	3,46	2,97	3,19	3,54	3,77

Sumber: BPS Sulteng, 2020

Dengan adanya pandemi covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian, tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut merasakan dampaknya. Dampak Covid-19 terhadap penduduk usia kerja menurut jenis kelamin dan daerah tempat tinggal periode Agustus 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.9
Dampak Covid-19 terhadap penduduk usia kerja periode Agustus 2020

Komponen	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		Total (Ribu orang)
	Laki-laki (ribu orang)	Perempuan (ribu orang)	Perkotaan (ribu orang)	Perdesaan (ribu orang)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengangguran ² Karena Covid-19	4,63	4,50	4,79	4,34	9,12
Bukan Angkatan Kerja (BAK) ³ Karena Covid-19	1,63	3,82	2,33	3,12	5,45
Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19	4,41	7,01	7,33	4,09	11,42
Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19	115,03	87,89	97,33	105,59	202,92
Total	125,70	103,21	111,78	117,13	228,91
Penduduk Usia Kerja (PUK)	709,61	1.559,53	1.153,75	1.115,39	2.269,14
Persentase terhadap PUK	17,71	6,62	9,7	10,5	10,09

Keterangan :

1. Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015
2. Pengangguran karena Covid-19 adalah pengangguran yang berhenti bekerja karena Covid-19 selama bulan Februari-Agustus 2020
3. Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena Covid-19 selama bulan Februari-Agustus 2020

Sumber: BPS Sulteng, 2020

Berkurangnya jam kerja adalah dampak Covid-19 yang paling banyak dirasakan penduduk usia kerja, sebanyak 202,92 ribu orang atau sebesar 10,09 persen. Sedangkan jumlah penganggur karena dampak Covid-19 sebanyak 9,12 ribu orang atau sekitar 15,37 persen terhadap total penganggur di Sulawesi Tengah. Secara umum, pada semua kategori tersebut, penduduk laki-laki lebih banyak terdampak dibandingkan perempuan. Sedangkan menurut tempat tinggal, penduduk perkotaan dan perdesaan sama-sama terdampak Covid-19.

D. Inflasi

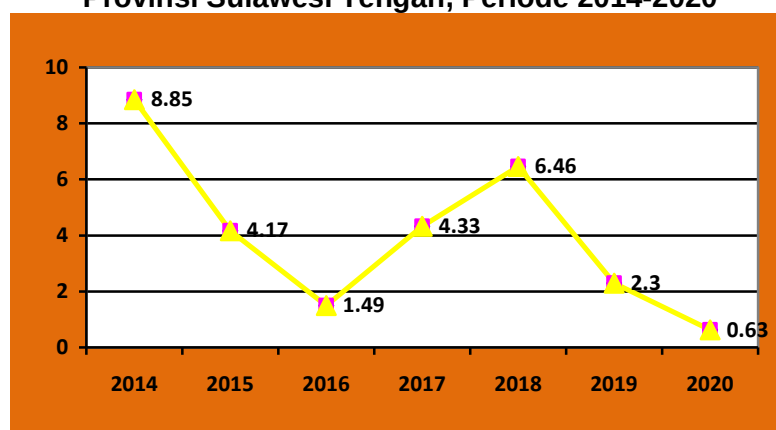
Kondisi perekonomian yang stabil dan kondusif merupakan prasyarat untuk memacu tingkat capaian pembangunan secara signifikan dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Beberapa hal yang secara umum menjadi daya ungkit terhadap penguatan struktur ekonomi antara lain ketersediaan infrastruktur yang memadai, struktur pasar yang relevan, kebijakan tata niaga yang baik, keterpaduan pengawasan rantai distribusi barang yang diperdagangkan, dan monitoring harga yang berkesinambungan.

Informasi perubahan harga pada sebagian besar komoditas yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat menjadi alat kendali yang penting, mengingat memiliki korelasi positif terhadap laju inflasi dari waktu ke waktu. Salah satu tantangan dalam mengantisipasi tingginya tingkat inflasi adalah upaya untuk mempertahankan kesinambungan daya beli kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan membantu upaya pemerintah mencapai kestabilan harga nasional. Namun demikian, upaya untuk menurunkan laju inflasi secara permanen bukanlah hal yang mudah karena fakta di lapangan masih terjadi harga yang fluktuatif bahkan cenderung meningkat.

Inflasi yang diukur berdasarkan perubahan indeks harga di tingkat konsumen (IHK) yaitu indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga antar waktu dari satu paket jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan, sebagai proksi pengeluaran dalam suatu periode tertentu.

Perkembangan laju inflasi tahunan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2014-2019 cenderung menunjukkan hasil yang fluktuatif. Pada tahun 2014 inflasi Kota Palu mencapai 8,85 persen, kemudian selama dua tahun berikutnya mengalami penurunan hingga pada tahun 2016 mencapai 1,49 persen. Akan tetapi, pada tahun berikutnya, laju inflasi ini kembali naik menjadi 4,33 persen pada tahun 2017 kemudian naik lagi menjadi 6,46 persen pada tahun 2018 lalu kembali turun tajam pada tahun 2019 menjadi 2,30 persen. Kemudian pada tahun 2020 laju inflasi kota Palu kembali turun menjadi 0,63 persen.

Gambar 1.5
Perkembangan Laju Inflasi Tahunan Kota Palu
Provinsi Sulawesi Tengah, Periode 2014-2020



Sumber: BPS Sulteng 2021

Pada tahun 2020, inflasi Kota Palu sebesar 0,63 persen menunjukkan penurunan yang cukup besar dibandingkan tahun 2019. Secara hirarki pengaruh terbesar dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,64 persen, kelompok transportasi sebesar 1,25 persen, Kelompok

Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga sebesar 0,60 persen dan Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,52 persen.

Tabel 1.10
Inflasi Kelompok Pengeluaran Kota Palu Tahun 2020

Kelompok Pengeluaran (1)	Kota Palu	
	IHK (2)	Inflasi (3)
Umum	107,13	0,63
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	111,35	1,64
2. Pakaian dan Alas Kaki	107,23	-0,13
3. Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,77	0,02
4. Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	103,04	0,04
5. Kesehatan	108,52	0,02
6. Transportasi	106,26	1,25
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,91	0,00
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	102,73	0,60
9. Pendidikan	112,38	0,00
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	110,75	0,00
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	110,62	0,52

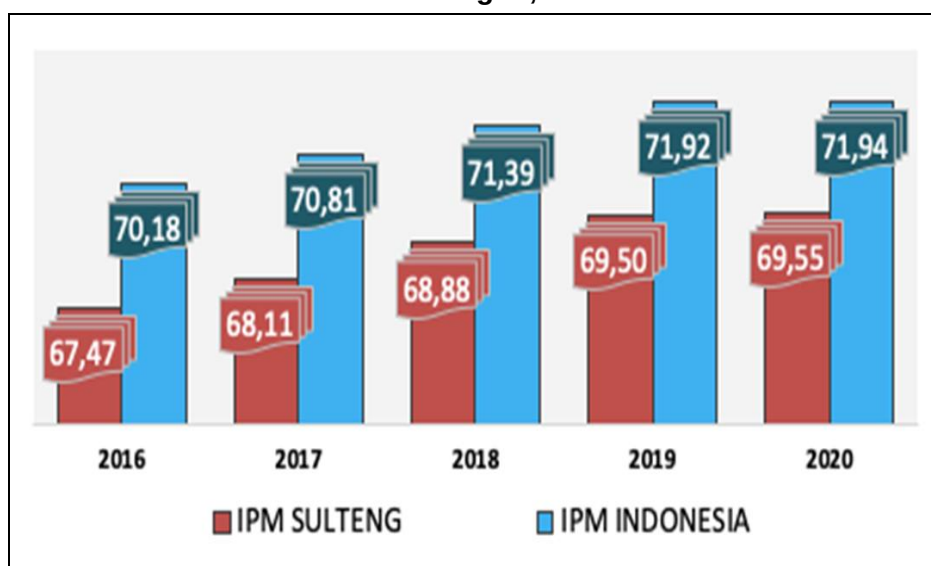
Sumber: BPS Sulteng 2021

E. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan mutu modal manusia. Paradigma Pembangunan Mutu Modal Manusia, dianggap sebagai suatu konsep yang lebih komprehensif karena memperhitungkan keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi dan non-ekonomi. Berdasarkan metode baru perhitungan IPM, aspek ekonomi meliputi Pengeluaran Riil Perkapita, dan dari aspek non ekonomi terdiri dari aspek pendidikan meliputi Angka Harapan Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah, dan aspek kesehatan meliputi Angka Harapan Hidup.

Pembangunan mutu modal manusia di Provinsi Sulawesi Tengah secara kontinu mengalami perbaikan yang cukup nyata, yang ditandai dengan meningkatnya nilai IPM Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2016-2020. Hal ini terlihat pada tahun 2016 nilai IPM Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 67,47 meningkat menjadi 68,11 pada tahun 2017, kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan setiap tahun sebesar 68,88 dan 69,50 pada tahun 2019. Selanjutnya nilai IPM pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,05 poin dari tahun 2019 menjadi 69,55 berstatus “sedang”, masih sama dengan status pada tahun 2019. Akan tetapi, capaian IPM tersebut masih lebih rendah dibanding capaian IPM Nasional.

Gambar 1.6
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016–2020



Sumber: BPS Sulteng, 2021

Dilihat lebih lanjut dari sisi komponen pembentukan IPM, capaian tersebut terbentuk dari Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH), Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran perkapita per tahun. Pada tahun 2020, AHH Sulawesi Tengah mencapai 68,69 tahun. Artinya, bayi yang baru lahir diharapkan dapat bertahan hidup hingga usia 68,69 tahun. Dari sisi pendidikan, rata-rata penduduk usia 7 tahun yang mulai bersekolah,

diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 13,17 tahun dan penduduk usia 25 tahun ke atas sudah menempuh masa sekolah rata-rata selama 8,83 tahun. Selanjutnya, pengeluaran per kapita disesuaikan di Sulawesi Tengah 2020 sebesar Rp9.335 juta per tahun.

Tabel 1.11
Perkembangan Komponen IPM
Di Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2015 - 2020

Komponen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup (Tahun)	67,26	67,31	67,32	67,32	68,23	68,69
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,72	12,92	13,04	13,04	13,14	13,17
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,97	8,12	8,29	8,29	8,75	8,83
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/ Tahun)	8.768	9.034	9 311	9 311	9.604	9,335
IPM	66,76	67,47	68,11	68,11	69,50	69,55

Sumber: BPS Sulteng, 2021

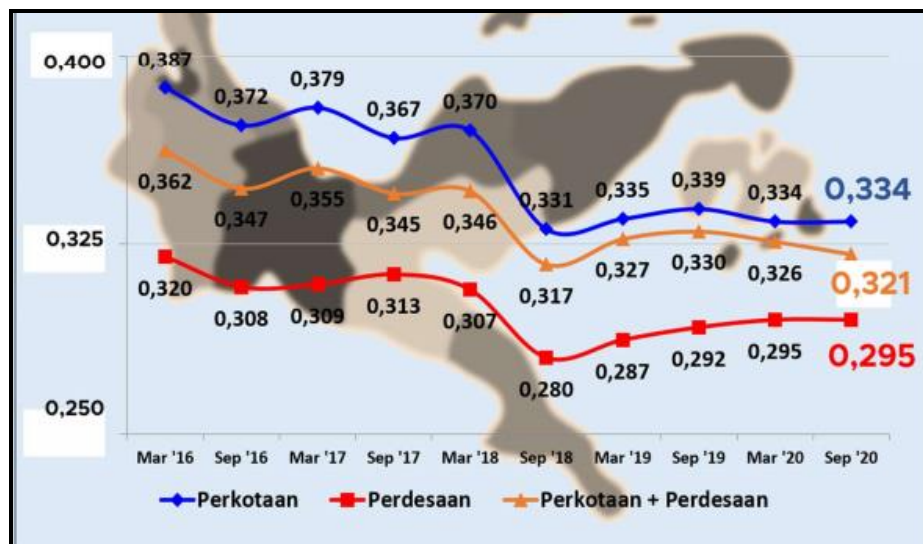
F. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Salah satu indikator yang lazim digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat disamping PDRB Perkapita adalah bagaimana distribusi pendapatan masyarakat, dengan harapan tidak terjadi ketimpangan antar kelompok/golongan pendapatan masyarakat. Indikator yang digunakan merepresentasikan ketimpangan masyarakat yakni indeks Gini atau koefisien Gini. Indeks Gini bernilai antara 0 sampai dengan 1, bila nilai indeks Gini bernilai 0 maka terjadi pemerataan distribusi pendapatan masyarakat sempurna dan indeks Gini bernilai 1 maka terjadi ketidakmerataan distribusi pendapatan secara sempurna.

Nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah selama periode Maret 2016 - September 2020 terus mengalami fluktuasi. Pada Maret 2016 hingga September 2018 nilainya cenderung menurun. Kondisi ini

menunjukkan bahwa selama periode Maret 2015 hingga September 2018 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Sulawesi Tengah. Namun demikian pada periode September 2018 hingga September 2019 nilainya mengalami sedikit peningkatan, dan selanjutnya kembali menunjukkan trend penurunan hingga September 2020 dengan nilai 0,321 poin.

Gambar 1.7
Trend Gini Ratio Provinsi Sulawesi Tengah
Periode Maret 2016 – September 2020



Sumber: BPS Sulteng, 2021

Dalam perspektif regional Pulau Sulawesi, pada September tahun 2020 nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah merupakan yang terendah dibanding provinsi lain di Sulawesi, baik secara total maupun menurut kategori wilayah perkotaan dan perdesaan. Pada skala nasional, posisi nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah dalam setahun terakhir relatif stagnan. Pada September 2019 nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah berada pada urutan ke-11 terendah se-Indonesia, sedangkan pada Maret 2020 posisi tersebut hanya naik satu peringkat ke posisi 10, dan bertahan hingga September 2020.

Tabel 1.12
Kondisi Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Perspektif
Pulau Sulawesi Periode September 2019 – September 2020

Kode	PROVINSI	September 2019			Maret 2020			September 2020		
		Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
71	Sulawesi Utara	0,375	0,346	0,376	0,371	0,344	0,370	0,367	0,346	0,368
72	Sulawesi Tengah	0,339	0,292	0,330	0,334	0,295	0,326	0,334	0,295	0,321
73	Sulawesi Selatan	0,393	0,354	0,391	0,384	0,356	0,389	0,384	0,352	0,382
74	Sulawesi Tenggara	0,402	0,353	0,393	0,404	0,347	0,389	0,403	0,348	0,388
75	Gorontalo	0,399	0,393	0,410	0,393	0,392	0,408	0,390	0,391	0,406
76	Sulawesi Barat	0,438	0,320	0,365	0,436	0,321	0,364	0,437	0,321	0,356
	INDONESIA	0,391	0,315	0,380	0,393	0,317	0,381	0,399	0,319	0,385

Sumber: BPS Sulteng, 2021

1.4 Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih dan RPJMN sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Isu strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

A. Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakan Supremasi Hukum Dan Ham

Upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel masih menghadapi beberapa permasalahan dan diperlukan penanganan secara mendasar, terencana dan sistematis, saat ini kelembagaan pemerintah daerah baik dari aspek struktur maupun fungsi kelembagaan belum efektif dan efisien sehingga kualitas pelayanan publik belum optimal, disamping itu rendahnya citra dan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang didasari filosofi *good governance*, hal ini akibat penerapan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan belum professional dan belum memiliki indikator dan pola yang jelas.

Dari sisi hukum masih dirasakan budaya hukum masyarakat masih rendah sebagai akibat dari rendahnya pemahaman, kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat serta kepastian dan keadilan hukum masih rendah dan belum merata, selain itu masih dirasakan kurangnya sistem koordinasi dan kerjasama fungsional penegakkan serta penyerasian tugas-tugas antara semua unsur aparatur pemerintah daerah dibidang pembinaan tertib hukum dalam rangka usaha terselenggaranya ketertiban dan kepastian hukum masyarakat.

B. Pembangunan Infrastruktur Daerah Dan Mendukung Kemandirian Energi

Kondisi wilayah geografis Sulawesi Tengah yang luas dan tidak meratanya penyebaran penduduk terutama pada daerah-daerah wilayah pedesaan, daerah pedalaman dan terpencil sekaligus sebagian dari penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan dan belum memadai aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antar daerah seperti transportasi, irigasi, perumahan dan pemukiman, telekomunikasi serta kelistrikan.

Seiring dengan peningkatan arus pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk serta mulai tingginya konsumtif masyarakat, untuk itu pemerintah daerah kabupaten/kota telah membangun beberapa infrastruktur khususnya dibidang transportasi udara. Untuk di kota palu saat ini telah memiliki Bandar Udara Mutiara Sis Aldjufrie Palu yang memiliki landasan pacu 2.250 m sehingga bisa didarati oleh pesawat jenis Boeing 737-900, disamping itu beberapa kabupaten telah membangun Bandar udara seperti Bandar Udara Amirudin Amir di Banggai, Bandara Kasiguncu di Poso, Bandara Lalos di Toli-Toli, Bandara Pogogul di Buol, dan Bandara Tanjung Api di Tojo Una-una serta Bandara Banggai di Banggai Laut yang masih perlu peningkatan kapasitas dan fasilitas dalam memacu akselerasi pembangunan di bidang transportasi udara di daerah Kabupaten.

Sementara dibidang transportasi darat secara fungsional kondisi jalan di Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2020 realisasi persentase kemandirian jalan provinsi sebesar 61,78% terhadap panjang total 1.643,74 Km. Pencapaian ini secara umum didapatkan melalui kegiatan peningkatan jalan sepanjang 35 Km yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah dan APBN.

C. Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Dalam pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan masih belum optimal dalam pelaksanaannya untuk itu upaya pengembangan ekonomi masyarakat perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan daya saing serta untuk pemerataan pembangunan ekonomi antar daerah kabupaten/kota secara berkesinambungan. Saat ini pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah berada di atas rata-

rata pertumbuhan nasional namun pertumbuhan perekonomiannya masih bertumpu pada sektor primer pertanian dan pertambangan tetapi relatif masih belum memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat secara langsung, sehingga diharapkan kedepan pertumbuhan ekonomi dapat beralih dan terbagi secara merata pada sektor sekunder lainnya yaitu industri, perdagangan dan jasa. Salah satu alasan rendahnya nilai tambah dari produktivitas perekonomian pada sektor sekunder adalah masih rendahnya penguasaan teknologi dan keterampilan masyarakat pada teknologi tepat guna, serta akses pasar yang sangat minim sehingga dalam pemasaran hasil produksi unggulan keluar daerah belum dapat dioptimalkan.

Hasil pembangunan melalui pertumbuhan ekonomi selama ini masih belum cukup memadai untuk mengatasi kesenjangan kesejahteraan di berbagai wilayah, walaupun didukung dengan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, daerah-daerah masih belum bisa mengoptimalkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu salah satu antisipasi permasalahan kesenjangan dan mempercepat pembangunan perekonomian daerah yaitu dengan cara mendorong penyebaran industri ke daerah-daerah, dengan melakukan terobosan pengembangan kawasan industri yang berbasis pada kompetensi inti dan produk-produk unggulan di setiap daerah.

Daerah yang telah mencoba melakukan klaster industri adalah Kota Palu yang membangun kawasan industri terpadu dan saat ini telah dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan disusul dengan Kabupaten Morowali yang telah membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Pertimbangan dalam mengembangkan Kawasan Industri Terpadu yang di arahkan pada Kawasan Ekonomi Kusus (KEK), sesuai dengan arah kebijakan industri nasional.

D. Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis Dan Maritim Yang Optimal Dan Berkelanjutan Sejalan Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia

Permasalahan pemanfaatan sumber daya alam hingga saat ini tidak memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam semakin menipis. Penurunan kualitas sumber daya alam ditunjukkan dengan tingkat eksploitasi hutan yang semakin marak akibat terjadinya pembalakan liar, penambangan liar, rusaknya wilayah laut akibat penangkapan ikan secara ilegal serta meluasnya alih fungsi lahan pertanian dan tambak untuk kegiatan perumahan dan ekonomi lainnya.

Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi adalah masih belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam untuk pembangunan. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat eksploitasi sumber daya hutan dan energi untuk pembangunan serta masih rendahnya pemanfaatan sumber daya perikanan dibanding potensinya.

E. Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Dan Berbudaya.

Dalam menganalisis kualitas mutu modal manusia dapat menggunakan berbagai macam indikator penilaian kualitas sumber daya manusia. Salah satu indikator penilaian yang digunakan adalah dengan melihat dan membandingkan kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di setiap daerah. Di Provinsi Sulawesi Tengah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berstatus “sedang”. Ini ditandai dengan masih lebih rendahnya nilai IPM Sulawesi Tengah dibandingkan dengan rata-rata Nasional. Tahun 2020, IPM Sulawesi Tengah sebesar 69,55 poin yang masih dibawah rata-rata nasional 71,94 poin.

Kondisi lainnya adalah jumlah masyarakat miskin masih tinggi dan berada di atas rata-rata nasional. Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah pada tahun 2020 mencapai 403,74 ribu orang atau 13,06

persen dari jumlah penduduk Sulawesi Tengah. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2020 sebesar 9,21 persen, sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2020 sebesar 14,76 persen. Karena itu dibutuhkan prioritas-prioritas dan sasaran dalam melakukan perencanaan pembangunan secara serius dan konsisten di bidang kualitas sumber daya manusia agar dapat sejajar dengan daerah lainnya.

1.5 Permasalahan Utama

Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi berbagai faktor yang dianggap sangat mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah saat ini, untuk dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan pembangunan pada periode berikutnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian permasalahan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan urusan pemerintah daerah pada tabel berikut ini:

Tabel 1.13
Permasalah Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Kriteria/Aspek/ Urusan	Permasalahan
1. Pendidikan	a. Kondisi Geografis Daerah Sulawesi Tengah yang terdiri dari daerah kepulauan dan pedalaman mengakibatkan masih rendahnya akses anak usia sekolah terutama di daerah-daerah terpencil b. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas masih terbatas

	c. Kualitas dan Kuantitas guru masih rendah dan distribusinya belum merata d. Mutu sekolah yang tidak merata, relevansi, dan daya saing pendidikan masih rendah e. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan masih kurang optimal f. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas g. Manajemen dan tatakelola pendidikan belum efektif h. Kemampuan penyediaan layanan Pendidikan Menengah dan khusus relatif masih rendah i. Terbatasnya daya tampung dan jangkauan layanan pendidikan j. Penguasaan dan pengembangan IPTEK masih rendah k. Masih minimnya tingkat partisipasi sekolah anak perempuan di wilayah pedesaan.
2. Kesehatan	a. Sarana dan prasarana kesehatan RSUD Daerah pada umumnya masih terbatas, sehingga kurang mendukung dan menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan yang prima

	b. Sumber daya manusia khususnya tenaga kesehatan medis dan non medis masih terbatas dan belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga pelaksanaan tugas belum mencapai tingkat maksimal c. Faktor sosial, ekonomi, pendidikan dan perilaku masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih belum mendukung d. Penyebaran tenaga medis dan paramedis di Kabupaten/kota di Sulawesi Tengah belum merata e. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan masih kurang; f. Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit masih tinggi g. Masih tingginya penyebaran penyakit menular seperti malaria, DBD dan ISPA h. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait PHBS, tingkat ekonomi masyarakat masih rendah, tingkat pendidikan masyarakat masih rendah i. Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Rendah j. Status kesehatan ibu dan anak masih rendah k. Status gizi masyarakat masih rendah;
--	---

	l. Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas m. Ketersediaan obat dan pengawasan obat-makanan masih terbatas n. Pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat masih terbatas o. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum optimal p. Manajemen pembangunan kesehatan belum efektif q. Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas masih rendah r. Masih rendahnya tingkat partisipasi laki-laki, keluarga dan masyarakat mengenai hak reproduksi perempuan s. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya kesehatan ibu dan anak.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Kondisi jalan yang kurang mantap masih tinggi terutama jalan kewenangan provinsi b. Irigasi pengairan sebagian besar kondisinya menurun c. Bangunan sarana prasarana pengendali banjir sungai dan pengamanan abrasi

	pantai saat ini sangat terbatas jumlahnya. d. Layanan air baku belum optimal dan merata e. Kinerja kelembagaan pengelolaan sumber daya air belum optimal f. Frekuensi dan intensitas bencana banjir, kekeringan dan abrasi pantai meningkat. g. Rendahnya kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur h. Masih kurangnya sosialisasi Perda RTRW Provinsi Sulawesi Tengah
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	a. Masih terdapat Rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni b. Masih rendah efisiensi dalam pembangunan perumahan c. Menurun kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air baku air minum d. Masih terbatas penyedia air minum baik oleh perusahaan daerah air minum (PDAM) dan non-PDAM yang sehat (kredibel dan profesional) e. Masih rendah kesadaran pelaku akan pengelolaan air limbah yang layak f. Penanganan sampah belum optimal g. Minim pengelola layanan persampahan yang kredibel dan profesional h. Kapasitas sistem drainase sudah tidak

	sesuai dengan kondisi saat ini i. Pembangunan sarana dan fasilitas masih belum spesifik untuk kebutuhan perempuan dan laki-laki lansia, orang cacat, perempuan menyusui dan anak berkebutuhan khusus, terutama di wilayah publik seperti pasar, rumah sakit, gedung, MCK, puskesmas, dan lainnya.
5. Katenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	a. Sering terjadi konflik internal yang berimbas pada fasilitasi pemerintah daerah dan dukungan pemikiran lainya yang seharusnya tidak relevan lagi di era demokrasi b. Masih ditemuinya konflik dan kasus kekerasan antar kelompok masyarakat serta perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas etnis dan agama tertentu c. Belum optimalnya pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan dan bhineka tunggal ika (prinsip keberagaman) dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara
6. Sosial	a. Masih tingginya populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (ketelantaran, kecacatan, ketunaan, korban bencana alam, korban bencana sosial, kemiskinan,

	KAT). b. Masih kurangnya kepedulian masyarakat termasuk dunia usaha dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat yang rentan (Lansia Terlantar dan Anak Cacat) c. Kurangnya lembaga masyarakat dan lembaga pemerintahan yang fokus/peduli pada masalah kerawanan sosial d. Masih tingginya kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan korban paska konflik yang membutuhkan pelayanan dan perlindungan e. Belum terintegrasinya sistem sosial yang berwawasan gender dalam program pemberdayaan dan kesejahteraan sosial.
7. Tenaga Kerja	a. Peningkatan jumlah angkatan kerja yang tinggi tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai b. Lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan pencari kerja c. Lapangan kerja yang tersedia sebahagian besar pada pertanian yang kurang diminati oleh para pencari kerja sehingga menimbulkan urbanisasi dari desa ke kota yang membuat masalah baru di perkotaan

	d. Sarana dan prasarana pendukung tenaga kerja terutama BLK belum memadai serta output dari BLK belum sepenuhnya mampu untuk mandiri e. Kurangnya jejaringan pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi f. Minimnya informasi bagi hak ketenagakerjaan khususnya bagi perempuan tenaga kerja wanita di luar negeri, termasuk perlindungan dan hak perempuan g. Minimnya kontrol, monitoring dan evaluasi terhadap sistem kerja pengiriman tenaga kerja keluar daerah maupun luar negeri.
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Kejadian kekerasan dalam rumah tangga masih cukup tinggi dan kemampuan penanganannya yang belum optimal b. Tingginya jumlah tenaga kerja yang masih dibawah umur c. Partisipasi angkatan kerja perempuan yang belum optimal d. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan yang belum optimal e. Masih tingginya kasus Perdagangan perempuan dan anak (<i>Traficking</i>)

	f. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan, anak serta pemberdayaan gender g. Rata-rata jumlah anak dalam keluarga yang masih tinggi (diatas 2)
9. Pangan	a. Permintaan pangan khususnya beras meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk b. Budaya makan beras yang cenderung tidak bisa tergantikan oleh makanan lain c. Alih fungsilahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan komersial d. Keandalan sistem irigasi semakin menurun e. Perubahan iklim global akibat pemanasan global menyebabkan perilaku iklim semakin sulit diprediksi f. Keberlanjutan sistem produksi padi akibat Degradasi hutan dan lahan khususnya di kawasan upstream (DAS Hulu) yang berdampak kepada rapuhnya fungsi hidrologi kawasan DAS g. Fenomena gizi buruk di masyarakat masih mengancam.

10. Pertanahan	a. Pemberian izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi belum optimal b. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi belum optimal c. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi belum optimal d. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi belum optimal e. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi belum optimal f. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi belum optimal g. Penyelesaian inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. asalah tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi belum optimal
----------------	---

	h. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah kabupaten /kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi belum optimal.
11. Lingkungan Hidup	a. Belum terintegrasinya program pembangunan sehingga mengabaikan keberlangsungan fungsi lingkungan hidup dan melahirkan berbagai konflik kepentingan antara pelaku ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup b. Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan meningkatnya pencemaran air, udara, tanah; berkurangnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan merosotnya keanekaragaman hayati, peningkatan abrasi pantai, banjir, tanah longsor dan berbagai bencana alam, serta kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tindakan manusia maupun kondisi alam c. Belum terintegrasinya keterlibatan masyarakat adat dan perempuan adat dalam pembangunan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal mengurangi emisi, degradasi dan pencapaian karbon d. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang sampah

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyusunan profil kependudukan Provinsi belum optimal.
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	a. Belum mantapnya penyelenggaraan otonomi desa b. Implementasi pembagian kewenangan antara desa dengan kabupaten belum berjalan sebagaimana yang diharapkan c. Kemampuan masyarakat desa maupun anggota BPD relatif terbatas baik dalam hal tingkat pendidikan formal kemampuan khusus terkait dengan tuntutan juga fungsinya, maupun pemahamannya terhadap kewenangan desa itu sendiri. d. Tingkat penghasilan perangkat desa dan anggota BPD belum memadai, sehingga mengakibatkan dedikasi kerja tidak optimal e. Belum semua desa memiliki kantor desa yang memadai sebagai sarana dan prasarana utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. f. Masih sedikitnya desa-desa yang mengembangkan kerjasama desa dalam rangka meningkatkan dan menguatkan otonomi desa g. Ketidakberdayaan masyarakat disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya.

	h. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal i. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemasyarakatan dan mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat masih sangat terbatas j. Lembaga desa sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan belum berfungsi optimal k. Tingginya angka kemiskinan di pedesaan
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Masih rendahnya pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB b. Belum optimalnya upaya peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera terhadap program keluarga berencana
15. Perhubungan	a. Manajemen moda transportasi (Angkutan Kota Antar Provinsi, Angkutan Kota Dalam Provinsi, Angkutan kota, Angkutan Desa, dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) belum optimal memenuhi tuntutan kebutuhan pelayanan angkutan yang mudah, murah, aman, nyaman dan selamat; b. Masih kurangnya fasilitas keselamatan lalu lintas jalan berupa rambu lalu lintas jalan, pagar pengaman maupun marka jalan nasional maupun provinsi;

	c. Masih kurangnya minat investor menanamkan modalnya dibidang transportasi; d. Belum terbangunnya database perhubungan terutama data sekunder dari kabupaten/kota; e. Pembinaan perusahaan jasa angkutan laut belum maksimal; f. Tata ruang perhubungan belum responsive terhadap pengguna jalan termasuk orang cacat.
16. Komunikasi dan Informatika	a. Layanan multi media dalam rangka pemenuhan hak tahu publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik belum optimal; b. Kesenjangan persepsi antara kalangan birokrasi dengan pihak pers dalam membangun nilai-nilai demokrasi untuk menciptakan check and balances.
17. Koperasi, usaha kecil dan menengah	a. Alat kelembagaan organisasi koperasi belum sepenuhnya berfungsi dengan baik b. Manajemen dalam koperasi masih lemah c. Sistem pengawasan terhadap koperasi masih lemah d. Kemampuan usaha koperasi belum mampu menghadapi persaingan dengan perusahaan swasta e. Modal masih terbatas; f. Pengembangan ekonomi usaha
18. Penanaman Modal	a. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang investasi di daerah; b. Rendahnya minat investor untuk

	menanamkan modalnya di Sulawesi Tengah c. Regulasi yang belum memihak pada para pelaku bisnis dan kepentingan daerah yang lebih spesifik d. Kemampuan pelaku dunia usaha belum sepenuhnya mampu memanfaatkan peluang usaha sesuai dengan potensi dan prospektif sumberdaya alam yang tersedia e. Posisi ruang Sulawesi Tengah yang cenderung tidak seunggul posisi ruang Provinsi lainnya di regional Sulawesi khususnya Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.
19. Kepemudaan dan Olahraga	a. Masih sumberdaya untuk pembinaan olahraga dan pembinaan kepemudaan, hal ini berpengaruh pada semua aspek yang terkait dengan pembangunan keolahragaan dan pemuda baik yang bersifat fisik/ sarana dan prasarana maupun aspek sistem pembinaan yang lebih maju dengan berbagai kebutuhannya b. Masih rendahnya rasa memiliki dan tanggungjawab pemuda bagi kelangsungan kehidupan masyarakat yang beriman dan berahlak mulia dalam suasana kehidupan yang pluralistic serta masih rendahnya jiwa dan semangat sebagai penerus kelangsungan pembangunan daerah dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia c. Derasnya penetrasi tata nilai budaya melalui berbagai macam media yang secara langsung mempengaruhi tata nilai budaya yang selama ini dijunjung dan memberi identitas keramahan, solidaritas, indikasi dampak negatif yang menimbulkan

	masalah antara lain penggunaan psikotropika dan napza serta berbagai perilaku yang menyimpang berwujud kekerasan, tawuran dan lainnya yang menyimpang dari tata nilai budaya.
20. Statistik	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah provinsi belum optimal.
21. Persandian	a. Kurangnya sarana dan prasarana persandian yang memadai b. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dibidang persandian masih relatif kurang c. Persandian belum menjadi minat dan pilihan karir yang menarik.
22. Kebudayaan	a. Lunturnya nilai-nilai kebudayaan daerah karena derasnya kebudayaan dari luar akibat peningkatan teknologi informasi b. Rendahnya apresiasi warga masyarakat dalam mengangkat nilai-nilai kebudayaan daerah c. Kurangnya informasi tentang kebudayaan daerah d. Lemahnya pendokumentasian sejarah kebudayaan termasuk pelestarian berbagai peninggalan sejarah Sulawesi Tengah.
23. Perpustakaan	a. Koleksi judul buku/disiplin ilmu di perpustakaan relatif masih terbatas dibandingkan dengan variasi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui koleksi bahan pustaka. b. Minat masyarakat memanfaatkan koleksi buku bacaan di perpustakaan masih perlu ditingkatkan. c. Sarana dan prasarana pendukung perpustakaan masih terbatas.

	d. Belum optimalnya kebijakan menyangkut perwujudan gerakan gemar membaca bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
24. Kearsipan	a. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan kearsipan masih terbatas b. Terbatasnya sarana layanan informasi arsip, sehingga pelayanan informasi kearsipan kepada masyarakat belum optimal c. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur bidang kearsipan d. Budaya menempatkan kearsipan sebagai bagian dari tata kelola dokumen yang bernilai strategis dari sisi hukum dan nilai historis masih rendah.
25. Kelautan dan Perikanan	a. Belum ada zonasi yang jelas bagi kawasan budidaya serta pembukaan kawasan tanpa mengikuti aturan yang berlaku; b. Kepemilikan lahan seringkali tidak jelas, adanya status tanah sengketa atau konflik antar hak adat, perseorangan dan perusahaan; c. Tata letak (lay out) dan konstruksi petak budidaya tidak kokoh, terlalu dangkal dan luas; d. Pola tanam tidak teratur dan sepenuhnya mengandalkan alam; e. Masih tingginya harga pakan ikan yang mengakibatkan meningkatnya biaya operasional sehingga margin keuntungan pembudidaya menurun; f. Nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan umumnya belum mengikuti kaidah dan persyaratan mutu produk; g. Teknologi yang diterapkan masih sederhana sehingga produksi tingkat produktifitas cenderung rendah;

	h. Kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang kurang optimal; i. Kurangnya akses terhadap permodalan, lembaga keuangan dan perbankan; j. Terbatasnya sarana produksi seperti induk dan benih unggul, pakan, pupuk dan obat-obatan yang standar; k. Terbatasnya prasarana produksi yang memadai seperti jalan produksi. Jaringan irigasi tambak, sarana PPI/TPI, mekanisme nelayan kecil, rumpon; l. Tingginya kerusakan ekosistem Mangrove dan terumbu karang sebagai habitat vital untuk tempat pemijahan ikan laut di berbagai kawasan di Sulawesi Tengah m. Lemahnya data sistem informasi sumber daya kelautan yang akurat dan mudah diakses masyarakat.
26. Pariwisata	a. Pelayanan industri pariwisata masih relatif rendah b. Sadar wisata masyarakat masih relatif kurang c. Belum ada rencana studi kawasan wisata secara detail d. Sarana dan prasarana pendukung pariwisata masih terbatas e. Masih lemahnya konsep pembangunan wisata berwawasan ekologi namun inovatif di lingkungan pariwisata f. Desain Kampanye wisata masih belum optimal.
27. Pertanian	a. Meningkatnya kebutuhan tanaman pangan sebagai bahan makanan pokok

	sejalan dengan pertambahan penduduk menjadi salah satu masalah dan tantangan yang dihadapi, selain itu meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman dapat menyebabkan produksi pertanian semakin menurun, untuk itu perlu dilakukan diversifikasi tanaman serta menggunakan teknologi tepat guna; b. Permasalahan lainnya adalah faktor pemasaran hasil produksi yang tidak didukung oleh informasi pasar, dan adanya para pengijon sehingga belum dapat meningkat kesejahteraan petani, untuk itu diharapkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat berperan lebih optimal melayani kebutuhan petani akan sarana produksi dan kredit serta menampung hasil produksi; c. Tingkat produktivitas masih rendah sebagai akibat tingkat pengetahuan dan keterampilan petani belum memadai, disamping kurangnya modal; d. Mutu hasil perkebunan relatif masih rendah sebagai akibat penanganan pasca panen belum baik; e. Menurunnya produktifitas air irigasi dalam mendukung hasil pertanian di wilayah rentan banjir dan lahan kering karena faktor lingkungan hidup dan perubahan iklim;
--	---

	f. Mekanisme pasaran hasil perkebunan belum memberikan keuntungan bagi petani; g. Usaha peternakan umumnya merupakan usaha peternakan rakyat yang berskala kecil dan merupakan usaha sampingan; h. Aktivitas peternakan yang meliputi ternak besar, kecil dan unggas berfluktuasi dan masih dikelola secara tradisional; i. Pelayanan kesehatan hewan belum mampu menjangkau seluruh daerah pengembangan ternak; j. Konsumsi daging dan telur masih dibawah standar gizi; k. Tata niaga ternak masih belum optimal l. Keterampilan peternak masih rendah dan belum memanfaatkan teknologi tepat guna seoptimal mungkin.
28. Kehutanan	a. Maraknya pencurian kayu di hutan negara, khususnya pada areal HPH; b. Pemanfaatan jasa lingkungan (air, wisata, carbon trade) di hutan produksi dan hutan lindung masih rendah; c. Pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan belum optimal.

29. Energi dan Sumber Daya Mineral	a. Adanya beberapa Kuasa Pertambangan (KP) yang tumpang tindih antara kuasa pertambangan (KP) dengan kontrak karya (KK) maupun kuasa pertambangan dengan Kawasan Hutan; b. Maraknya Pertambangan tanpa izin (PETI) di daerah dalam wilayah kontrak karya sehingga di khawatirkan dapat mengganggu lingkungan sekitarnya; c. Masih terbatasnya data yang akurat mengenai sumber daya mineral, Batu Bara, Panas Bumi, Air dan Tanah, karena masih kurangnya kegiatan eksplotasi dan studi kelayakan.
30. Perdagangan	a. Pemasaran hasil-hasil Industri belum maksimal karena rendahnya mutu dan kualitas serta harga yang belum memenuhi selera konsumen; b. Hasil pemasaran pertanian yang diterima oleh petani relatif rendah apalagi pada saat panen terlebih lagi nilai tambah dari hasil pertanian tersebut terserap oleh daerah lain seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara; c. Para pedagang kecil belum berperan

	secara maksimal dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah karena keterbatasan keterampilan, pengetahuan serta modal, sedang fasilitas kredit yang disediakan oleh Bank belum mampu dimanfaatkan secara optimal; d. Sarana dan prasarana perdagangan masih belum memadai seperti sarana pasar/ pertokoan yang letaknya strategis ditempati oleh pengusaha golongan menengah ke atas, sedang lokasi kurang strategis ditempati pengusaha golongan ekonomi lemah; e. Masih kurangnya informasi pasar luar negeri yang diterima secara cepat dan kontinyu; f. Sarana dan prasarana perdagangan masih belum memberikan jaminan keamanan dan responsive bagi kebutuhan perempuan, anak dan lansia.
31. Perindustrian	a. Kualitas SDM industri relatif masih rendah, khususnya pengrajin industri kecil sehingga kurang tanggap terhadap perubahan yang datang dari luar seperti teknis produksi, desain dan selera konsumen;

	b. Kemampuan manajemen dan semangat kewiraswastawan pengusaha/ pengrajin relatif masih kurang; c. Pemasaran hasil industri masih bersifat lokal; d. Peralatan dan cara kerja masih sederhana, sehingga kualitas produksi yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan; e. Kontinuitas bahan baku industri kecil yang kurang berpengaruh terhadap harga jual produk; f. Kawasan industri belum berjalan sebagaimana yang diharapkan untuk menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah.
32. Transmigrasi	a. Aksesibilitas calon transmigran ke lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi masih belum memadai; b. Bimbingan dan penyuluhan masih belum optimal; c. Rasa keterkaitan penduduk calon transmigrasi dengan penduduk lokal masih rendah; d. Keterlambatan penyiapan lahan dan bangunan pemukiman bagi transmigrasi; e. Adanya tumpang tindih lahan.

1.6 Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Provinsi terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Biro :

1. Asisten Sekretaris Daerah :
 - a) Asisten Administrasi Pemerintahan, Hukum dan Politik.
 - b) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - c) Asisten Administrasi Umum Dan Organisasi.
2. Biro – Biro :
 - a) Biro Administrasi Pemerintahan Umum.
 - b) Biro Administrasi Otonomi Daerah
 - c) Biro Hukum.
 - d) Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam.
 - e) Biro Administrasi Perekonomian.
 - f) Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.
 - g) Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.
 - h) Biro Umum.
 - i) Biro Organisasi.
3. Bagian – Bagian.
4. Sub Bagian – Sub Bagian.
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Asisten Administrasi Pemerintahan, Hukum dan Politik membawahi:

1. Biro Administrasi Wilayah Daerah dan Pemerintahan.
2. Biro Otonomi Daerah.

3. Biro Hukum.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:

1. Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan.
2. Biro Administrasi Perekonomian.
3. Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber daya Alam.

Asisten Administrasi Umum dan Organisasi membawahi:

1. Biro Organisasi.
2. Biro Umum.
3. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah

c. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

d. Dinas – Dinas Daerah terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Dinas Pengantar Provinsi Sulawesi Tengah.

11. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah.
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah.
15. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah.
16. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah.
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.
19. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.
21. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.
22. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.
23. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah.
24. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.
25. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
26. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah.
27. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
4. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Bab 2

Perencanaan Kinerja



PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

2.1.1 Visi

Dalam menentukan arah pandangan ke depan yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat, serta guna menyatukan persepsi, interpretasi serta komitmen seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa visi dalam RPJMD harus menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Sesuai dengan amanat ini, maka visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah adalah gambaran kondisi Provinsi Sulawesi Tengah yang ingin dicapai pada akhir periode 2016-2021. RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2015-2020.

Mengacu pada permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah dan berpijak pada prioritas pembangunan dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah, RPJMN Tahun 2015-2019 dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawacita dan Trisakti, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di provinsi Sulawesi Tengah maka visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2021 sebagai berikut:

“SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”

Visi di atas mengandung beberapa kata kunci (*keywords*) yang perlu dijabarkan kedalam misi dan diterjemahkan kedalam tujuan serta sasaran

pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, tujuan dan sasaran tersebut harus diikuti dengan strategi kebijakan, program dan kegiatan yang jelas, terarah dan terukur guna mewujudkan visi tersebut. Kata kunci atau pokok-pokok visi yang dimaksud adalah ***Maju, Mandiri dan berdaya Saing***. Pokok-pokok visi dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perumusan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<i>“SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”</i>	1. MAJU	Secara umum Maju berarti keadaan yang baik, kondisi masyarakat dalam keadaan menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya); telah mencapai atau berada pada tingkat peradaban yang tinggi. Makna kata Maju ditandai dengan hal-hal berikut: 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang Inklusif 2. Membaiknya pendapatan perkapita masyarakat Sulteng 3. Infrastruktur yang berkembang baik 4. Kemiskinan daritahun ketahun menurun 5. Tingkat pengganguran terbuka (TPT) makin rendah 6. Nilai Tukar Petani (NTP) makin baik
	2. MANDIRI	Kondisi masyarakat Sulteng yang mandiri dapat dijelaskan dimana masyarakat sulteng sejahtera dalam keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang/pihak lain dalam hal memenuhi kebutuhannya.

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		Makna kata Mandiri ditandai dengan hal-hal berikut: 1. Produksi pangan yang meningkat hingga kondisi ketahanan pangan makin baik 2. Meningkatnya Investasi daerah 3. Meningkatnya kemandirian Desa-desanya di wilayah Sulawesi Tengah
	3. BERDAYA SAING	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk meningkatkan daya saing daerah. Daya saing merupakan keberhasilan pembangunan daerah yang menggambarkan stabilitas kemajuan daerah dari integrasi dan kecenderungan global, yang juga mengukur keberlanjutan pertumbuhan kesejahteraan. Ruang lingkup peningkatan daya saing daerah Provinsi Sulawesi Tengah mencakup: 1. Stabilitas ekonomi makro daerah 2. Pemerintahan yang makin bersih dan professional 3. Perencanaan pemerintah yang makin baik 4. Kondisi investasi dan tenaga kerja 5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 6. Pembangunan infrastruktur meningkat

2.1.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021, ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1) Melanjutkan Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakan Supremasi Hukum dan HAM

Reformasi birokrasi dan pembangunan hukum serta ketentraman dan ketertiban adalah merupakan salah satu agenda penting pemerintah daerah 5 tahun ke depan yaitu karena pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen yang penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Reformasi tersebut kiranya dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan pelayanan publik, efektifitas dan akuntabilitas.

Pembangunan bidang hukum mencakup proses pembuatan peraturan daerah, proses pengawasan dan juga penegakannya, serta memfasilitasi hukum bagi masyarakat. Pembangunan hukum ini juga mencakup suasana dan kepastian hukum sehingga tercapainya ketentraman dan ketertiban.

2) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Mendukung Kemandirian Energi

Pembangunan infrastruktur adalah merupakan kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur yang meliputi transportasi, ketenagaan listrik, energi, pos telekomunikasi dan informatika, sumber daya air serta perumahan, pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan, merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut maka pembangunan infrastruktur memerlukan pendanaan yang sangat besar sehingga menjadi

kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran melalui dana APBN dan pemerintah daerah melalui dana APBD, serta melalui investor swasta dengan model *Publik Private Partnership*.

3) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka yang menjadi prioritas pemerintah daerah 5 tahun kedepan adalah meningkatkan pertumbuhan kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

Peranan swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kedepan sangat diharapkan, selain hal tersebut kebijakan untuk mendorong kinerja Usaha kecil Menengah dan Koperasi juga menjadi prioritas serta peran dan dukungan perbankan juga dibutuhkan dalam upaya meningkatkan dan memajukan Usaha Kecil Menengah melalui penambahan akses terhadap perluasan KUR, meningkatkan bantuan teknis dalam aspek pengembangan produk dan pemasaran.

4) Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim yang Optimal dan Berkelanjutan Sejalan Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia

Memanfaatkan SDA dan Lingkungan Hidup secara produktif, efisien, optimal berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berbudaya

Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing berdasarkan keimanan dan ketakwaan adalah merupakan salah satu agenda yang menjadi prioritas dimasa pemerintahan mendatang. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dapat dilihat pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tersebut seiring dengan upaya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi karena penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan daya saing serta akan memacu terciptanya kreatifitas dan inovasi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan menciptakan sumber daya manusia berdaya saing sehingga akan tercapainya pembangunan ekonomi yang makin mandiri. Dalam bidang kesehatan juga melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang antara lain ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup dan turunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik.

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu

tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 sebanyak 23 sasaran strategis.

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan pada rumusan Misi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk 5 (lima) tahunan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran 2016-2021

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good and clean governance</i>).	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien.
		2. Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.
2.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata serta penyediaan Energy Baru Terbarukan (EBT) dan sumber daya mineral di seluruh Kabupaten/Kota.	1. Tersedianya berbagai infrastruktur yang merata dan memadai.
3.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aktivitas ekonomi.	1. Menurunnya angka kemiskinan 2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi 3. Terwujudnya koperasi yang tangguh, berdaya saing, profesional dan mandiri. 4. Meningkatnya daya saing, efisiensi dan produktivitas perdagangan. 5. Terwujudnya industri yang tangguh, professional dan mandiri. 6. Meningkatnya nilai dan realisasi investasi.

		7. Meningkatnya kesejahteraan gender dalam pembangunan ekonomi. 8. Meningkatnya jumlah wisatawan. 9. Terciptanya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja. 10. Terbukanya keterisolasian daerah-daerah terpencil.
4.	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam guna mengoptimalkan nilai tambah ekonomi.	1. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan ditingkat tapak. 2. Optimalnya tatakelola hutan untuk pengendalian kerusakan DAS dan hutan lindung. 3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. 4. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan. 5. Meningkatnya produksi dan mutu tanaman hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan. 6. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan dan perikanan budidaya.
5.	Mengoptimalkan mutu modal manusia melalui peningkatan sarana dan prasarana.	1. Tuntasnya angka melek aksara. 2. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan untuk menuntaskan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan menengah. 3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan. 4. Suksesnya Keluarga Berencana dan terciptanya keluarga berkualitas.

2.1.4 Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 109/451/Ro.ORG.G.ST/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021.

Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

No	Sasaran	IKU	Penjelasan	OPD Penang-gung Jawab
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	Formulasi penghitungan : Berdasarkan hasil survey unit pelayanan publik terhadap 14 unsur pelayanan. Sumber data : OPD pelayanan publik lingkup Pemda Prov. Sulteng	BPMPD PTSP, Dinas Kesehat-an, Badan Pendapatan , Biro Organisasi
2.	Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.	Opini BPK	Formulasi penghitungan : Target yang akan dicapai dari hasil laporan keuangan Pemerintah Daerah Sumber data : Hasil pemeriksaan BPK	BPKAD, Inspektora t Daerah
		Nilai akuntabilitas kinerja	Formulasi penghitungan : Target yang akan dicapai dari hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Sumber data : Hasil Evaluasi SAKIP Kemenpan	BAPPEDA, Inspektorat Daerah, Biro Organisasi
		Indeks Reformasi Birokrasi	Formulasi penghitungan : Target yang akan dicapai dari penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektora t Daerah, BKD, Biro

			berdasarkan PMPRB. Sumber data : Hasil Evaluasi RB Kemenpan	Organisasi
3.	Tersedianya berbagai infrastruktur yang merata dan memadai	Persentase kemandirian jaringan jalan	Formulasi penghitungan : $\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan}} \times 100\%$	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
		Persentase rumah tangga pengguna listrik.	Formulasi penghitungan : $\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna listrik}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$	Dinas ESDM
		Persentase rumah tangga pengguna air bersih	Formulasi penghitungan : $\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air
		Persentase rumah layak huni	Formulasi penghitungan : $\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah rumah}} \times 100\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Kontributor sector pertambangan terhadap PDRB	Formulasi penghitungan : $\frac{\text{PDRB sektor pertambangan dan galian}}{\text{PDRB Tetap}} \times 100\%$	Dinas ESDM
4.	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Formulasi penghitungan : $\frac{\text{Penduduk miskin tahun ini}}{\text{Penduduk miskin tahun sebelumnya}} \times 100\%$ Sumber data : BPS Provinsi Sulawesi Tengah	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan
5.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi	Indeks Gini	Formulasi penghitungan : Target Indeks Gini setiap tahun Sumber data : BPS Provinsi Sulawesi Tengah	
6.	Terwujudnya koperasi yang tangguh,	Persentase koperasi aktif	Formulasi penghitungan : $\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah koperasi}} \times 100\%$	Dinas Koperasi dan UMKM

	berdaya saing, profesional dan mandiri		Jumlah total koperasi		
7.	Meningkatnya daya saing, efisiensi dan produktivitas perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Formulasi penghitungan : $\frac{\text{PDRB sektor perdagangan}}{\text{PDRB total}} \times 100\%$		
		Ekspor bersih perdagangan	Formulasi penghitungan : Jumlah ekspor total – jumlah impor total		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8.	Terwujudnya industri yang tangguh, profesional dan mandiri	Pertumbuhan industri	Formulasi penghitungan : Jumlah Pembinaan & Fasilitas Industri		
9.	Meningkatnya nilai dan realisasi investasi	Nilai Realisasi Investasi : PMDN PMA	Formulasi penghitungan : Target nilai investasi yang dicapai di forecast naik 20% untuk PMA dan 10% untuk PMDN dari tahun sebelumnya. Sumber data : BPMPD PTSP		BPMPD PTSP
10.	Meningkatnya kesejahteraan gender dalam pembangunan ekonomi	Peningkatan indeks pembangunan gender (IPG)	Formulasi penghitungan : $\frac{\text{Indeks pembangunan gender tahun ini}}{\text{Indeks pembangunan gender tahun sebelumnya}} \times 100\%$		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Peningkatan indeks pemberdayaan gender (GEM)	Formulasi penghitungan : $\frac{\text{Indeks pemberdayaan gender tahun ini}}{\text{Indeks pemberdayaan gender tahun sebelumnya}} \times 100\%$		
11.	Meningkatnya jumlah wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Formulasi penghitungan : Berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara setiap tahunnya Sumber data : Dinas Pariwisata		Dinas Pariwisata
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Formulasi penghitungan : Berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara setiap tahunnya Sumber data : Dinas Pariwisata		

12.	Terciptanya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Formulasi penghitungan : $\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$ Sumber data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Formulasi penghitungan : $\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13.	Terbukanya keterisolasian daerah-daerah terpencil	Persentase kabupaten/kota tidak tertinggal	Formulasi penghitungan : $\frac{\text{Jumlah kabupaten/kota tidak tertinggal}}{\text{Jumlah kabupaten/kota}} \times 100\%$	
14.	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan ditingkat tapak	Kontribusi PDRB sub sektor kehutanan	Formulasi penghitungan : $\frac{\text{PDRB sub sektor kehutanan}}{\text{PDRB total}} \times 100\%$ Sumber data : Dinas Kehutanan	Dinas Kehutanan
15.	Optimalnya tata kelola hutan untuk pengendalian kerusakan DAS dan hutan lindung	Persentase kerusakan kawasan hutan	Formulasi penghitungan : $\frac{\text{Luas kerusakan kawasan hutan}}{\text{Luas kawasan hutan}} \times 100\%$	
16.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Formulasi penghitungan : Target indeks kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
17.	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai tukar petani	Formulasi penghitungan : $\frac{\text{Indeks yang diterima petani}}{\text{Indeks yang diterima petani}} \times 100\%$ Sumber data : BPS Provinsi Sulawesi Tengah	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
18.	Meningkatnya	Kontribusi	Formulasi penghitungan :	Dinas Tanaman

	produksi dan mutu tanaman hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan	sektor pertanian terhadap PDRB	<table> <tr> <td>PDRB sektor pertanian</td> <td rowspan="2">X 100%</td> </tr> <tr> <td>PDRB total</td> </tr> </table> Sumber data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	PDRB sektor pertanian	X 100%	PDRB total	Pangan dan Holtikultura
PDRB sektor pertanian	X 100%						
PDRB total							
		Jumlah PDRB sub sektor perkebunan	Formulasi penghitungan : Berdasarkan jumlah PDRB dari sub sektor perkebunan	Dinas Perkebunan dan Peternakan			
19.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan dan perikanan budidaya	Nilai tukar nelayan <table> <tr> <td>Indeks yang diterima nelayan</td> <td rowspan="2">X 100%</td> </tr> <tr> <td>Indeks yang dibayar nelayan</td> </tr> </table>	Indeks yang diterima nelayan	X 100%	Indeks yang dibayar nelayan	Formulasi penghitungan : Berdasarkan nilai ekspor hasil perikanan pada tahun N Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Indeks yang diterima nelayan	X 100%						
Indeks yang dibayar nelayan							
	Nilai ekspor hasil perikanan (USD)						
20.	Tuntasnya angka melek aksara	Persentase angka melek aksara	Formulasi penghitungan : <table> <tr> <td>Jumlah penduduk usia > 10 thn yang bisa baca tulis</td> <td rowspan="2">X 100%</td> </tr> <tr> <td>Jumlah penduduk usia > 10 thn</td> </tr> </table> Sumber data : BPS	Jumlah penduduk usia > 10 thn yang bisa baca tulis	X 100%	Jumlah penduduk usia > 10 thn	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah penduduk usia > 10 thn yang bisa baca tulis	X 100%						
Jumlah penduduk usia > 10 thn							
21.	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan untuk menuntaskan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan menengah	- Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B SMA/MA/SMK/Paket C - Angka partisipasi murni SD/MI/Paket A	Formulasi penghitungan : <table> <tr> <td>Jumlah siswa usia sekolah (SD,SMP,SMA)</td> <td rowspan="2">X 100%</td> </tr> <tr> <td>Jumlah penduduk usia sekolah</td> </tr> </table>	Jumlah siswa usia sekolah (SD,SMP,SMA)	X 100%	Jumlah penduduk usia sekolah	
Jumlah siswa usia sekolah (SD,SMP,SMA)	X 100%						
Jumlah penduduk usia sekolah							

		SMP/MTs/Paket B SMA/MA/SMK/Paket C					
22.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Angka usia harapan hidup	Formulasi penghitungan : Dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (age spesifik death rate) atau dihitung berdasarkan program Mortpak life Sumber data : BPS				
23.	Suksesnya Keluarga Berencana dan terciptanya keluarga berkualitas	Cakupan peserta KB aktif	<table><tr><td>Jumlah peserta program KB aktif</td><td rowspan="2">X 100%</td></tr><tr><td>Jumlah pasangan usia subur</td></tr></table>	Jumlah peserta program KB aktif	X 100%	Jumlah pasangan usia subur	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Jumlah peserta program KB aktif	X 100%						
Jumlah pasangan usia subur							
		Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	<table><tr><td>Jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I</td><td rowspan="2">X 100%</td></tr><tr><td>Jumlah keluarga</td></tr></table>	Jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I	X 100%	Jumlah keluarga	
Jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I	X 100%						
Jumlah keluarga							

2.1.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berupa pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 menetapkan 23 sasaran strategis dan 42 indikator kinerja utama yang ditargetkan mampu mempercepat terwujudnya Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun sasaran utama dan Indikator Kinerja yang diharapkan terwujudnya pada tahun 2020 dapat dilihat pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	T A R G E T
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan efisien.	- Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	62,51-81,25%
2	Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.	- Opini BPK - Nilai akuntabilitas kinerja - Indeks Reformasi Birokrasi	WTP B 67
3	Tersedianya berbagai infrastruktur yang merata dan memadai.	- Persentase kemantapan jaringan jalan - Persentase rumah tangga pengguna listrik - Persentase rumah tangga pengguna air bersih - Persentase rumah layak huni - Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	61% 89,79% 71,73% 73,45% 14,75%
4	Menurunnya angka kemiskinan.	- Persentase penduduk diatas garis kemiskinan.	86,71-87,11%
5	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi.	- Indeks gini	0,31-0,35
6	Terwujudnya koperasi yang tangguh, berdaya saing, professional dan mandiri.	- Persentase koperasi aktif	65,72%
7	Meningkatnya daya saing, efisiensi dan produktifitas perdagangan.	- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB - Ekspor bersih perdagangan	10,99% 1.100 Juta USD
8	Terwujudnya industri yang tangguh, professional dan mandiri	- Pertumbuhan industri	7,60-7,80%

9	Meningkatnya nilai dan realisasi investasi.	- Nilai realisasi investasi	
		PMDN	Rp. 5.000.000.000.000
		PMA	Rp. 15.400.000.000.000
10	Meningkatnya kesejahteraan gender dalam pembangunan ekonomi.	- Peningkatan indeks pembangunan Gender (IPG)	68,5-69,0%
		- Peningkatan indeks pemberdayaan Gender (GEM)	71,29-71,45%
11	Meningkatnya jumlah wisatawan	- Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara	20.000 orang
		- Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	3.800.000 orang
12	Terciptanya kesempatan kerjadan penempatan tenaga kerja.	- Tingkat pengangguran terbuka	3,5-3,25%
		- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.	76,75%
13	Terbukanya keterisolasiandaerah-daerah terpencil.	- Persentase kabupaten/kota tidak tertinggal.	53,85%
14	Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan dan lahan ditingkat tapak.	- Kontribusi PDRB sub sektorkehutanan	8-9%
15	Optimalnya tata kelola hutan untuk pengendalian kerusakanDAS dan hutan lindung.	- Persentase kerusakan kawasan hutan	0,15%
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	- Indeks kualitas lingkungan hidup.	70,5 Poin
17	Meningkatnya kesejahteraan petani.	- Nilai tukar petani.	104,73
18	Meningkatnya produksi dan mutu tanaman hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan.	- Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	28,40%

19	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat nelayan dan perikanan budidaya.	- Jumlah PDRB sub sektor perkebunan - Nilai tukar nelayan - Nilai ekspor hasil perikanan (USD)	Rp. 12.722.383 108,22 US\$ 3.520.000
20	Tuntasnya angka melek aksara.	- Persentase angka melek aksara	98,50-99,35%
21	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan untuk menuntaskan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan menengah.	- Angka Partisipasi Kasar (APK) : SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B SMA/MA/SMK/Paket C - Angka Partisipasi Murni (APM) : SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B SMA/MA/SMK/Paket C	103,25-104,00% 92,50-93,25% 84,50-85,25% 93,75-94,50% 74,00-74,75% 65,50-66,50%
22	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan.	- Angka usia harapan hidup.	68 Tahun
23	Suksesnya Keluarga Berencana dan terciptanya keluarga berkualitas.	- Cakupan peserta KB aktif - Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I.	68% 45,05%

2.1.6 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Mengacu kepada sasaran pembangunan nasional yang akan dicapai pada Tahun 2020 serta perwujudan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA), maka strategi dan arah

kebijakan yang akan ditempuh di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

a. Strategi Dan Arah Kebijakan Pariwisata dan Industri (Kawasan Industri dan KEK)

Secara nasional sasaran pembangunan industri ditargetkan lebih tinggi dari pertumbuhan PDB industri pengolahan tahun 2019 sebesar 8,6 persen dengan share 21,6 persen. Untuk mencapai sasaran tersebut, jumlah industri berskala menengah dan besar perlu meningkat sekitar 9.000 unit usaha selama 5 tahun ke depan.

Sasaran pembangunan pariwisata adalah dalam meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara tahun 2019 sebanyak 20 juta orang dan wisatawan nusantara 275 juta orang dengan menyerap devisa 20 milyar USD. Guna mewujudkan sasaran nasional tersebut maka pembangunan Industri dan Pariwisata di Sulawesi Tengah akan dilaksanakan dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Strategi Dan Arah Kebijakan Perindustrian dan Pariwisata

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
PERINDUSTRIAN	
1. Penguatan daya saing, efisiensi, produktifitas dan kelembagaan koperasi dan UKM	1. Memberdayakan dunia usaha koperasi dan UMKM, melalui aspek permodalan, manajemen dan teknologi yang mampu mendorong pembangunan aktifitas secara berkelanjutan.
2. Mendorong kesadaran berkoperasi di tengah-tengah masyarakat.	2. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai soko guru perekonomian dengan peningkatan citra kelembagaan.
3. Penguatan kelembagaan dan usaha sektor perdagangan.	

4. Penguatan kelembagaan dan daya saing Industri berbasis potensi dan kemandirian local. 5. Memperkuat struktur ekonomi dengan peningkatan kontribusi sector industri dan perdagangan dalam pembentukan PDRB. 6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM Aparatur. 7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM Pelaku Usaha disektor Koperasi, UMKM, Industridan Perdagangan. 8. Membangun kompetensi inovasi dan teknologi sehingga dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi. 9. Meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha secara lebih terstruktur dan terlembaga. 10. Penguatan dan peningkatan daya saing sektor koperasi 11. Membangun kompetensi inovasi dan teknologi UMKM sehingga dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi.	3. Perluasan akses perdagangan komoditi daerah yang didukung dengan peningkatan mutu produk menghadapi pasar yang semakin kompetitif. 4. Peningkatan stabilitas perdagangan lokal yang menjamin keseimbangan stok kebutuhan masyarakat didukung strategi distribusi yang merata. 5. Pemberdayaan Industri melalui aspek permodalan, manajemen dan teknologi yang mampu mendorong perkembangan aktifitas secara berkelanjutan. 6. Perluasan akses industri yang didukung dengan peningkatan mutu produk serta mendorong peranan asosiasi dunia usaha dalam penetapan strategi peningkatan komoditi inti industri dan pengembangan usaha berdasarkan sistem persaingan usaha yang sehat. 7. Penguatan struktur ekonomi dengan peningkatan kontribusi sektor industri dan perdagangan dalam pembentukan PDRB. 8. Peningkatan kemampuan dan kualitas SDM Aparatur. 9. Peningkatan kemampuan dan kualitas SDM Pelaku Usaha di sektor Koperasi,UMKM,Perindustrian dan Perdagangan. 10. Peningkatan iklim usaha
---	--

12. Meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha UMKM secara lebih terstruktur dan terlembaga. 13. Penguatan dan peningkatan daya saing UMKM. 14. Penguatan Usaha sektor industri 15. Peningkatan daya saing Industri. 16. Pembangunan Industri berbasis potensi dan kemandirian lokal (Industri unggulan dan kompetensi inti daerah) 17. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan dan pengembangan ekspor, pengelolaan impor dengan baik, penciptaan iklim investasi dan perdagangan yang lebih kondusif dan peningkatan perlindungan konsumen serta pengamanan pasar. 18. Pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan harapan dapat menurunkan kesenjangan antar kelompok masyarakat dan antar daerah dilakukan melalui menjaga kelancaran distribusi bahan pokok dan meminimasi harga antar daerah kabupaten/kota, fasilitas	yang kondusif bagi koperasi. 11. Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif. 12. Pengembangan produk dan pemasaran koperasi. 13. Peningkatan daya saing SDM Koperasi. 14. Penguatan kelembagaan koperasi 15. Penguatan kelembagaan Balai Latihan Kumperindag (UPT-Diklat). 16. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM. 17. Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif. 18. Pengembangan produk dan pemasaran UMKM. 19. Peningkatan daya saing SDM UMKM. 20. Peningkatan investasi UMKM. 21. Merevitalisasi sektor industri dan peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian daerah. 22. Membangun struktur industri sesuai kompetensi daerah. 23. Meningkatkan kemampuan dan mengembangkan industri kecil dan menengah. 24. Mendorong pembangunan industri baru. 25. Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan lain yang terkait di sektor ekonomi dalam pembangunan daerah.
---	--

UMKM, antara lain melalui revitalisasi pasar tradisional, pendidikan dan pelatihan ekspor UMKM, perbaikan kemasan produk dan promosi. 19. Menata dan peningkatan peran kelembagaan perdagangan melalui kemitraan usaha, distributor, keagenan dan lembaga perlindungan konsumen agar masyarakat dapat terlibat secara luas dalam aktifitas perekonomian. 20. Peningkatan peran kemetrollogian dan pengujian sertifikasi mutu barang yang berkualitas.	26. Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui sektor perdagangan. 27. Menata kelembagaan perdagangan yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. 28. Memperluas akses perdagangan komoditi daerah yang didukung dengan peningkatan mutu produk menghadapi pasar yang semakin kompetitif dan mengefektifkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. 29. Meningkatkan stabilitas perdagangan lokal yang menjaga keseimbangan stok kebutuhan masyarakat. 30. distribusi yang merata sehingga menjamin stabilitas harga.
PARIWISATA 1. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah dan terus melakukan upaya pelestarian, pembinaan dan pengembangannya untuk kepentingan pariwisata. 2. Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif 3. Pelayanan prima dan standarisasi mitra usaha jasa pariwisata. 4. Meningkatkan kualitas produk industri kreatif dan pariwisata daerah serta promosi di dalam	1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal. 2. Menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) beserta Naskah Akademis dan Peraturan Daerah (PERDA) tentang RIPPDA yang ditindaklanjuti dengan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata andalan. 3. Pembinaan masyarakat di

dan di luar negeri. 5. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif guna perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan usaha industri pariwisata dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. 6. Meningkatkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi guna mendukung keberhasilan promosi dan pemasaran pariwisata.	sekitar objek wisata dan terus meningkatkan upaya pengelolaan objek wisata dan situs kepurbakalaan agar lebih menarik dan mempunyai daya saing yang tinggi. 4. Menyelenggarakan/mendukung pelaksanaan Festival dan Event pariwisata secara regular berdasarkan kalender kegiatan di tingkat kabupaten/kota maupun yang berskala provinsi. 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi industri kreatif dan pariwisata di dalam dan di luar negeri. 6. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan lembaga adat dan masyarakat untuk mendukung gerakan sadar wisata dan program sapta pesona. 7. Meningkatkan kualitas produk industri kreatif dan pariwisata termasuk kualitas pelayanan agar mampu bersaing di pasar global.
--	--

b. Strategi Dan Arah Kebijakan Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal

Pembangunan daerah tertinggal sebagai pendekatan pembangunan lintas batas sektor ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju pada kabupaten. Sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa, maka pembangunan Daerah tertinggal dan desa di Sulawesi Tengah akan dilaksanakan dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah Tertinggal dan Desa

Strategi	Arah Kebijakan
Daerah Tertinggal 1. Pengembangan ekonomi lokal daerah tertinggal 2. Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal 3. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal 4. Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal 5. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal serta peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan	1. Peningkatan Kapasitas kegiatan Ekonomi melalui peningkatan arus investasi. 2. Peningkatan ketersediaan infrastruktur: (Jalan, Jembatan, Energi dan Air). 3. Peningkatan kualitas manusia dan Peningkatan Birokrasi yang efisien. 4. Peningkatan kapasitas produksi melalui pengembangan komoditas primer yang mampu menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya. 5. Penciptaan nilai tambah. 6. Pengembangan Infrastruktur desa. 7. Peningkatan kualitas manusia 8. Peningkatan Pemberdayaan masyarakat. 9. Mendorong Perbaikan Kesejahteraan Tenaga Kerja. 10. Mendorong Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar.
Pembangunan Desa 1. Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan melalui Pembinaan Pengembangan Kapasitas, Pelatihan dan Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik. 2. Mengoptimalkan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam menggerakkan Partisipasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dalam proses Pembangunan melalui	1. Memfasilitasi dan melakukan pembinaan Penyelenggaraan Adm. Pemerintahan Desa/ Kelurahan dalam rangka optimalisasi pelayanan publik. 2. Meningkatkan pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dalam menggerakkan Partisipasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dalam Pembangunan.

pembinaan, pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)/ pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). 3. Mewujudkan kehidupan Sosial Budaya Masyarakat dan Pelestarian Adat istiadat melalui penguatan Pokja Profil desa/Kel, Pokjanal Posyandu, Fungsi Posyandu melalui SIP, Pelaksanaan Lomba Desa/Kel, Harganas, HKG PKK, KB Kes, PMT- AS, Perlindungan Pekerja Anak, Penguatan Kelembagaan HIVAIDS, Penguatan Lembaga Adat. 4. Mengoptimalkan Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian pelaksanaan PNPM serta mengoptimalkan Lembaga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah dalam rangka Percepatan Penanggulangan kemiskinan. 5. Mengembangkan kelompok usaha ekonomi produktif melalui perluasan LSP-BM, UED-SP, Penguatan institusi Pasar/Pasar Desa, Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD), CPPD dan Bumdes. 6. Mengoptimalkan pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan mendayagunakan TTG berbasis kearifan lokal melalui DME, Pamsimas, Hutan Mangrove, Hutan Desa, Kawasan Konservasi dan Pesisir Pelaksanaan Gelar TTG, Gelar Karya Masyarakat, Pengembangan Posyantek, PLTMH, PLTS,	3. Memantapkan kehidupan Sosial Budaya Masyarakat sesuai tradisi dan Adat istiadat dalam mewujudkan keharmonisan dan ketertiban masyarakat. 4. Mendorong kemandirian masyarakat perdesaan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai wujud Penanggulangan kemiskinan. 5. Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan keluarga, ketahanan pangan Masyarakat, memantapkan manajemen Lembaga Keuangan Mikro (LKM) perdesaan dan usaha- usaha desa serta Pengembangan institusi pasar /pasar desa. 6. Mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi masyarakat dalam Pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan. 7. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang didukung sarana fasilitas Kerja yang memadai.
--	--

LMP. 7. Mengutamakan peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan Tupoksi dan Pemberdayaan Masyarakat melalui pemenuhan Sarana kerja yang memadai serta Pendidikan dan Pelatihan.	
---	--

C. Strategi Dan Arah Kebijakan Kemaritiman

Pembangunan kelautan dan perikanan kedepan dilaksanakan dengan mengedepankan peran ekonomi kelautan dan sinergitas pembangunan kelautan nasional dengan strategi dan arah kebijakan di Sulawesi Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Strategi Dan Arah Kebijakan Maritim dan Kelautan

Strategi	Arah Kebijakan
Terdapat 5 (lima) komoditas Kelautan dan Perikanan yang akan dikembangkan di Sulawesi Tengah yakni rumput laut, tuna/ cakalang, udang, ikan demersal dan sidat. 1) Strategi Pengembangan Rumput Laut 1. Pengembangan cluster industri rumput laut yang dilakukan hulu-hilir berbasis masyarakat dan peran serta dunia usaha. 2. Peningkatan konstruksi budidaya, kultur jaringan dan spora dan pasca panen. 3. Pengembangan kebun	1. Penurunan angka kemiskinan Pendekatan: pemberdayaan sosial ekonomi pelaku usaha kelautan dan perikanan. 2. Penurunan tingkat pengangguran Pendekatan: optimalisasi penciptaan lapangan kerja di bidang kelautan dan perikanan, dukungan pengembangan modal dan kepastian berusaha. 3. Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Pendekatan: industrialisasi perikanan rakyat yang ditunjang oleh inovasi teknologi dan pengembangan infrastruktur dasar. 4. Peningkatan pengawasan

bibit, pabrik karagenan (pergudangan) serta perbaikan/pencetakan tambak dan saluran irigasi. 4. Pengembangan industri rumput laut berbasis hulu – hilir berbasis Cluster, mendorong investasi, meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha. 5. Pengembangan Cluster dilakukan melalui budidaya; industri pengolahan, termasuk pabrikasi Semi-Refined Carrageenan (SRC) serta industri pendukung lain dalam satu kawasan. 6. Pengembangan pada 3 (tiga) cluster: (1) Cluster Teluk Tomini; (2) Cluster Teluk Tolo, dan (3) Cluster Selat Makassar-Laut Sulawesi. 7. Fasilitasi Kementerian Perindustrian RI untuk pengembangan Pabrik Semi Refined dan Refined Carrageenan. 8. Rencana pengembangan industri hilir dan pendukung budidaya (industri tali, pelampung, Refined Carrageenan, dsb) pada Kawasan Ekonomi dan Kawasan	pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan Pendekatan: pemulihan dan pelestarian lingkungan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pendekatan: peningkatan kualitas pelatihan, pendidikan dan pelayanan masyarakat kelautan dan perikanan sesuai ukuran standar nasional. 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring kerja a. Peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan pelayanan publik, pengelolaan keuangan negara, penataan organisasi, dan penciptaan regulasi yang kondusif; b. Pengembangan jejaring kerja, kerjasama antara pusat - daerah, antar SKPD serta membangun kerjasama antar daerah dan internasional. 2) Mengembangkan sentra-sentra agribisnis kelautan dan perikanan berbasis Kawasan Minapolitan a. Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk kelautan dan perikanan. b. Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasaran
--	---

Industri Palu (KEKI). 2) Strategi Pengembangan Tuna – Cakalang 1. Peningkatan SDM pelaku usaha untuk penguasaan IPTEK. 2. Penataan Sarana Prasarana TPI/PPI. 3. Pengembangan karamba tuna beserta hatchery pendukungnya. 4. Pengembangan Outer Ring Fishing Port di Sekitar Laut Sulawesi. 5. Penciptaan kawasan minapolitan dan industri perikanan tangkap terpadu pada PPI Donggala; PPI Pagimana dan Calon P3Ogotua. 6. Pemberdayaan nelayan skala 3 – 10 GT untuk Tuna/Cakalang; 7. Restrukturisasi armada > 30GT. 8. Pengembangan Teknologi Penangkapan berbasis IPTEK. 9. Pengembangan Industri Pengelohan (<i>Processing and Canning</i>). 10. Pengembangan Industri Penunjang (Kapal Fiberglass; dan Alat Tangkap Ikan). 3) Strategi Pengembangan Udang 1. Peningkatan SDM pelaku usaha untuk penguasaan IPTEK	ikan. c. Minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentra-sentra produksi perikanan sebagai penggerak ekonomi rakyat. 3) Meningkatkan kewirausahaan (<i>entrepreneurship</i>) dan skala usaha pelaku usaha kelautan dan perikanan a. Upaya membangun kepercayaan (<i>trust building</i>) para pelaku usaha; agar dapat memanfaatkan fasilitas kredit dan pembinaan. b. Peningkatan skala usaha di sektor kelautan dan perikanan. c. Pembekalan dan motivasi dilanjutkan dengan pelatihan/magang teknis. 4) Meningkatkan penggunaan inovasi teknologi ramah lingkungan dalam upaya peningkatan ketahanan dan keamanan pangan a. Penguasaan teknologi perikanan kunci peningkatan ketahanan dan keamanan pangan. b. Inovasi teknologi, akuakultur, penangkapan, pengolahan dan pasca panen, konservasi, pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut serta adaptasi perubahan iklim. c. Kaji terap teknologi inovasi, transferpada pelaku usaha melalui pendampingan dan penyuluhan.
---	--

2. Pengembangan coldstorage, hatchery dan pabrik pakan. 3. Pengembangan Tambak Rakyat, melalui: - Komoditas Udang Windu (P. Monodon) - Integrasi Polikultur dengan bandeng dangracilaria - Penguatan BBU dan produksi benih unggul - Pengembangan kawasan budidaya, termasuk revitalisasi konstruksi dan saluran tambak - Stimulan permodalan kerja - Pendampingan teknis budidaya - Monev Kesling 4. Pengembangan Tambak Intensif, melalui: - Komoditas Udang Vaname (L. vannamei) - Penggunaan teknologi yang efisien ramah lingkungan - Tax holiday bagi pengembangan investasi. 4) Strategi Pengembangan Ikan Demersal Produksi Ikan Demersal didominasi oleh Red Snapper, Baramundi, Grouper, Giant Seaperch, Yellowtail Fusilier, Black and Silver Pomfret dan Goat-	5) Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan a. Upaya memberikan fasilitas, dorongan atau bantuan teknis dan manajerial. b. Penguatan lembaga keuangan mikro, penggalangan partisipasi masyarakat, dan kegiatan usaha ekonomi produktif yang berbasis sumber daya lokal. c. Pemberdayaan untuk peningkatan kemandirian dan kemampuan masyarakat. 6) Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan a. Peningkatan interaksi antar anggota dan menguatkan posisi tawar. b. Kemudahan pembinaan, penyampaian informasi, dan diseminasi teknologi. c. Penguatan kelompok menjadi modal bagi ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
---	---

Fish. Pasar Ikan Demersal, terutama Kerapu Hidup adalah Jepang, Singapura, Hongkong, Cina dan Taiwan sedangkan bentuk frozen dikirim ke Eropa dan Amerika. Pabrik-pabrik Pengolahan (<i>Processing Plant</i>) berorientasi ekspor umumnya berada di daerah Kabupaten Banggai. Terkait dengan itu, maka pengembangan ikan demersal akan diintegrasikan dengan <i>sea ranching</i> berbasis <i>fish home</i>. <i>Sea Ranching</i> merupakan kegiatan terintegrasi antara bidang perikanan tangkap, budidaya, kelautan dan pengawasan. Implementasinya adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan SDM pelaku usaha untuk penguasaan IPTEK 2. Restocking ikan ekonomis penting non ruaya pada kawasan rumah ikan (<i>Fish Homes</i>); 3. Rumah Ikan adalah terumbu karang buatan (<i>Artificial Reef</i>), sebagai: (a) alat pengumpul; (b) tempat reproduksi ikan, serta (c) rehabilitasi ekosistem laut; 4. Tujuannya adalah untuk (a) konservasi, (b) produksi; dan (c) secara	
---	--

tidak langsung menjaga ketersediaan <i>food chain</i> bagi Tuna dan pelagis besar; 5. Poin Strategisnya adalah (a) penyiapan ekosistem berupa pembangunan rumah ikan (<i>Fish Homes</i>); (b) penyiapan kelembagaan masyarakat; (c) <i>restocking</i> ikan spesies ekonomis penting non ruaya; dan (d) penyiapan aturan main pengelolaan kawasan; 6. Peningkatan peran swasta khususnya eksportir ikan demersal dalam tata kelola <i>fish home</i>. 5) Strategi Pengembangan Sidat Sulawesi Tengah disebut sebagai penghasil benih sidat terbesar nasional. Jenis sidat di Sulawesi Tengah didominasi oleh (1) <i>Anguilla celebesensis</i>, (2) <i>Anguilla marmorata</i>, (3) <i>Anguilla bicolor pasifica</i> dan (4) <i>Anguilla bicolor</i>. Tujuan ekspor adalah ke Jepang dan China berkisar 18,09 Ton/tahun dengan perkiraan harga pasar USD 20-30/Kg. Kebutuhan Jepang dan China masing-masing berkisar 100.000 ton/tahun yang didominasi hasil tangkapan, sedangkan budidaya pembesaran masih	
---	--

dikembangkan. Produksi Sidat Sulawesi Tengah Tahun 2010 sebesar 14,3 ton naik dibandingkan tahun 2009 yang hanya 2,2 ton. Implementasinya adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan SDM pelaku usaha untuk penguasaan IPTEK 2. Pengembangan sarana prasarana penangkap benih yang ramah lingkungan 3. Pengembangan sarana prasarana budidaya seperti karamba tambak 4. Pengembangan kawasan konservasi Sidat 5. Pengembangan teknologi pembesaran 6. Pengembangan teknologi pengolahan (unagi, kabayashi dsb).	
---	--

D. Strategi Dan Arah Kebijakan Kedaulatan Pangan

Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan nasional, maka pembangunan ketahanan pangan di Sulawesi Tengah akan dilaksanakan dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Strategi Dan Arah Kebijakan Kedaulatan Pangan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
a. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk komoditas hortikultura dengan Strategi: - Revitalisasi Lahan - Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan - Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana - Revitalisasi SDM - Revitalisasi Pembiayaan Pertanian - Revitalisasi Kelembagaan Petani - Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir b. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk komoditas tanaman pangan dengan strategi: - Revitalisasi Lahan - Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan - Revitalisasi Infrastruktur dan sarana - Revitalisasi SDM - Revitalisasi Pembiayaan Pertanian - Revitalisasi Kelembagaan Petani - Revitalisasi Teknologi dan industri hilir	- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input produksi. - Mencegah/mengurangi terjadinya alih fungsi lahan pertanian. - Perluasan areal. - Jaminan kepastian hukum atas lahan. - Menjamin ketersediaan, kualitas dan harga benih/bibit unggul yang terjangkau. - Mengembangkan infrastruktur prasarana dan sarana pertanian. - Peningkatan pengetahuan petani agar dapat meningkatkan kesejahterannya. - Mendorong peningkatan serapan fasilitas pembiayaan KUR, PUAP dll. - Meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan petani dan pelaku usaha. - Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna spesifik lokasi. - Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input produksi. - Mencegah/mengurangi terjadinya alih fungsi lahan pertanian. - Perluasan areal. - Jaminan kepastian hukum atas lahan - Menjamin ketersediaan, kualitas dan harga benih/bibit unggul yang terjangkau. - Mengembangkan infrastruktur, prasarana dan sarana pertanian. - Meningkatkan pengetahuan petani agar dapat meningkatkan kesejahterannya.

c. Meningkatkan ketersediaan pangan komoditas tanaman dan hortikultura yang rendah residu sesuai SNI organik dengan strategi: - Revitalisasi Lahan - Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan - Revitalisasi Infrastruktur dan sarana - Revitalisasi SDM - Revitalisasi Pembiayaan Pertanian - Revitalisasi Kelembagaan petani - Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir d. Meningkatkan mutu dan jumlah produk olahan melalui penerapan GAP, SOP, GHP dan GMP dengan Strategi : - Revitalisasi SDM - Revitalisasi Kelembagaan Petani - Revitalisasi Teknologi dan industri hilir	- Mendorong peningkatan serapan fasilitas pembiayaan KUR, PUAP dll. - Meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan petani dan pelaku usaha. - Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna spesifik lokasi. - Registrasi Kebun. - Menyediakan Bibit Organik. - Mengembangkan infrastruktur, prasarana dan sarana pertanian. - Meningkatkan pengetahuan petani agar dapat meningkatkan kesejahterannya . - Mendorong peningkatan serapan fasilitas pembiayaan KUR, PUAP dll - Meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan petani dan pelaku usaha - Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna spesifik lokasi - Peningkatan pelayanan pasca panen dan pengolahan dalam rangka meningkatkan mutu dan standar produk tanaman. - Pengembangan industri hilir beras/tepung, jagung, kedelai, <i>packing house</i>, buah-buahan dan sayuran. - Sosialisasi penerapan SNI wajib, RSPO, penerapan sistem jaminan mutu (GHP, GMP, GDP) dan sertifikasi komoditas strategis. - Pengembangan sistem informasi pasar, kemitraan dan intensifikasi promosi.
---	---

e. Meningkatkan SDM aparat dan petani dengan Strategi: - Revitalisasi SDM - Revitalisasi Kelembagaan Petani f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan kelembagaan pertanian dengan Strategi: - Revitalisasi SDM - Revitalisasi Kelembagaan Petani	- Peningkatan SDM petani, pelaku usaha dan aparat pertanian agar sejajar dengan Propinsi maju di Kawasan Timur Indonesia (KTI). - Meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dan pelaku usaha. - Meningkatkan kualitas manajemen dan teknis pembangunan pertanian - Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
PETERNAKAN - Peningkatan populasi dan produktivitas peternakan. - Peningkatan pelayanan kesehatan hewan secara berkelanjutan. - Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner secara berkelanjutan. - Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan dan produk asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH). - Pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi hasil peternakan. - Peningkatan pemanfaatan modal dan pembiayaan serta kemitraan Usaha. - Pengembangan sistem penerapan jaminan mutu produk hasil olahan yang	- Meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak ruminansia. - Meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak non ruminansia. - Mengembangkan usaha penggemukan sapi lokal. - Meningkatkan populasi dan produktifitas plasma nutfah spesifik daerah. - Pengembangan pupuk organik dan biogas. - Meningkatkan kuantitas dan kualitas bibit ternak. - Meningkatkan Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (INKA). - Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan secara optimal dan berkelanjutan. - Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner secara optimal dan berkelanjutan. - Mengembangkan sistem

ASUH. 8. Pengembangan teknologi industri pengolahan produk hasil ternak. 9. Pengembangan padang penggembalaan dan kebun HMT sebagai kawasan potensi pakan ternak lokal. 10. Pengembangan integrasi tanaman pertanian/ perkebunan dengan ternak. 11. Peningkatan jumlah dan kualitas bibit ternak. 12. Peningkatan sarana/ prasarana produksi alat dan mesin peternakan. 13. Peningkatan Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (INKA). 14. Peningkatan usaha penggemukan sapi lokal; 15. Penyediaan data dan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan serta pemetaan yang akurat; 16. Peningkatan kelembagaan peternakan sumber daya manusia peternakan dan kesehatan hewan; 17. Pengembangan teknologi pemanfaatan limbah berwawasan lingkungan; 18. Peningkatan dan pelestarian plasma nutfah ternak spesifik daerah.	pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan dan produk asal hewan yang ASUH. 11. Meningkatkan pengawasan penyebaran/lalu lintas ternak dan produk olahannya. 12. Meningkatkan promosi/ pemasaran produk dan pengolahan hasil peternakan yang berdaya saing. 13. Meningkatkan pemanfaatan modal dan pembiayaan serta kemitraan usaha. 14. Mengembangkan sistem penerapan jaminan mutu produk hasil olahan yang ASUH. 15. Meningkatkan pengawasan izin usaha dan mutu produk hasil ternak dan olahannya. 16. Mengembangkan teknologi industri rumah tangga/ kelompok pengolahan hasil ternak. 17. Meningkatkan kelembagaan Peternakan dan Sumber daya Manusia Peternakandan Kesehatan Hewan. 18. Menyediakan data dan informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan serta pemetaan yang akurat. 19. Meningkatkan sarana dan prasarana produksi alat dan mesin peternakan. 20. Mengembangkan padang penggembalaan dan kebun HMT sebagai kawasan potensi pakan ternak. 21. Optimalisasi lahan terlantar untuk kawasan peternakan melalui integrasi tanaman pertanian/perkebunan dengan ternak.
---	--

PERKEBUNAN 1. Melaksanakan manajemen pembangunan yang bersih, transparan dan bebas KKN. 2. Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pembangunan perkebunan. 3. Memperluas dan memanfaatkan basis produksi secara berkelanjutan. 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memperdayakan sumberdaya manusia perkebunan. 5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perkebunan. 6. Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna. 7. Mempromosikan dan memproteksi komoditas perkebunan.	1. Meningkatkan keterbukaan dalam perumusan dan manajemen pembangunan perkebunan. 2. Peningkatan evaluasi, pengawasan, dan pengendalian manajemen pembangunan perkebunan. 3. Penyelarasan pembangunan perkebunan antar sektor dan wilayah. 4. Memperluas dan meningkatkan basis produksi perkebunan secara berkelanjutan. 5. Meningkatkan kinerja aparat perkebunan. 6. Meningkatkan kerjasama 7. Meningkatkan peran dunia usaha perkebunan 8. Meningkatkan kelembagaan ekonomi petani perkebunan.
--	---

E. Strategi Dan Arah Kebijakan Kesehatan

Sasaran nasional yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Sehat pada 2020 adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Guna mendukung sasaran Program Indonesia Sehat di Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.9
Strategi dan Arah Kebijakan Kesehatan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
----------	----------------

Menggerakkan pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan	1. Membangun sistem perencanaan yang <i>evidence based</i> (berbasis kondisi riil kesehatan) dengan prinsip transparan dan akuntabel. 2. Meningkatkan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi. 3. Meningkatkan kualitas dan mutu sarana pelayanan kesehatan.
Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	1. Meningkatkan promosi kesehatan dalam berperilaku hidup yang bersih dan sehat. 2. Menyiapkan dan mendorong tenaga kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang berkualitas guna mendukung pelayanan kesehatan. 3. Meningkatkan kemampuan (<i>capacity building</i>) kelembagaan dalam upaya memperluas jangkauan pelayanan kesehatan.
Mencegah meningkatnya risiko penyakit dan masalah kesehatan	1. Membangun Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di setiap kabupaten/kota. 2. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu. 3. Meningkatkan system surveilans di setiap wilayah kabupaten/kota.
Menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, berkeadilan, merata dan bermutu dengan perhatian khusus pada daerah perdesaan dan pesisir	1. Memanfaatkan tenaga kesehatan yang tersedia untuk meningkatkan dan menjalin kerjasama dengan sektor terkait. 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan

	kesehatan di sektor pelayanan. 3. Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia untuk meningkatkan cakupan dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta sebagai sarana pusat informasi kesehatan. 4. Memanfaatkan institusi pendidikan yang ada sebagai mitra untuk mendidik dan mencetak tenaga kesehatan yang berkualitas dan siap di dayagunakan.
Meningkatkan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, organisasi dalam konteks kemitraan	1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar program. 2. Memanfaatkan Peraturan Gubernur Sulteng Nomor 29 Tahun 2011 (RAD Percepatan Pencapaian Target MDGs) sebagai alat untuk menjalin kemitraan dan dukungan pembiayaan. 3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan. 4. Menyusun suatu regulasi/MOU dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah(Jamkesda).

F. Strategi dan Arah Kebijakan Pendidikan

Secara nasional sasaran yang ingin dicapai dalam Program donesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun. Untuk

menunjang sasaran tersebut serta memperhatikan permasalahan yang masih terdapat pada pengembangan bidang pendidikan maka Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan strategis serta arah kebijakan pembangunan pendidikan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.10
Strategi Dan Arah Kebijakan Pendidikan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Memperkuat tata kelola pelaksanaan sistem pendidikan. 2. Menyediakan dan meningkatkan sarana pendidikan yang merata dan berkualitas diseluruh kabupaten/ kota. 3. Menyediakan dan meningkatkan prasarana yang merata, berkualitas dan berdaya saing di seluruh kabupaten/kota. 4. Menyediakan dan meningkatkan subsidi pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan formal berkualitas yang merata di seluruh kabupaten/ kota. 5. Menjamin terselenggaranya sistem pembelajaran yang dapat membangun karakter peserta didik dan tenaga pendidik dalam segala jenis dan jenjang pendidikan di Provinsi Sulawesi	1. Peningkatan kapasitas, daya tampung dan modernisasi lembaga-lembaga satuan program pendidikan dan kebudayaan. 2. Peningkatan kapasitas dan modernisasi kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan serta sarana penunjang lainnya, pada setiap satuan program pendidikan dan kebudayaan. 3. Peningkatan kapasitas dan modernisasi proses-proses administrasi dan manajemen pembangunan pendidikan dan kebudayaan, baik pada tingkatan SKPD pengelola pembangunan pendidikan, maupun pada tingkatan satuan program pendidikan dan kebudayaan; a. Pendidikan Anak Usia Dini Kebijakan dalam pendidikan prasekolah/PAUD, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan daya tampung kelembagaan PAUD sampai ke tingkat RW di seluruh pedesaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1. Perluasan daya tampung kelembagaan PAUD non formal dan berbasis keagamaan (TKA, RA, Kober, dan Pos PAUD).

Tengah. 6. Meningkatkan sarana dan prasarana Dikdasmenjur serta sarana olahraga dan pembinaan klub olahraga usia dini pada SD,MI,SMP dan MTs. 7. Memberikan subsidi dan imbal swadaya agar mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan layanan pendidikan dasar yang dapat dijangkau oleh masyarakat. 8. Menyiapkan layanan pendidikan alternatif khususnya bagi masyarakat kurang beruntung (masyarakat miskin, terisolir, suku terasing, minoritas, daerah bencana dan konflik dan anak jalanan)seperti SD dan MI kecil/terpadu/kelas jauh dan SMP dan MTs Terbuka. 9. Melaksanakan restrukturisasi dan regrouping SD agar tercapai efisiensi dan efektifitas sekolah yang didukung fasilitas memadai. 10. Memberikan beasiswa	2. Peningkatan jumlah gedung/kelas, dan sarana perlengkapan bermain pada TK/TKA/RA, dan PKBM, SKB, dan Pesantren penyelenggara TPA/Kober/PosPAUD. 3. Peningkatan jumlah alat peraga edukatif (APE) proses pembelajaran PAUD. 4. Peningkatan jumlah guru/pengasuh/pembimbing pada kelembagaan PAUD. 5. Penyediaan fasilitas beasiswa bagi anak tidak mampu untuk mendapatkan PAUD; b. Pendidikan Dasar Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan daya tampung dalam rangka percepatan penuntasan wajar dikdas 9 tahun, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan jumlah dan daya tampung SD/MI, SMP/MTs, SDLB/SMPLB,SLB Autis,SD-SMP satu atap, SDLB-SMPLB satu atap, pusat pendidikan anak korban narkoba, atau MI-MTs satu atap dan SMP-MTs Terbuka sampai ke tingkat pedesaan; 2) Perluasan program pendidikan MDA/MDW,Paket A/B, bagi anak putus sekolah, pekerja anak dan anak jalanan usia wajib belajar; 3) Peningkatan jumlah UGB/RKB dan sarana perlengkapan pada sekolah-sekolah, PKBM/SKB dan Pesantren penyelenggara satuan pendidikan dasar; 4) Peningkatan jumlah peralatan laboratorium, workshop, perpustakaan dan sumber belajar/berlatih, serta
--	---

bakat dan prestasi serta bantuan lainnya kepada siswa. 11. Meningkatkan kemampuan profesional dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan lainnya. 12. Melaksanakan dan mengembangkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Muatan Lokal. 13. Meningkatkan penyediaan, penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan seperti buku bacaan, buku mata pelajaran pokok, alat pendidikan, laboratorium dan ruangan lainnya. 14. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar mengajar melalui penataan sekolah, penilaian proses dan hasil secara bertahap dan berkelanjutan. 15. Meningkatkan sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan akuntabilitas, monitoring serta evaluasi. 16. Memperbaiki manajemen pendidikan dasar dengan melaksanakan desentralisasi pendidikan, peningkatan peran komite	sarana peribadatan yang mendukung proses pembelajaran pendidikan dasar; 5) Peningkatan jumlah guru/ pelatih/ustadz/tutor/ pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan program pendidikan dasar; 6) Penyediaan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan yang berprestasi dalam penuntasan wajar dasar; 7) Penyediaan beasiswa bagi anak tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan dasar dan anak berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. c. Pendidikan Menengah Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan daya tampung kelembagaan satuan pendidikan menengah dalam melayani pendidikan bagi anak usia 16-18 tahun, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Perintisan dan mengembangkan jumlah sekolah-sekolah menengah kejuruan (SMK/MAK) modern, atau satuan program pendidikan menengah terpadu berbasis keunggulan; 2) Pembangunan UGB/RKB dan sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolah-sekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan menengah); 3) Peningkatan jumlah peralatan
--	--

sekolah, mengembangkan MPMBS dan partisipasi masyarakat serta memberdayakan personal dan lembaga melalui pelatihan. 17. Memperluas dan meningkatkan mutu layanan serta pemberdayaan Pusat Pendidikan Anak Dini Usia (PADU). 18. Melanjutkan pemberantasan buta aksara latin dan angka melalui Program keaksaraan Fungsional. 19. Meningkatkan pelaksanaan Program Kejar Paket A dan Paket B dalam rangka menunjang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. 20. Memperluas dan meningkatkan mutu ketrampilan melalui pendidikan berbasis masyarakat luas. 21. Memperluas dan meningkatkan mutu pendidikan perempuan. 22. Meningkatkan mutu tenaga kependidikan luar sekolah dan pemuda melalui pendidikan dan pelatihan jangka pendek dan jangka panjang tugas belajar.	laboratorium, workshop, perpustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran pendidikan menengah; 4) Peningkatan jumlah guru/pelatih/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan pendidikan menengah; 5) Pemerataan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan berprestasi dalam perintisan wajar pendidikan menengah; 6) Penyediaan fasilitas beasiswa bagi anak berprestasi dan anak tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah. d. Pendidikan Keaksaraan Kebijakan dalam pendidikan keaksaraan, diprioritaskan pada percepatan penuntasan program keaksaraan bagi kelompok masyarakat golongan dewasa, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan jumlah kelompok-kelompok sasaran program keaksaraan fungsional sampai ke pelosok pedesaan; 2) Peningkatan jumlah sarana peralatan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan pada satuan program pendidikan keaksaraan fungsional; 3) Peningkatan jumlah tutor/pelatih/fasilitator dan TLD pada program keaksaraan fungsional.
---	--

23. Memperluas pelayanan dan meningkatkan kemampuan kelembagaan Sanggar kegiatan belajar (SKB), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), Kursus dan Pelatihan serta satuan pendidikan Non Formal sejenis. 24. Meningkatkan mutu Paket A, B dan C non usia sekolah(ex- ujian persamaan, instansi pertanian, transmigrasi, kelautan, anak jalanan, rumah kumuh dan pengungsi).	
--	--

G. Strategi Dan Arah Kebijakan Kedaulatan Energi

Sasaran utama nasional terkait penguatan ketahanan energi yang ingin dicapai 2020 adalah: (i) menguatnya ketersediaan energi primer dari produksi minyak bumi yang didukung oleh produksi gas bumi dan batubara; (ii) meningkatnya pemanfaatan sumber energi primer untuk penggunaan di dalam negeri; (iii) terpenuhinya rasio elektrifikasi mencapai 96,6 persen. Guna mendukung sasaran utama nasional terkait penguatan ketahanan energi maka Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan strategis dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.11
Strategi Dan Arah Kebijakan Kedaulatan Energi

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana energi dan sumber daya mineral. 2. Memfasilitasi peningkatan pemanfaatan pengembangan energi dan sumber daya mineral. 3. Mendorong penyelidikan dan pemetaan geologi, energi dan sumber daya mineral untuk meningkatkan data cadangan potensi serta melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data potensi geologi, energi dan sumber daya mineral. 4. Meningkatkan program efisiensi dan konservasi energi dan sumber daya mineral. 5. Meningkatkan pelayanan informasi geologi, energi dan sumber daya mineral baik untuk keperluan eksplorasi, penataan ruang, mitigasi bencana alam geologi dan konservasi. 6. Mencegah kerusakan lingkungan dengan melakukan <i>Good Mining Practices</i>. 7. Meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya aparatur sektor energi dan sumber daya mineral.	1. Memastikan kecukupan ketersediaan tenaga listrik untuk jangka menengah serta mendorong pemanfaatan energy baru terbarukan. 2. Memberi bantuan pembangunan PLTMH pada daerah yang mempunyai potensi tenaga air dan bantuan PLTS kepada masyarakat kurang mampu pada daerah yang belum di aliri listrik jaringan PLN. 3. Meningkatkan Kegiatan Survei Geologi, energi dan sumber daya mineral untuk mendapatkan data cadangan potensi yang akurat. 4. Meningkatkan budaya hemat energi bagi masyarakat, instansi pemerintah, swasta dan mendorong pengembangan infrastruktur energi terbarukan yang bertumpu kepada masyarakat. 5. Menyiapkan data informasi geologi, energi dan sumber daya mineral. 6. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku tambang yang baik dan benar yang berwawasan lingkungan. 7. Memberikan kesempatan kepada aparatur dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengembangkan diri melalui jalur pendidikan formal, Pendidikan dan Pelatihan (diklat) teknis sesuai dengan

	kebutuhan di bidang energy dan sumber daya mineral.
--	---

H. Strategi Dan Arah Kebijakan Revolusi Mental

Hakikat revolusi mental, adalah pembangunan manusia yang berkarakter kuat, berpikiran maju dan berpandangan modern, serta berperilaku baik sebagai perwujudan warga negara yang baik. Revolusi mental dapat dijalankan melalui pendidikan, selain melalui kebudayaan, yang kemudian diturunkan ke sistem persekolahan yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Sistem persekolahan sebagai turunan dari sistem pendidikan harus mampu menumbuhkan budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa. Guna mendukung sasaran nasional yang hendak dicapai dalam melakukan revolusi karakter bangsa maka Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan strategis dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2.12
Strategi dan Arah Kebijakan Revolusi Mental

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Menumbuhkan jiwa kebangsaan dan meningkatkan kembali nilai-nilai toleransi di masyarakat.	a. Penguatan pendidikan sejarah perjuangan tadulako Sulawesi Tengah dan Pahlawan Daerah Lainnya.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur.	b. Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat

3. Menggiatkan dan mengembangkan pendidikan Harmoni.	pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran; dan c. Penyelenggaraan pendidikan kewargaan melalui organisasi sosial-kemasyarakatan yang berorientasi untuk memperkuat wawasan kebangsaan di kalangan warga negara dalam rangka meneguhkan jati diri bangsa melalui pemahaman mengenai nilai-nilai multi kulturalisme dan penghormatan pada kemajemukan sosial;. d. Menumbuhkan kembali rasa kebersamaan, tolong menolong, diantara masyarakat dengan Jum'at bersih dll. e. Menghidupkan kembali slogan Nosarara Nosabatutu, Sintuvu Maroso Belu Rapovia Belo Rakava dan lainnya. f. pembelajaran dalam pendidikan agama untuk memantapkan pemahaman ajaran agama, menguatkan internalisasi nilai- nilai agama, menumbuhkan pribadi yang berakhlak mulia, serta menumbuhkan sikap dan perilaku beragama yang toleran dan saling menghormati di antara pemeluk agama yang berbeda. g. menyempurnakan kandungan yang memperkaya pandangan, memupuk toleransi dan membangun
---	--

	harmoni serta saling memahami antar umat beragama.
--	---

Bab 3

Akuntabilitas Kinerja



AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dipakai dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Baik
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 2020

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Provinsi

Sulawesi Tengah untuk tahun 2020. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Capaian IKU Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	91≤	76≤90	66≤75	51≤65	≤50
1.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	62,51-81,25%	97,00%	119,38%	√				
Capaian Rata-Rata				119,38%	√				
2.	- Opini BPK	WTP	WTP	-					
	- Nilai akuntabilitas kinerja	B	B	B					
	- Indeks Reformasi Birokrasi	67	62,15	B					
Capaian Rata-Rata				-					
3.	- Persentase kemantapan jaringan jalan	61%	61,78%	101,28%	√				
	- Persentase rumah tangga pengguna listrik.	89,79%	97,01%	108,04%	√				
	- Persentase rumah tangga pengguna air bersih.	71,73%	75,38%	105,08%	√				
	- Persentase rumah layak huni	73,45%	68,65%	93,46%	√				
	- Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	14,75%	13,4%	90,85%		√			
Capaian Rata-Rata				99%	√				

4.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	86,71-87,11%	99,92%	86%		√			
	Capaian Rata-Rata			86%		√			
5.	Indeks gini	0,31-0,35	0,326	93,14%	√				
	Capaian Rata-Rata			93,14%	√				
6.	Persentase koperasi aktif	65,72%	55,50%	84,44%		√			
	Capaian Rata-Rata			84,44%	√				
7.	- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	10,99%	7,07 %	64,33%				√	
	- Ekspor bersih perdagangan	1.100 Juta USD	5.095,71 Juta USD	436,25%	√				
	Capaian Rata-Rata			250,29%	√				
8.	Pertumbuhan industri	7,60-7,80%	11,08	145,79%	√				
	Capaian Rata-Rata			145,79%	√				
9.	Nilai realisasi investasi								
	- PMDN	5.000.000.000.000	5.261.315.800.000	1052 %	√				
	- PMA	15.400.000.000.000	25.617.411.570.000	1066 %	√				
	Capaian Rata-Rata			1059 %	√				
10.	- Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG).	68,5-69,0%	92,43%	100%	√				
	- Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,29-71,45%	75,50%	100%	√				

	Capaian Rata-Rata			100%	√				
11.	- Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	20.000 Orang	11.921 Org	59,60 %				√	
	- Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	3.800.000 Orang	1.812.995 Org	47,7 %					√
	Capaian Rata-Rata			53,65 %				√	
12.	- Tingkat pengangguran terbuka	3,5-3,25 %	3,77 %	116 %	√				
	- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	76,75%	69,44%	90,47%		√			
	Capaian Rata-Rata			103,23%	√				
13.	Persentase kabupaten/kota tidak tertinggal.	62%	62%	100 %	√				
	Capaian Rata-Rata			100 %	√				
14.	Kontribusi PDRB sub sektor kehutanan	8 - 9%	607,05%	67,45%			√		
	Capaian Rata-Rata			67,45%			√		
15.	Persentase kerusakan kawasan hutan	0,15%	0,06%	40%					√
	Capaian Rata-Rata			40 %					√
16.	Indeks kualitas lingkungan hidup	70,5 poin	77,53 poin	110 %	√				
	Capaian Rata-Rata			110 %	√				
17.	Nilai tukar petani	104,73	88,87 %	84,72 %		√			
	Capaian Rata-Rata			84,72%		√			

18.	- Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.	28,40%	26,24%	93,31%	√				
	- Jumlah PDRB sub sektor perkebunan.	Rp. 12.722.383	Rp. 12.480.042	95,24%	√				
	Capaian Rata-Rata			94,27%	√				
19.	- Nilai tukar nelayan.	108,22	98,11	90,66%		√			
	- Nilai ekspor hasil perikanan (USD)	3.520.000	3.763.124,02	106,90%	√				
	Capaian Rata-Rata			98,78%	√				
20.	Persentase angka melek aksara.	98,50-99,35	96,50	97,12%	√				
	Capaian Rata-Rata			97,13%	√				
21.	- Angka Partisipasi Kasar (APK) :								
	SD/MI/Paket A	103,25-104,00%	104,00%	100 %	√				
	SMP/MTs/Paket B	92,50-93,25%	92,50%	99,19%	√				
	SMA/MA/SMK/Paket C	84,50-85,25%	85,25%	100 %	√				
	- Angka Partisipasi Murni (APM) :								
	SD/MI/Paket A	93,75-94,50%	94,00%	99,20%	√				
	SMP/MTs/Paket B	74,00-74,75%	74,00%	98,99%	√				
	SMA/MA/SMK/Paket C	65,50-66,50%	66,00%	99,24%	√				
	Capaian Rata-Rata			99,43%	√				
22.	Angka usia harapan hidup	68,1 Tahun	68,69 Tahun	100,99%	√				

Capaian Rata-Rata					100,99%	√			
23.	- Cakupan peserta KB aktif.	68 %	78,1%	89,96%		√			
	- Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I.	45,05%	65,48%	54,65%				√	
Capaian Rata-Rata					72%		√		

Data diolah dari beberapa Perangkat Daerah Prov. dan BPS Prov. Sulteng, 2021

Tabel diatas dapat menggambarkan bahwa dari 42 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 27 IKU telah memenuhi kriteria sangat baik, 6 IKU memenuhi kriteria tinggi, 1 IKU capaiannya sedang, 3 IKU capaiannya rendah, 2 IKU capaiannya sangat rendah serta 3 IKU yaitu opini BPK realisasinya masih menunggu hasil pemeriksaan BPK, Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Akuntabilitas Kinerja masih menunggu hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mayoritas IKU Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 telah berhasil dicapai dengan kriteria sangat baik bahkan ada yang mencapai lebih dari 100% (11 IKU).

Pencapaian IKU tersebut diatas bila diukur dengan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian IKU Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 diukur dengan skala nilai peringkat kinerja

No	Tingkat capaian	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91≤	27	Sangat Baik
2	76≤ 90	6	Tinggi
3	66≤75	1	Sedang
4	51≤ 65	3	Rendah
5	≤ 50	2	Sangat Rendah

6		3	Indikator Kinerja Sasaran Opini BPK masih menunggu hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemda dan Nilai Akuntabilitas Kinerja & Indeks RB masih menunggu hasil evaluasi Kemenpan RB.
	JUMLAH	42	

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja secara umum sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian evaluasi dan analisis capaian kinerja akan diuraikan persasaran strategis.

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien

Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini didukung oleh program :

- Program pembinaan kinerja dan pelayanan publik
- Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan

Data persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM) 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabelberikut :

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,21	102%	94,83%	116%	82,71%	101,80%	97,00%	119,38%	81,26-100%	97,00%

Tabel diatas menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan hasil survey yang dilakukan selama 4 tahun berturut-turut mengalami fluktuasi. Tahun 2017 capaian Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan kinerja yang sangat baik, karena terealisasi diatas target

yang direncanakan yaitu sebesar 83,21% dengan capaian kinerja 102%. Terjadi kenaikan sebesar 13,94% pada tahun 2018 dengan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 94,83% dengan capaian kinerja 116%. Selanjutnya pada tahun 2019 Indeks Kepuasan Masyarakat turun 14,65% dari tahun 2018 karena hanya terealisasi sebesar 82,71% dengan capaian kinerja 101,80%, lalu pada tahun 2020 terealisasi sebesar 97,00% dengan capaian kinerja 119,38% atau naik 17,27% dari tahun 2019. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021, Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 ini telah terealisasi sebesar 97,00%.

Survey Kepuasan Masyarakat ini ditentukan berdasarkan hasil survei responden dengan pengukuran 9 unsur pelayanan. Selain itu berdasarkan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, terdapat perubahan klasifikasi angka pada pengkategorian Mutu Layanan. Pengukuran hasil survei menunjukkan IKM terhadap pelayanan perizinan sebesar **97,00**, indeks ini jika berdasarkan target dalam RPJMD berada pada kategori **Sangat Baik** yakni *range* (rentang jarak) 81,26 – 100,00. Sekaligus juga berdasarkan aturan baru pada Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tersebut maka IKM 97,00% juga berada pada kategori **Sangat Baik** yakni *range* 88,31 – 100. Untuk lebih jelasnya, hasil survei IKM pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Survei IKM Tahun 2020

Keterangan :				No.	UNSUR PELAYANAN	NRR
- U1 s/d U9		= Unsur-Unsur Pelayanan		U1	Persyaratan	3.710
- NRR		= Nilai Rata-Rata		U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.820
- IKM		= Indeks Kepuasan Masyarakat		U3	Waktu Penyelesaian	3.750
- *)		= Jumlah NRR IKM tertimbang		U4	Biaya/Tarif	4.000
- **)		= Jumlah NRR Tertimbang x 25		U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.890
- NRR Per Unsur		= Jumlah nilai per unsur dibagi		U6	Kompetensi Pelaksana	3.930
		Jumlah Kuesioner yang terisi		U7	Perilaku Pelaksana	4.000
NRR tertimbang per unsur		= NRR per unsur x 0.071		U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	4.000
				U9	Sarana dan Prasarana	4.000
IKM UNIT PELAYANAN :						97,00
Mutu Pelayanan :						
A (Sangat Baik)	: (3,5324 - 4,00)	88,31 - 100,00				
B (Baik)	: (3,0644 - 3,532)	76,61 - 88,30				
C (Kurang Baik)	: (2,60 - 3,064)	65,00 - 76,60				
D (Tidak Baik)	: (1,00 - 0,5996)	25,00 - 64,99				

Sumber : DPMPTSP Prov.Sulteng, 2021

Beberapa faktor penunjang tercapainya sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien adalah:

- Fasilitasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang merupakan kegiatan memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan. Tujuan dan sasaran kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan untuk meningkatkan jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani.
- Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan berbasis IT sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan perizinan dan Non Perizinan di daerah dengan hadirnya OSS (online Single Submission) sebagai bentuk aplikasi layanan perizinan satu pintu yang bersifat menyeluruh.
- Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan Perizinan dan Non Perizinan ini merupakan kegiatan untuk merumuskan kebijakan di bidang Pengaduan dan Advokasi dan kebijakan laporan Layanan Perizinan dan Non perizinan.
- Kegiatan Fasilitasi Layanan Pengaduan dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan merupakan kegiatan yang memfasilitasi layanan pengaduan dan Informasi pelayanan perizinan dan non perizinan melalui beberapa media.

**SASARAN
STRATEGIS 2**

Meningkatnya Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi” memiliki 3 indikator kinerja, yaitu Opini BPK, Nilai Akuntabilitas Kinerja, dan Indeks Reformasi Birokrasi. Rinciannya sebagai berikut :

1. Opini BPK

Data opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Opini BPK Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Opini BPK	WTP	100%	WTP	100%	WTP	100%	WTP	100%	WTP	100%

Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara periodik setiap tahun ini mencakup pemeriksaan terhadap neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dengan capaian masing-masing 100%, termasuk juga dengan capaian tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

Sebagai bagian penting dari proses pemeriksaan, aspek pengendalian internal berperan penting dalam reformasi birokrasi dan akuntabilitas pemerintah. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kinerja khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik. Melalui penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat memberikan peringatan dini terhadap potensi penyimpangan yang terjadi yang disebabkan oleh kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah

ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Capaian Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Nilai akuntabilitas kinerja Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B	B	B	B	BB	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 memperoleh nilai 66,31 dengan predikat B (capaian 100%) dan pada tahun 2018 memperoleh nilai 67,16 juga dengan predikat B (capaian 100%). Selanjutnya pada tahun 2019 nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 68,30 dengan predikat B atau capaian 100%, sedangkan pada tahun 2020 nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 69,15 poin dengan predikat B atau capaian 100%.

Indikator sasaran nilai hasil evaluasi sapkip Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Uraian singkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan perbaikan sistem manajemen kinerja. Perbaikan dilakukan pada dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja di Perangkat Daerah, dimana sasaran strategis dan indikator beberapa OPD telah berorientasi hasil dan telah dilengkapi dengan target kinerja yang terukur, namun masih

ditemukan juga beberapa kualitas indikator tujuan dan sasaran untuk mengukur capaian jangka menengah (5 tahun) di OPD yang belum optimal, khususnya terkait dengan relevansi, formulasi pengukuran dan kecukupan indikator;

2. Penjabaran sasaran strategis dan indikator kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon IV, namun belum merata di seluruh OPD dan penjabarannya belum seluruhnya didasarkan pada kinerja organisasi dan level di atasnya. Indikator kinerja level eselon II dan IV masih ada yang ditemukan belum seluruhnya terukur dan mendukung tercapainya sasaran pada unit organisasi di atasnya;
3. Pengukuran kinerja instansi dan OPD telah menggunakan aplikasi manajemen kinerja untuk memudahkan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas pencapaian target kinerja, namun pemanfaatannya perlu ditingkatkan sehingga pimpinan dapat dengan cepat mengambil keputusan dan mengubah strategi apabila target kinerja belum terpenuhi serta data digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
4. Laporan Kinerja beberapa OPD masih belum disertai dengan analisis yang memadai untuk menjawab realisasi pencapaian kinerja, perbandingan data kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya serta target kinerja dalam jangka menengah, dan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja;
5. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja melalui Inspektorat. Hasil evaluasi internal cukup menampilkan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi penerapan SAKIP di OPD.
6. Evaluasi atas program yang dilakukan baru terbatas pada pelaksanaan program dan penyerapan anggaran, belum kepada hasil program tersebut. Oleh sebab itu, masih terdapat ketidakselarasan antara kegiatan dan hasil program dengan peran yang menjadi tanggung jawab setiap OPD.

Beberapa hal telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah untuk mendorong akuntabilitas juga terlihat dari upaya pengembangan *e-Government*. Pembangunan jaringan infrastruktur jaringan komputer di Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan, tiap-tiap OPD bisa terkoneksi satu sama lain sehingga transformasi data dan informasi antar unit kerja dapat berjalan semakin lancar.

3. Indeks Reformasi Birokrasi

Data capaian Indeks reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Indeks reformasi Birokrasi Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	61,6	99,5%	61,80	96,56%	62,92	96,8%	62,15	92,76%	70	88,78%

Tabel diatas menunjukkan bahwa Indeks reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2017 memperoleh nilai 61,6 dengan capaian kinerja 99,5%, lalu pada tahun 2018 memperoleh nilai 61,80 dengan capaian 96,56%. Selanjutnya pada tahun 2019 Indeks Reformasi Birokrasi memperoleh nilai 62,92 dengan capaian kinerja 96,8% dan tahun 2020 Indeks Reformasi Birokrasi memperoleh nilai 62,15 dengan capaian kinerja 92,76%. Pencapaian tahun 2020 ini telah memenuhi 88,78% dari target akhir RPJMD tahun 2021.

Reformasi birokrasi diarahkan pada perubahan di delapan aspek manajemen pemerintahan yaitu organisasi, Tata laksana, Peraturan Perundang-Undangan, Sumberdaya Manusia, Aparatur, Pengawasan,

Akuntabilitas, Pelayanan Publik dan Pola Pikir (*mind-set*) serta Budaya Kerja (*culture-set*). Setiap tahun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi tersebut juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan implementasi reformasi birokrasi adalah :

- a. Kualitas penerapan reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah sudah berjalan baik, namun penerapan pada Perangkat Daerah belum merata, sehingga belum mampu memberikan dampak perubahan yang signifikan;
- b. Agen perubahan yang dibentuk baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun PD belum memiliki rencana aksi perubahan yang memiliki dampak nyata dan berkelanjutan, sehingga belum mampu menunjukkan hasil dalam menggerakkan perubahan pada lingkup organisasi;
- c. Belum seluruh peraturan pemerintah daerah yang tidak harmonis/sinkron teridentifikasi dan dipetakan dengan baik, sehingga belum dapat dipastikan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah harmonis dengan kebijakan yang lainnya;
- d. Deregulasi kebijakan yang dilaksanakan belum mampu memetakan kebutuhan peraturan yang mendorong kinerja dan pelayanan, sehingga upaya yang dilakukan cenderung administrative, belum sepenuhnya melakukan revisi-revisi atas regulasi yang menghambat kinerja birokrasi;
- e. Tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d 294 Tahun 2019 tentang langkah strategis dan kongkret penyederhaan birokrasi dan Peraturan Menteri AN RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang

penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional belum diterapkan secara menyeluruh;

- f. Peta proses bisnis belum disusun secara menyeluruh dan belum dilaksanakan evaluasi, sehingga belum dapat menjawab kesesuaian efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi dengan kinerja.

Peran pemerintah dalam upaya meningkatkan pengawasan, akuntabilitas dan reformasi birokrasi dilakukan melalui program:

- Program pembinaan kinerja dan pelayanan publik
- Program penataan dan penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah.



Sasaran Strategis 3 “Tersedianya berbagai infrastruktur yang merata dan memadai” memiliki 5 indikator kinerja, yaitu Persentase kemantapan jaringan jalan dalam kondisi mantap, Persentase rumah tangga pengguna listrik, Persentase rumah tangga pengguna air bersih, Persentase rumah layak huni dan Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB. Rinciannya sebagai berikut :

1. Persentase kemantapan jaringan jalan dalam kondisi mantap

Indikator persentase kemantapan jaringan jalan dalam kondisi mantap ini didukung oleh program penyelenggaraan jalan pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.

Data persentase kemantapan jaringan jalan dalam kondisi mantap Sulawesi Tengah 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.1

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase Jaringan jalan dalam kondisi mantap Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

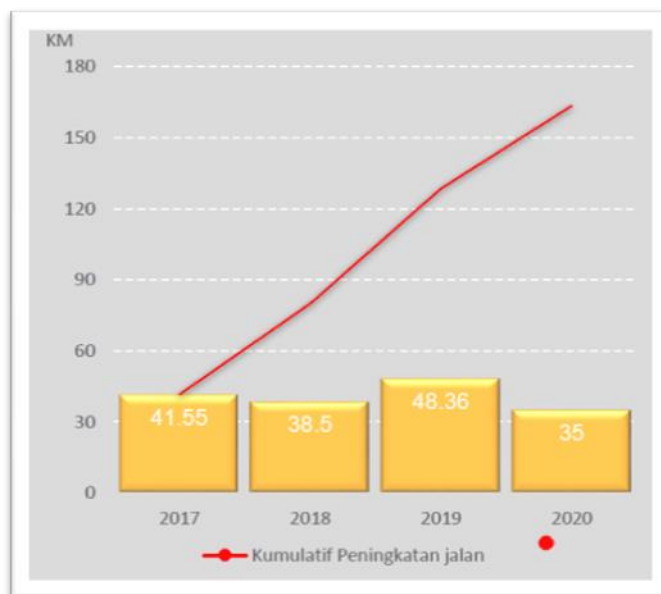


Gambar diatas menunjukkan bahwa persentase jaringan Jalan dalam kondisi mantap selama 4 tahun berurut-turut mengalami fluktuasi. Tahun 2017 terealisasi sebesar 60,89% dengan capaian kinerja 103,09%. Terjadi penurunan jaringan jalan dalam kondisi mantap tahun 2018 sebesar 0,71%, dimana tahun 2018 jaringan dalam kondisi mantap tercatat sebesar 60,46% dengan capaian kinerja 100,77%. Selanjutnya tahun 2019 persentase jaringan Jalan dalam kondisi mantap tercatat sebesar 60,57% dengan capaian kinerja 93,18% dan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 61,78% dengan capaian kinerja 101,28% atau naik 1,99% dibanding tahun 2019. Terhadap target takhir RPJMD, persentase jaringan Jalan dalam kondisi mantap tahun 2020 telah memberikan kontribusi sebesar 99,15%.

Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Capaian ini dihitung berdasarkan kemantapan seluruh ruas-ruas jalan provinsi di Sulawesi Tengah, yaitu

persentase seluruh ruas-ruas jalan provinsi di Sulawesi Tengah (berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 620/299/DIS.BMPPR-G.ST/2017 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi) yang berkondisi baik dan sedang terhadap panjang totalnya. Realisasi tahun 2020 adalah 61,78% terhadap panjang total 1.643,74 km. Peningkatan jalan tahun 2017 s/d 2020 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.2
Akumulatif panjang peningkatan jalan tahun 2017 - 2020



Sumber : DBMPR Prov. Sulteng, 2021

Jika mencermati paket penanganan jalan tahun 2020, beberapa diantaranya adalah paket rehabilitasi bencana alam yang anggarannya pun berasal dari dana Belanja Tak Terduga. Pencapaian ini secara umum didapatkan melalui kegiatan peningkatan jalan sepanjang 35 km yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah, dan APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan ini tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Selain itu juga pencapaian persentase jaringan jalan kondisi mantap adalah hasil dari kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di ruas-ruas kewenangan provinsi.

Melihat dari sebaran kemantapan jalan di tiap kabupaten yang ada, terdapat beberapa kabupaten yang membutuhkan perhatian yang lebih besar untuk penanganan jalan berupa kegiatan peningkatan jalan. Lebih jauh, bahwa kemantapan jalan tidak dapat dianggap linier dengan panjang jalan yang ditingkatkan kondisinya, sebab kondisi jalan juga dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu penentuan kondisinya berdasarkan data hasil survei. Survei dilaksanakan melalui Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Data Base Jalan dengan menggunakan metode SDI. *Surface distress index* (SDI) adalah indeks nilai perkerasan jalan yang didapat dari survey kondisi jalan yang diusulkan oleh Bina Marga. SDI membagi kondisi jalan menjadi 4, yaitu kondisi baik, kondisi sedang, kondisi rusak ringan dan kondisi rusak berat. Menurut RCS (*Road Condition System*) atau SKJ (*Survey Kondisi Jalan*) 2011, hanya ada 4 unsur yang dipergunakan sebagai dukungan untuk menghitung besaran nilai SDI yaitu : % luas retak, rata-rata lebar retak, jumlah lubang per km, dan rata-rata kedalaman rutting bekas roda.

2. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Data Realisasi dan capaian Persentase rumah tangga pengguna listrik 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Tabel 3.9
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase rumah tangga pengguna listrik Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	79,56%	92,8%	87,31%	99,32%	94,67%	100,7%	97,01%	108,04%	98	98,98%

Gambar diatas menunjukkan bahwa persentase rumah tangga pengguna listrik mengalami kenaikan selama 4 tahun berturut-turut. Pada tahun 2017 persentase rumah tangga pengguna listrik di Sulawesi Tengah tercatat sebesar 79,56% dengan capaian kinerja 92,8%.Terjadi

peningkatan 9,74% pada tahun 2018, dimana persentase pengguna listrik menjadi 87,31% dengan capaian kinerja 99,32%. Selanjutnya pada tahun 2019 persentase rumah tangga pengguna listrik naik lagi menjadi 94,67% dengan capaian kinerja mencapai 100,7% dan persentase rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2020 tercapai sebesar 97,01% dengan capaian kinerja mencapai 108,04%. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021 persentase rumah tangga pengguna listrik telah memberikan kontribusi sebesar 98,98%.

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan perekonomian, kebutuhan energi listrik juga turut meningkat. Selain penggunaan energi fosil untuk pembangkitan tenaga listrik yang lambat laun mulai dikurangi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas ESDM mengoptimalkan pengelolaan energi daerah yang berasal dari energi baru terbarukan. Hal ini menjadi salah satu sasaran strategis dengan nilai konsumsi listrik per kapita yang diharapkan meningkat tiap tahunnya. Nilai konsumsi listrik per kapita menjadi indikator tingkat kemajuan ekonomi suatu daerah.

Nilai konsumsi listrik per kapita Sulawesi Tengah khusus untuk sektor rumah tangga meningkat, dari yang semula 250,4 kWh/kapita di tahun 2019 meningkat menjadi 297,05 kWh/ kapita di tahun 2020. Adapun data runtun waktu konsumsi listrik per kapita Sulawesi Tengah sektor rumah tangga dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.3
Konsumsi listrik per Kapita Sulawesi Tengah (kWh/kapita)
Sektor Rumah Tangga

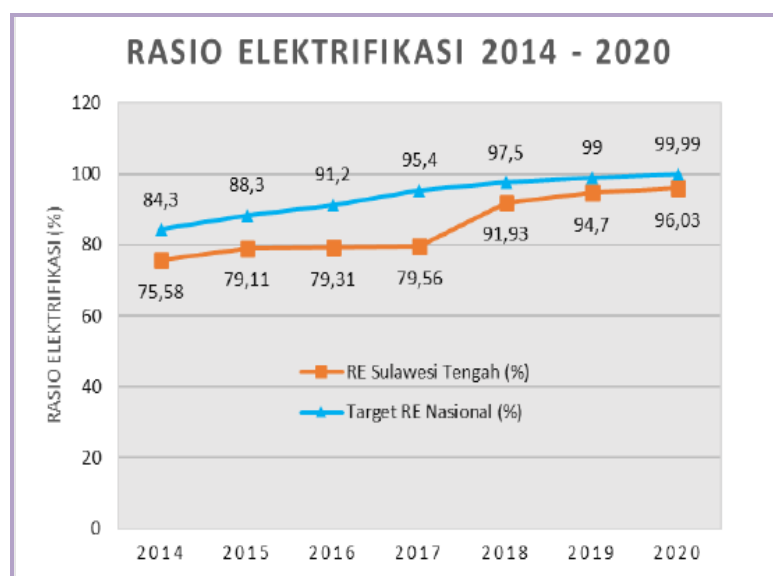


Sumber : Dinas ESDM Prov. Sulteng, 2021

Dari data yang tersaji pada grafik di atas, rata-rata pertumbuhan nilai konsumsi listrik per kapita Sulawesi Tengah dari sektor rumah tangga dari tahun 2014 sampai tahun 2020 berada di angka 7%. Jika dihitung secara keseluruhan (termasuk sektor rumah tangga, sosial, bisnis, industri, pemerintahan dan layanan khusus), konsumsi listrik per kapita Sulawesi Tengah mencapai 429 kWh/kapita. Nilai ini masih jauh di bawah angka nasional yaitu 1.142 kWh/kapita di tahun 2020. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas ESDM masih harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan melalui program-program pengembangan ketenagalistrikan dan pengembangan energi baru terbarukan.

Selanjutnya rasio elektrifikasi rumah tangga meningkat sebesar 1,33% menjadi 96,03% di tahun 2020 dari angka tahun sebelumnya yaitu 94,7%. Walaupun terjadi peningkatan, rasio elektrifikasi (RE) Provinsi Sulawesi Tengah masih jauh di bawah target RE nasional yaitu sebesar 99%. Grafik berikut menunjukkan peningkatan rasio elektrifikasi Sulawesi Tengah dan rasio elektrifikasi nasional selama 7 (tujuh) tahun terakhir.

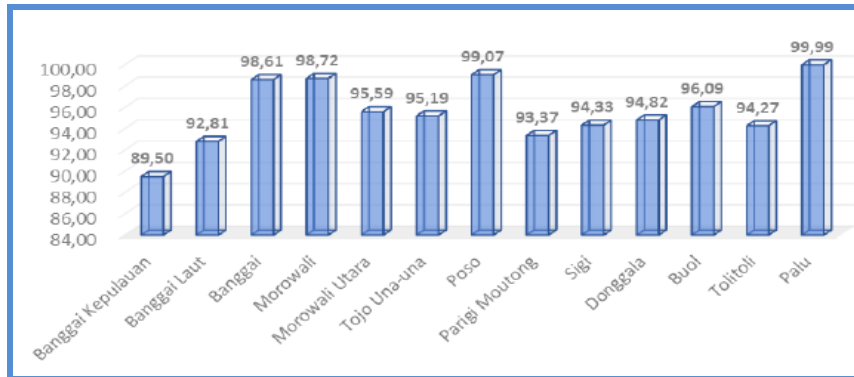
Gambar 3.4
Trend Rasio Elektrifikasi Periode 2014 – 2020



Sumber : Dinas ESDM Prov. Sulteng, 2021

Rasio elektrifikasi Provinsi Sulawesi Tengah dapat dijabarkan lagi menjadi rasio elektrifikasi tiap kabupaten/kota, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:

Tabel 3.10
Rasio Elektrifikasi Kab/Kota Sulawesi Tengah Tahun 2020



Sumber : Dinas ESDM Prov. Sulteng, 2021

Rasio elektrifikasi ini adalah penjumlahan rasio elektrifikasi yang dihasilkan oleh PLN dan rasio elektrifikasi yang didukung oleh sumber listrik alternatif lainnya. Dari gambar di atas terlihat bahwa Kota Palu memiliki rasio elektrifikasi terbesar yaitu 99,99%, sedangkan Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki rasio elektrifikasi terendah yaitu 89,5%. Namun, jika dilihat dari elektrifikasi yang dilaksanakan oleh PLN, Kabupaten Banggai Laut berada di posisi terendah yaitu 72,03%. Hal ini dikarenakan oleh topografi Kabupaten Banggai Laut yang merupakan daerah kepulauan. Jaringan ketenagalistrikan PLN belum dapat menjangkau pulau-pulau kecil dan tersebar disebabkan keterbatasan akses masuk untuk pembangunan jaringan transmisi dan distribusi. Kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah juga menjadi salah satu kendala peningkatan rasio elektrifikasi. Selain itu, Dinas memiliki keterbatasan anggaran dalam hal penyambungan meteran listrik gratis bagi daerah yang telah dilalui jaringan listrik PLN dan dikhususkan untuk masyarakat yang masuk ke dalam kelompok Rumah Tangga Sasaran (RTS). Instalasi infrastruktur ketenagalistrikan oleh Dinas yang bersumber dari energi baru terbarukan seperti pemasangan Solar Home System (SHS), Lampu Tenaga Surya Hemat Listrik (LTSHE), Pembangkit Listrik

Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan lain sebagainya juga sangat terbatas tiap tahunnya. Untuk itu, anggaran untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi untuk dapat berkontribusi lebih terhadap peningkatan rasio elektrifikasi.

Salah satu faktor peningkatan jumlah rumah tangga pengguna listrik tahun 2020 adalah melalui pemasangan instalasi listrik gratis bagi rumah tangga yang belum berlistrik dengan kriteria tidak mampu dengan kapasitas daya 450 VA untuk 3 titik mata lampu dan 1 titik kotak kontak yang tersebar pada beberapa wilayah di Kabupaten Parigi Moutong yaitu di Desa Pande Kecamatan Moutong, Desa Uevolo Kecamatan Siniu, Desa Marantale Kecamatan Siniu dan Desa Dusunan Kecamatan Tinombo. Adapun lokasi pengadaan instalasi dan sambungan listrik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Lokasi pemasangan instalasi dan sambungan listrik gratis
Tahun 2020

Kabupaten	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah Sambungan
Parigi Moutong	Moutong	Pande	47 SR
	Siniu	Uevolo	19 SR
		Marantale	29 SR
	Tinombo	Dusunan	23 SR
		Total Sambungan	118 SR

Sumber : Dinas ESDM Prov. Sulteng, 2021

Upaya pemerintah dalam pencapaian indikator persentase rumah tangga pengguna listrik didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Inventarisasi dan Pengelolaan Data Ketenagalistrikan
2. Survey Pengembangan Ketenagalistrikan
3. Pengusahaan Ketenagalistrikan
4. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan

3. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Realisasi dan capaian kinerja Persentase rumah tangga pengguna air bersih dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Tabel 3.12

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase rumah tangga pengguna air bersih Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Persentase Rumah Tangga Pengguna air bersih	59,26%	100%	60,10%	96,28%	60,10%	97,74%	75,38%	105,08%	72	104,07%

Gambar diatas menunjukkan bahwa Persentase rumah tangga pengguna air bersih tahun 2017 terealisasi sebesar 59,26% dengan capaian kinerja mencapai 100%.Terjadi peningkatan sebesar 1,84% pada tahun 2018, dimana tahun 2018 persentase rumah tangga pengguna air bersih terealisasi 60,10% dengan capaian kinerja 96,28%. Selanjutnya tahun 2019 Persentase rumah tangga pengguna air bersih masih sama dengan kondisi tahun 2018 yaitu sebesar 60,10% dengan capaian kinerja 97,74%. Pada tahun 2020 persentase rumah tangga pengguna air bersih mengalami peningkatan 25,42% dibandingkan tahun 2019 dengan realisasi sebesar 75,38% dan capaian kinerja 105,08%. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021 telah tercapai sebesar 104,07%.

Persentase rumah tangga pengguna air bersih yang terbesar di Sulawesi Tengah yaitu di kota palu, lalu di urutan kedua dan ketiga adalah Kabupten Tojo Una-Una sebesar 90,02% dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 89,74%. Adapun persentase rumah tangga pengguna air tidak bersih di Sulawesi Tengah sebesar 24,62%, dimana persentase tertinggi adalah Kabupaten Sigi sebesar 48,13% dan Kabupaten Donggala 40,06%. Berikut data persentase rumah tangga pengguna air bersih tahun 2020.

Tabel 3.13
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Sumber air minum bersih	
	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)
1. Banggai Kepulauan	89,74	10,26
2. Banggai	77,17	22,83
3. Morowali	81,88	18,12
4. Poso	80,86	19,14
5. Donggala	59,94	40,06
6. Toli Toli	78,01	21,99
7. Buol	80,81	19,19
8. Parigi Moutong	64,33	35,67
9. Tojo Una Una	90,02	9,98
10. Sigi	51,87	48,13
11. Banggai Laut	81,60	18,40
12. Morowali Utara	76,89	23,11
71. Palu	92,43	7,57
Sulawesi Tengah	75,38	24,62

Sumber : BPS Sulteng, 2021

4. Persentase Rumah Layak Huni

Data realisasi dan capaian kinerja Persentase rumah layak huni 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.14

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase rumah layak huni Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Persentase Rumah Layak Huni	70,02%	99,9%	74,74%	104,09%	62,86%	86,88%	68,65%	93,46%	74,55%	92,08%

Gambar diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja rumah layak huni selama 4 tahun berturut-turut mengalami fluktuasi. Tahun 2017 rumah layak huni tercatat sebesar 70,02% dengan capaian kinerja 99,9%. Kemudian tahun 2018 naik 4,72% hingga terealisasi sebesar 74,74% dengan capaian kinerja mencapai 104,9%. Selanjutnya pada tahun 2019 persentase rumah layak huni turun sebesar 11,88% karena hanya terealisasi sebesar 62,86% dengan capaian kinerja 86,88%, lalu pada tahun 2020 terealisasi

sebesar 68,65% dengan capaian kinerja 93,46% atau naik 9,21% dibanding tahun 2019. Terhadap target RPJMD tahun 2021 persentase rumah layak huni tahun 2020 ini telah memberikan kontribusi sebesar 92,08%.

Pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan serius. Setiap tahun diperkirakan terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru. Pembangunan/pengembangan unit baru diharapkan akan meningkat sebesar 1,1% pertahun hingga tahun 2021. pada tahun 2020 jumlah total rumah meningkat lagi menjadi 692.306 unit, dengan jumlah rumah tidak layak huni sebesar 217.042 unit dan rumah layak huni sebesar 475.264 unit yang dilaksanakan dengan menggunakan alokasi dana APBD, APBD Kab/Kota, APBN dan NGO.

Data kondisi perumahan tidak layak huni dan layak huni di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15

Data Kondisi Perumahan Di Sulawesi Tengah Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	DATA		
		Jumlah Rumah (unit)	Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	Rumah Layak Huni (Unit)
1	Kota Palu	76.088	37.470	37.054
2	Kabupaten Donggala	71.289	23.123	49.731
3	Kabupaten Parigi Moutong	109.214	24.541	84.673
4	Kabupaten Poso	57.134	5.627	51.507
5	Kabupaten Tojo Una-una	34.461	9.693	24.768
6	Kabupaten Banggai	88.366	13.705	74.661
7	Kabupaten Morowali	26.918	7.229	19.689
8	Kabupaten Toli-toli	53.086	21.485	31.601
9	Kabupaten Buol	37.968	10.426	27.542

10	Kabupaten Banggai Kepulauan	30.202	15.632	14.570
11	Kabupaten Sigi	58.967	34.718	24.258
12	Kabupaten Banggai laut	19.666	7.333	12.333
13	Kabupaten Morowali utara	28.938	6.061	22.877
	Jumlah Total	692.306	217.042	475.264

Sumber :Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulteng 2021

5. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Realisasi dan capaian kinerja Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.16

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	12,69%	106,9%	13,60%	112,77%	15,13%	107,5%	13,4%	90,85%	15,45%	86,73%

Dari gambar diatas terlihat bahwa kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB selama 4 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tahun 2017 kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB tercatat sebesar 12,69% dengan capaian kinerja 106,9% lalu pada tahun 2018 meningkat menjadi 13,60% dengan capaian kinerja 112,77%. Selanjutnya pada tahun 2019 kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB sebesar 15,13% dengan capaian kinerja mencapai 107,5% atau turun 10,11% dibanding tahun 2018 dan pada tahun 2020 realisasi kembali turun lagi 12,91% yaitu 13,4% dengan capaian kinerja 90,85%. Terhadap target akhir RPJMD, pencapaian tahun 2020 ini telah memberikan kontribusi sebesar 86,73%.

Walaupun persentasi kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun nilai rupiahnya meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai rupiah ini salah satunya dipengaruhi oleh nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertambangan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17
Data PNBP Sektor Pertambangan Sulawesi Tengah Tahun 2020

Periode data 02 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020			
Jenis PNBP	Kas Negara (Rp)	Hasil Rekonsiliasi (Rp)	Ket.
Iuran Tetap	12.961.149.123	12.961.149.123	Sama
Royalti	546.755.762.245	546.755.762.245	Sama
Penjualan Hasil Tambang	0	0	Sama
Jumlah	559.716.911.368	559.716.911.368	Sama

Sumber : Dinas ESDM Prov. Sulteng, 2021

PDRB sektor pertambangan dan penggalian atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebesar 26456 milyar rupiah dan harga konstan 2010 sebesar 22040 milyar rupiah. Data runtun waktu dari PDRB sektor pertambangan dan penggalian ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.18
PDRB Sulawesi Tengah Sektor Pertambangan dan Penggalian
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2010
Periode 2018 – 2020 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Pertambangan dan Penggalian	21.468	24.863	26.456	17.552	19.972	22040

Sumber : Dinas ESDM Prov. Sulteng, 2021

Dari tabel di atas, terlihat bahwa PDRB sektor pertambangan dan penggalian Provinsi Sulawesi Tengah mengalami trend naik dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Laju pertumbuhan rata-rata dari tahun 2018 hingga 2020 sebesar 15,62%. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik

dalam pelaksanaan program pendukung pencapaian peningkatan nilai PDRB sektor pertambangan dan penggalian.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator kontribusi PDRB terhadap sektor pertambangan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Terdiri dari 5 kegiatan yaitu : (1) Inventarisasi Potensi Pengusahaan Mineral dan Batubara, (2) Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, (3) Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara, (4) Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Konservasi Pertambangan, (5) Inventarisasi Lahan Terganggu dan Pertambangan Rakyat .

2. Program Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi air tanah yang cukup besar dengan total luas cekungan air tanah 10.713 km². Namun, pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air bersih belum optimal. Hal ini disebabkan rendahnya kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur air bersih di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya yang bersumber dari air tanah. Rendahnya pembangunan infrastuktur air tanah juga disebabkan belum terpetakannya daerah sulit air di kawasan Sulawesi Tengah. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah, (2) Inventarisasi Data Geologi dan Air Tanah, (3) Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pengusahaan Air Tanah, (4) Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah.



Sasaran menurunnya angka kemiskinan dengan indikator kinerja persentase penduduk diatas garis kemiskinan ini didukung oleh program :

1. Program penanganan fakir miskin

2. Program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
3. Program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial
4. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
5. Program perlindungan sosial korban bencana alam
6. Program Perlindungan sosial korban bencana sosial
7. Program Jaminan sosial keluarga (Bantuan Tunai Bersyarat/PKH)

Data realisasi dan capaian kinerja persentase penduduk diatas garis kemiskinan 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase penduduk diatas garis kemiskinan Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	85,8%	97,6%	86,2%	99,65%	86,82%	99,7%	99,92%	86%	85,91-86,31%	79%

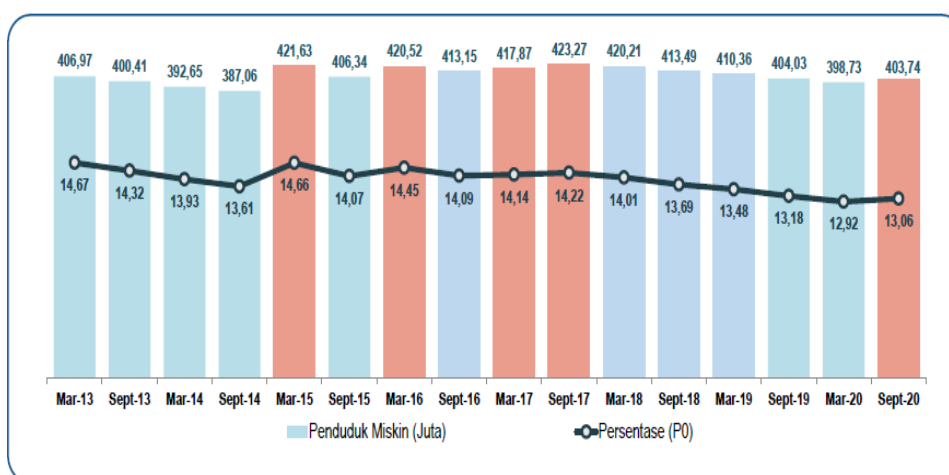
Tabel diatas menggambarkan bahwa persentase penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah yang berada diatas garis kemiskinan pada tahun 2017 adalah sebesar 85,8% dengan capaian kinerja mencapai 97,6%. Terjadi kenaikan 0,4% pada tahun 2018 dimana persentase penduduk diatas garis kemiskinan terealisasi sebesar 86,2% dengan capaian kinerja 99,65%. Sedangkan pada tahun 2019 persentase penduduk diatas garis kemiskinan terealisasi sebesar 86,82% dengan capaian kinerja 99,7%. Selanjutnya persentase penduduk diatas garis kemiskinan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 99,92% dengan capaian kinerja 86%. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021, persentase penduduk diatas garis kemiskinan pada tahu 2020 ini telah mencapai 79%.

Tahun 2020 (posisi bulan September) penduduk miskin tercatat sebesar 13,06% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 403,74 ribu orang. Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 501 ribu orang dibandingkan bulan Maret 2020. Berdasarkan daerah tempat tinggal,

pada periode Maret 2020 – September 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat sebesar 670 ribu orang sedangkan daerah perdesaan turun sebesar 169 ribu orang.

Secara umum, pada periode Maret 2013-September 2019 tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, namun sejak 2015 tingkat kemiskinan tersebut menunjukkan fluktuasi yang cenderung meningkat hingga 2017 sebelum akhirnya kembali menunjukkan tren penurunan hingga 2019. Setelah adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin kembali meningkat. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2013 sampai dengan September 2020 ditunjukkan oleh gambar berikut.

Gambar 3.5
Jumlah dan Persentase Penduduk miskin di Sulawesi Tengah
Tahun 2012- 2020



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2021

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada September 2020 tercatat sebesar 76,56 persen. Kondisi meningkat dibanding Maret 2020 yaitu sebesar 76,54 persen. Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan, adalah beras, rokok kretek filter, kue basah, telur ayam

ras, tongkol/tuna/cakalang, gula pasir, mie instan, cabe rawit, bawang merah, dan kopi bubuk/kopi instan (sachet). Sedangkan, untuk komoditi bukan makanan yang besar pengaruhnya adalah biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Upaya-upaya pengurangan kesenjangan dengan memfokuskan pembangunan dikawasan pedesaan menjadi prioritas dengan pengembangan wilayah pesisir secara terpadu, mengingat wilayah pesisir Sulawesi Tengah merupakan daerah tertinggal dan miskin. Perencanaan tata ruang juga mengedepankan kepentingan masyarakat lokal dan daya dukung lingkungan. Selain itu upaya peningkatan pendapatan untuk mendorong pengentasan kemiskinan juga perlu dilakukan dengan memfokuskan program penanggulangan kemiskinan di wilayah yang menjadi kantong kemiskinan. Sinergi program pengentasan kemiskinan termasuk dengan pihak non pemerintah dilakukan untuk menguatkan fokus program pengentasan kemiskinan.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada periode Maret 2020-September 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2020 adalah 2,58 dan pada September 2020 naik menjadi 2,78. Demikian juga dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan mengalami kenaikan dari 0,77 menjadi 0,87 pada periode yang sama.

Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Sulawesi Tengah menurut daerah posisi September 2019 – September 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di
Sulawesi Tengah menurut daerah posisi Sep 2019- Sep 2020

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)			
September 2019	1,98	3,71	3,19
Maret 2020	1,68	2,96	2,58
September 2020	1,83	3,20	2,78
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)			
September 2019	0,54	1,41	1,15
Maret 2020	0,43	0,92	0,77
September 2020	0,43	1,07	0,87

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada September 2020, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) untuk daerah perkotaan sebesar 1,83 sementara di daerah perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 3,20. Sementara itu nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) untuk perkotaan adalah 0,43 sedangkan di daerah perdesaan mencapai 1,07.

Beberapa faktor yang terkait dengan tingkat kemiskinan selama periode Maret 2020- September 2020 antara lain adalah:

1. Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan September 2020 turun sebesar 2,13 persen menjadi 94,59 dari 96,72 pada Maret 2020.
2. Laju inflasi Maret 2020 – September 2020 turun sebesar 0,06 persen poin menjadi 0,92 dari 0,98 pada September 2019 – Maret 2020.
3. TPT Agustus 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,79% menjadi 3,77% dari 2,98% pada Februari 2020.
4. Beberapa komoditas penyumbang terbesar garis kemiskinan mengalami peningkatan harga, seperti: tongkol/tuna/cakalang, daging, susu, dan cabe.

Penurunan angka kemiskinan kedepan merupakan peran dan komitmen pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta para stakeholder dalam upaya mengeroyok kemiskinan khususnya di Sulawesi Tengah. Pemerintah bersama instansi terkait akan mengambil langkah yang strategis melalui berbagai intervensi baik melalui program multi sasaran maupun melalui operasi pasar dan pengendalian harga. Tiga pilar penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah yang harus dibangun terus-menerus yaitu :

1. Memperluas kesempatan kerja (*Pomoting Opportunities for the Poor*);
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*Facilitating Empowerment*);
3. Memperkuat ketahanan sosial (*Enhancing Social Security*).

Diharapkan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka penurunan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya dapat menekan angka kemiskinan.



Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi dengan indikator kinerja indeks gini. Indeks gini merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah.

Data realisasi dan capaian Indeks Gini di Sulawesi Tengah 4 tahun dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.21

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Indeks gini Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

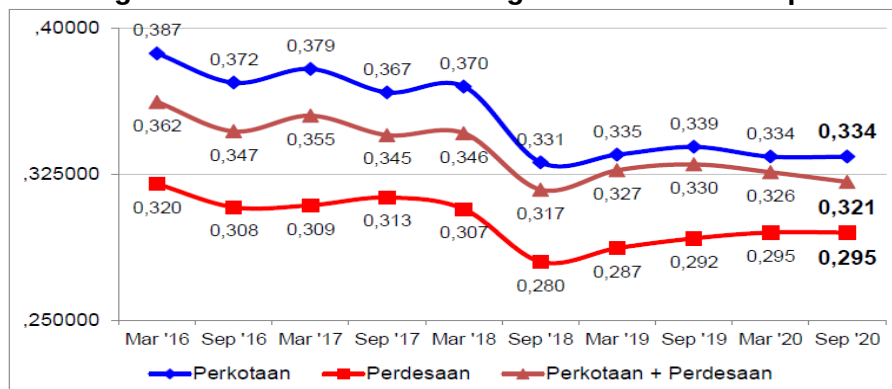
No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Indeks Gini	0,345	127,5%	0,317%	111,30%	0,330	95,9%	0,321	91,71%	0,31-0,35	91,71%

Tabel diatas menunjukan bahwa terjadi fluktuasi realisasi indeks gini di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2017 indeks gini tercatat sebesar 0,345 dengan capaian kinerja sebesar 127,5%. Tahun 2018 turun menjadi 0,317 dengan capaian kinerja sebesar 111,30%, lalu pada tahun 2019 kembali terjadi kenaikan hingga mencapai 0,330 dengan capaian kinerja 95,9%. Selanjutnya pada tahun 2020 indeks gini mencapai 0,321 dengan capaian kinerja 91,71%, terhadap target akhir RPJMD tahun 2021 pencapaian kinerja indeks gini sama dengan tahun 2020 yaitu sebesar 91,71%.

Pada September 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Tengah yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,321. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,009 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,330, sementara itu jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,326, angka tersebut turun sebesar 0,005 poin.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2020 sebesar 0,334, turun dibanding Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,339, dan stagnan dibanding keadaan Maret 2020 yang juga sebesar 0,334. Di daerah perdesaan Gini Ratio pada September 2020 sebesar 0,295, stagnan dibanding Gini Ratio Maret 2020 yang juga sebesar 0,295, namun naik dibanding Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,292. Gambar berikut perkembangan Gini Ratio di Sulawesi Tengah.

Gambar 3.6
Perkembangan Gini Ratio Sulawesi Tengah Maret 2016 – September 2020



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2021

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah selama periode Maret 2016 - September 2020 terus mengalami fluktuasi. Pada Maret 2016 hingga September 2018 nilainya cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode Maret 2015 hingga September 2018 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Sulawesi Tengah. Namun demikian pada periode September 2018 hingga September 2019 nilainya mengalami sedikit peningkatan, dan selanjutnya kembali menunjukkan trend penurunan hingga September 2020.

Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Pada September 2020, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 20,92 persen yang berarti berada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan September 2020 ini naik jika dibandingkan dengan kondisi September 2019 yang sebesar 20,48 persen, maupun dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 20,62 persen. Sejalan dengan informasi yang diperoleh dari Gini Ratio, ukuran ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan di perdesaan, meskipun masih pada kategori rendah.

Faktor utama yang berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode Maret-September 2020 adalah perubahan pengeluaran per kapita penduduk. Berdasarkan data Susenas, tercatat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 20 persen teratas mengalami penurunan yang lebih besar dibanding penduduk kelompok 40 persen terbawah. Pada kelompok penduduk 20 persen teratas penurunan tersebut mencapai 3,24 persen, sedangkan pada kelompok 40 persen terbawah hanya menurun sebesar 1,16 persen.

Selama periode September 2019 - September 2020, nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah merupakan yang terendah dibanding provinsi lain di Sulawesi, baik secara total maupun menurut kategori wilayah perkotaan

dan perdesaan. Pada skala nasional, posisi nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah dalam setahun terakhir relatif stagnan. Pada September 2019 nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah berada pada urutan ke-11 terendah se-Indonesia, sedangkan pada Maret 2020 posisi tersebut hanya naik satu peringkat ke posisi 10, dan bertahan hingga September 2020. Gini Ratio menurut provinsi Se-Sulawesi periode Sep 2019 – Sep 2020 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.22
Gini Ratio Provinsi Se-Sulawesi Periode Sep 2019-Sep 2020

Kode	PROVINSI	September 2019			Maret 2020			September 2020		
		Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
71	Sulawesi Utara	0,375	0,346	0,376	0,371	0,344	0,370	0,367	0,346	0,368
72	Sulawesi Tengah	0,339	0,292	0,330	0,334	0,295	0,326	0,334	0,295	0,321
73	Sulawesi Selatan	0,393	0,354	0,391	0,384	0,356	0,389	0,384	0,352	0,382
74	Sulawesi Tenggara	0,402	0,353	0,393	0,404	0,347	0,389	0,403	0,348	0,388
75	Gorontalo	0,399	0,393	0,410	0,393	0,392	0,408	0,390	0,391	0,406
76	Sulawesi Barat	0,438	0,320	0,365	0,436	0,321	0,364	0,437	0,321	0,356
	INDONESIA	0,391	0,315	0,380	0,393	0,317	0,381	0,399	0,319	0,385

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2021

SASARAN STRATEGIS 6

Terwujudnya koperasi yang tangguh, berdaya saing, profesional dan mandiri

Indikator persentase koperasi aktif ini didukung oleh program :

1. Program Pemberdayaan Koperasi;
2. Program Pengembangan Balai Latihan Koperasi;

Data capaian persentase koperasi aktif 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut :

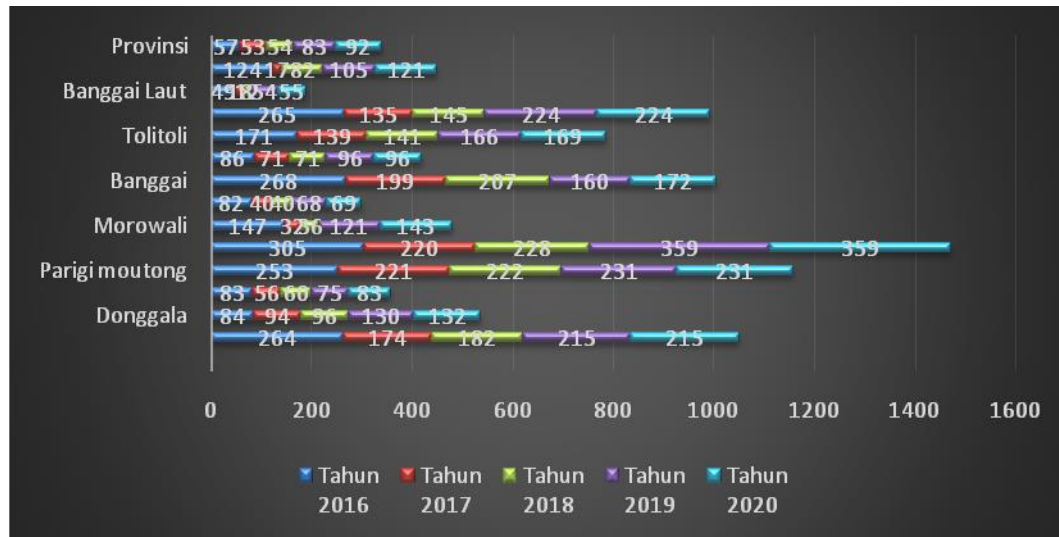
Tabel 3.23
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase koperasi aktif Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Persentase Koperasi Aktif	64,1%	97,8%	73,44	111,93%	57%	86,8%	55,50%	84,44%	65,78	84,37%

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase koperasi aktif di Sulawesi Tengah selama empat tahun berturut-turut mengalami fluktuasi. Tahun 2017 koperasi aktif tercatat sebesar 64,1% dengan persentase capaian kinerja 97,8%. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018, dimana koperasi aktif tahun 2018 terealisasi sebesar 73,44% dengan capaian kinerja mencapai 111,64%. Selanjutnya pada tahun 2019 koperasi aktif mengalami penurunan sebesar 16,44% karena hanya terealisasi sebesar 57% dengan capaian kinerja 86,80%, lalu pada tahun 2020 koperasi aktif hanya terealisasi sebesar 55,50% dengan capaian kinerja 84,44% atau turun 2,70% dibanding tahun 2019. Terhadap target akhir RPJMD, capaian koperasi aktif tahun 2020 ini telah terealisasi sebesar 84,44%.

Indikator meningkatnya koperasi aktif dapat diukur dengan bertambahnya kelembagaan koperasi yang berkualitas. Koperasi merupakan soko guru perekonomian di Indonesia. Peranan koperasi dalam pembangunan perekonomian ialah menghimpun skala-skala usaha kecil dan menjadikannya lebih besar dengan segala aspeknya. Koperasi juga digunakan sebagai alat untuk memberantas para rentenir yang banyak terdapat di daerah. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya masyarakat dipedesaan belum memiliki kekuatan ekonomi yang cukup untuk mengembangkan usahanya sendiri karena mereka memerlukan bantuan dan bimbingan dari pemerintah melalui Koperasi Unit Desa (KUD) dan koperasi lainnya yang dapat memberikan pelayanan kepada setiap anggotanya terutama dalam menyediakan pangan dan kebutuhan lainnya. Pada tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah tercatat 2.160 unit koperasi, dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 1199 unit atau 55,50% dan koperasi tidak aktif sebanyak 961 unit atau 44,49%. Pada tahun 2020 jumlah koperasi bertambah sebesar 73 koperasi atau 3,38% dari jumlah koperasi tahun 2019, hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan koperasi di beberapa daerah, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.7
Jumlah Koperasi Per Kabupaten/Kota Tahun 2016 s/d 2020



Sumber :Dinas Koperasi UKM Prov Sulteng, 2021

Berikut data jumlah koperasi aktif dan tidak aktif di Sulawesi Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir :

Tabel 3.24
Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif
Tahun 2016- 2020 (dalam unit)

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Koperasi Aktif	1.526	1.469	1.576	1.189	1.199
2	Koperasi Tidak aktif	712	604	570	898	961
	Jumlah	2.238	2.073	2.146	2.087	2.160

Sumber :Dinas Koperasi UKM Prov Sulteng, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah koperasi aktif di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 10 unit koperasi atau kenaikan0,83% dari jumlah koperasi aktif tahun 2019, sedangkan koperasi tidak aktif tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 63 unit koperasi atau7,01% dari tahun 2019. Sangat dibutuhkan peran aktif Pemerintah Daerah baik dari segi pembinaan maupun dari segi pemberdayaan. Dan yang terpenting lagi keseriusan pengurus koperasi dalam melaksanakan kewajibannya

khususnya pelaksanaan RAT sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan.

Peningkatan kinerja koperasi aktif ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

1. jumlah koperasi aktif secara keseluruhan kabupaten Kota tahun 2020 bertambah sebesar 10 unit usaha menjadi 1.199 Unit dari tahun 2019 sebesar 1.189 Unit Usaha melalui tolak ukur Jumlah Koperasi yang RAT Tahun 2020 sebesar 30 Unit Usaha.
2. Selisih Hasil Usaha (SHU) di tahun 2020 mengalami Penurunan sebesar 3.180.750.000.000 menjadi 4.372.032.000.000 dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp. 7.552.782.000.000.
3. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas melalui kegiatan Pembinaan Kelembagaan Koperasi berdampak pada aktifnya koperasi yang sebelumnya tidak aktif, kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Penilaian Kesehatan Koperasi berdampak pada peningkatan Unit Koperasi setelah dilakukan tahap penilaian dapat dikualifikasikan menjadi koperasi sehat, Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Koperasi melalui kegiatan sosialisasi-sosialisasi yang berdampak pada kesadaran masyarakat untuk berkoperasi dan berhasil menumbuhkan koperasi baru. Akan tetapi dari dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan pengurangan produksi sehingga menyebabkan turunnya angka produksi.
4. Komitmen dan kerjasama yang baik oleh para pejabat maupun para staf Perangkat Daerah untuk memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga mencapai target kinerja yang ditetapkan.

**SASARAN
STRATEGIS 7**

**Meningkatnya daya saing, efisiensi dan produktifitas
perdagangan**

Sasaran Strategis 7 “Meningkatnya daya saing, efisiensi dan produktifitas perdagangan” memiliki 2 indikator kinerja, yaitu Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan Ekspor bersih perdagangan. Rinciannya sebagai berikut :

1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Indikator Kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ini didukung oleh program :

1. Program pengembangan dan pengamanan perdagangan dalam negeri.
2. Program pengembangan dan pengamanan perdagangan luar negeri.

Data kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.8
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD



Gambar diatas menunjukkan bahwa realisasi kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB selama 4 tahun berturut-turut mengalami fluktuasi. Tahun 2017 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB terealisasi sebesar 21,92% dengan capaian kinerja sebesar 81,19%, lalu pada tahun 2018 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB terealisasi sebesar 21,78% dengan capaian kinerja sebesar 80,67%. Kemudian pada tahun 2019 terjadi penurunan 8,52% dimana kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tercatat sebesar 20,07% dengan

capaian kinerja hanya sebesar 64,72%. Selanjutnya pada tahun 2020 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mengalami penurunan 18,38 dengan realisasi sebesar 7,07% dan capaian kinerja sebesar 64,33%. Terhadap target akhir RPJMD 2021, pencapaian kinerja tahun 2020 telah memberikan kontribusi sebesar 61%.

Realisasi nilai PDRB Sektor Perdagangan tahun 2020 merupakan data pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah yang dihitung berdasarkan komponen Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sehingga nilai kontribusi sektor perdagangan yang tercapai lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Ekonomi Sulawesi Tengah tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 (*c-to-c*) tumbuh 4,86%. Pertumbuhan terjadi pada 9 dari 17 lapangan usaha. Lima lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 23,68%; Pertambangan dan Penggalian sebesar 10,36 %; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,80%; Informasi dan Komunikasi sebesar 8,56%; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,11%. Sedangkan 8 lapangan usaha mengalami kontraksi. Tiga lapangan usaha yang mengalami kontraksi terbesar yaitu lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 33,12%; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,05%; serta Konstruksi sebesar 8,47%.

Dilihat dari sumber pertumbuhan, ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar 4,86% (*c-to-c*) tersebut paling besar disumbang oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 5,46%, diikuti lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,62 persen, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 0,30%, serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,17%. Struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha tahun 2020 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu: Industri Pengolahan (27,61%); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (21,76%); Pertambangan dan Penggalian (13,40%); serta Konstruksi (10,14%).

Selama tahun 2020, perekonomian di Sulawesi Tengah terus dibayangi kontraksi atau tekanan yang menyebabkan pelemahan akibat adanya pandemi COVID-19 yang telah lebih dulu meluluhlantahkan perekonomian sejumlah wilayah di Indonesia dan negara lainnya. Pandemi ini menyebabkan *supply demand* terganggu sebagai akibat adanya penerapan protokol kesehatan, dikarenakan beberapa negara pengimpor menerapkan sistem *lockdown* membuat pengiriman barang memakan waktu yang lama hingga biaya pengiriman logistik pun bertambah dan berpengaruh terhadap harga jual barang impor. Di tingkat nasional ketersediaan barang pokok seperti cabai lebih dipengaruhi oleh faktor alam/cuaca, sedangkan ikan segar dipengaruhi oleh cuaca serta waktu pasang surutnya air laut.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjaga stabilisasi perekonomian di Sulawesi Tengah seperti dengan mengeluarkan surat edaran terkait prioritas BAPOK pada saat pengiriman logistik sehingga ketersediaan BAPOK di Sulawesi Tengah relatif aman. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sendiri selama tahun 2020 melakukan Pasar Murah dengan menerapkan protokol kesehatan guna menjaga stabilisasi harga BAPOK di Sulawesi Tengah. Selain Pasar Murah dilakukan juga operasi pasar gula saat harga jual gula melonjak di tahun 2020.

Pencapaian target kinerja presentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dipengaruhi oleh banyak faktor pada sektor-sektor perdagangan yang berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung pada pendapatan domestik regional bruto di tiap provinsi termasuk provinsi Sulawesi Tengah. Kontribusi sektor perdagangan tidak hanya disumbang oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda saja, namun sektor lain juga termasuk dalam perhitungan analisis kontribusi yang mempengaruhi PDRB seperti sektor transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan

dan asuransi, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya.

Sehingga kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, namun juga menjadi tanggung jawab bersama dengan Perangkat Daerah lain yang kewenangannya berkaitan langsung dengan sektor perekonomian. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya peran perdagangan dalam perekonomian Sulawesi Tengah, secara teknis pelaksanaannya dilimpahkan pada Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen sebagai salah satu bidang teknis di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi melalui Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri. Bidang Perdagangan Dalam Negeri berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang :

- a. Pengembangan sarana distribusi
- b. Pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- c. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

3. Ekspor Bersih Perdagangan

Indikator Kinerja ekspor bersih perdagangan ini didukung oleh program:

1. Program pengembangan dan pengamanan perdagangan dalam negeri.
2. Program pengembangan dan pengamanan perdagangan luar negeri.

Data ekspor bersih perdagangan 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.25
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja ekspor bersih
perdagangan Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020
terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Ekspor bersih perdagangan	US\$1.734,23	192,69%	US\$2.288.10	254,23%	US\$2.758,55	275,86%	US\$5.095,71	463,25%	US\$5.000,00	237,53%

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi ekspor bersih perdagangan selama 4 tahun berturut-turut mengalami peningkatan. Ekspor bersih perdagangan tahun 2017 tercatat sebesar US\$ 1.734.23 dengan capaian kinerja 192,69%, lalu pada tahun 2018 terealisasi sebesar US\$ 2.288.10 dengan capaian kinerja mencapai 254,23%. Kemudian pada tahun 2019 ekspor bersih perdagangan terealisasi sebesar US\$ 2.758.55 atau naik sebesar 20,56% dibanding tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2020 ekspor bersih perdagangan mengalami peningkatan yang signifikan 84,72% dibanding tahun 2019 dengan realisasi sebesar US\$5.095,71 dengan capaian kinerja 436,25%. Sehingga terhadap target akhir RPJMD, pencapaian tahun 2020 ini sebesar 237,53% melebihi target yang telah ditetapkan.

Selama Januari-Desember 2020, total nilai ekspor Sulawesi Tengah tercatat US\$ 7.480,65 juta atau meningkat US\$ 1.587,18 juta (26,93%) dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar US\$ 5.893,47 juta. Jika dirinci, ekspor melalui Sulawesi Tengah senilai US\$ 7.428,46 juta dan provinsi lain senilai US\$ 52,19 juta. Sementara jumlah nilai Impor selama Januari-Desember 2020, terjadi penurunan US\$ 749,98 juta atau sebesar 23,92% menjadi US\$ 2.384,94 juta dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dilihat dari neraca perdagangan dengan seluruh negara mitra dagang, Sulawesi Tengah mengalami surplus senilai US\$ 472,28 juta selama Desember 2020 dan surplus senilai US\$ 5.095,71 juta selama Januari-Desember 2020.

Selama Januari-Desember 2020, kelompok besi dan baja mendominasi pangsa eksporsenilai US\$ 6.408,39 juta atau 85,67% dari total ekspor dan bahan bakar mineral senilaiUS\$ 846,90 juta (11,32%). Sementara itu, kontribusi ekspor kelompok komoditaslainnya terhadap total ekspor masing-masing di bawah 2,00%.Peningkatan aktifitas ekspor, khususnya untuk komoditas besi dan baja, dimana kawasan industri morowali (KIM) Morowali memiliki sumbangsih paling besar dalam peningkatan ekspor Sulawesi Tengah tahun 2020, juga didukung oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dimana Perusahaan Mineral dapat melakukan Ekspor Nikel kualitas rendah yang sebelumnya dilarang. Perkembangan nilai dan volume ekspor dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.26
Ekspor berdasarkan Nilai Tahun 2013-2020 (US\$ Juta)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020**
Non Migas	276	46	283	647	1,924	3,632.92	4,771.60	6.633,75
- Hasil Industri	229	24	122	638	1,905	3,615.98	4,664.44	6.564,77
- Non Industri	46	22	161	9	19	16.94	107.16	68,98
Migas	22	35	200	623	1,098	1,476.26	1,121.87	846,9
Total Ekspor	297	81	482	1270	3,022	5,109.18	5,893.47	7.480,65

Sumber :Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2021

(** data sementara berdasar data BPS Ekspor-Impor Sulawesi Tengah Jan-Des Tahun 2020)

Adapun Laporan Ekspor tahun 2020 berdasarkan Dokumen SKA Sulawesi Tengahyang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, sebanyak US\$ 3.434,44Juta, sedangkan laporan ekspor tahun 2020 BPS Sulteng berdasarkan Dokumen PEB selama Januari-Desember 2020, tercatat sebesar US\$ 7.480,65 juta, melalui Sulawesi Tengah sebesar US\$ 7.428,46 juta dan provinsi lain senilai US\$ 52,19 juta dan dapat dilihat perkembangannya pada tabel Kinerja Ekspor Daerah tahun 2020 berikut :

Tabel 3.27
Kinerja Ekspor Daerah Tahun 2020 (US\$ Juta)

BULAN	BPS			SKA		
	NILAI EKSPOR (JUTA US\$)	IMPOR (JUTA US\$)	EKSPOR BERSIH (JUTA US\$)	NILAI EKSPOR (JUTA US\$)	FORM TERJUAL (SET)	NEGARA TUJUAN EKSPOR TERBANYAK
JANUARI	628,45	93,19	535,26	146,88	149	VIETNAM
FEBRUARI	512,90	216,99	295,91	93,92	102	RUSIA
MARET	641,28	165,16	476,12	464,53	301	VIETNAM
APRIL	563,30	111,06	452,24	664,65	272	VIETNAM
MEI	595,87	178,43	417,44	160,76	153	VIETNAM
JUNI	486,20	148,66	337,54	253,80	268	CHINA
JULI	595,33	159,54	435,79	372,64	178	VIETNAM
AGUSTUS	578,24	177,02	401,22	150,75	147	VIETNAM
SEPTEMBER	702,66	300,23	402,43	254,33	261	VIETNAM
OKTOBER	652,13	135,41	516,72	219,76	155	VIETNAM
NOPEMBER	707,48	354,71	352,77	353,37	209	VIETNAM
DESEMBER	816,82	344,54	472,28	299,05	219	VIETNAM
TOTAL	7.480,65	2.384,94	5.095,71	3.434,44	2.414	

Sumber : Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2021

Realisasi ekspor menurut negara tujuan berdasarkan Dokumen SKA Sulawesi Tengah tahun 2020, ekspor ke negara Vietnam mendominasi transaksi tahun 2020 dengan realisasi sebesar US\$ 3.086,72 Juta atau 89,87% dari total transaksi tahun 2020. Rekapitulasi ekspor menurut negara tujuan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.28
Rekapitulasi Ekspor menurut Negara Tujuan Tahun 2020 (SKA)

No	Negara	Jenis SKA	Jumlah Form	Jumlah Perusahaan	FOB	Volume
1	BELGIUM	FORM A	17	1	17.825.218,74	14.130,25
2	CANADA		2	1	117.453,43	62,12
3	GERMANY		9	1	3.989.153,61	1.417,10
4	ESTONIA		1	1	366.023,38	126.202,00
5	SPAIN		3	1	3.499.514,10	597,55
6	UNITED KINGDOM		3	1	534.611,24	306,84
7	ITALY		49	3	167.411.418,45	101.999,09

8	POLAND		25	2	10.992.498,30	66.940,86
9	SLOVENIA		2	1	324.132,94	161,4
10	UNITED STATES OF AMERICA		28	2	1.522.856,62	655.192,12
11	VIET NAM		54	1	14.202.521,59	8.604,18
12	UNITED ARAB EMIRATES	FORM B	9	2	853.356,84	491,72
13	ARGENTINA		1	1	41.523,23	21
14	AUSTRALIA		1	1	37.901,16	20,38
15	BELGIUM		2	1	209.035,18	41.528,79
16	BRAZIL		148	4	31.916.349,78	40.915,88
17	ESTONIA		2	1	754.691,50	363.113,00
18	UNITED KINGDOM		1	1	38.676,00	22.490,00
No	Negara	Jenis SKA	Jumlah Form	Jumlah Perusahaan	FOB	Volume
19	HONG KONG		2	2	202.620,11	125,97
20	KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF		8	2	3.631.531,73	2.031,57
21	REPUBLIC OF KOREA		40	3	9.761.930,68	5.684,95
22	SRI LANKA		8	1	528.822,00	439.450,00
23	RUSSIAN FEDERATION		184	3	48.066.423,16	8.488.378,04
24	SWAZILAND		2	2	450.873,28	211,44
25	TURKEY		76	4	41.561.887,60	258.576,55
26	TAIWAN		58	4	36.730.710,59	75.905,40
27	UKRAINE		1	1	92.292,43	48,64
28	VIET NAM		4	1	1.522.012,04	882,61
29	SOUTH AFRICA		2	1	99.600,00	48.980,00
30	MYANMAR	FORM D	14	1	10.663.696,58	22.936,47
31	MALAYSIA		132	6	260.005.682,06	199.810,76
32	PHILIPPINES		46	1	59.942.307,20	1.131.972,55
33	SINGAPORE		3	1	245.964,00	70.800,80
34	THAILAND		41	4	9.321.527,17	2.906.418,51
35	VIET NAM		330	8	238.468.728,39	5.287.434,37
36	REPUBLIC OF KOREA	FORM AK	41	2	946.429,36	517.382,08
37	CHINA	FORM E	402	15	1.758.042.551,20	38.465.458,85
38	MALAYSIA		5	1	12.465.000,00	4.521.200,00
39	SINGAPORE		2	2	2.435.947,00	613.521,39
40	VIET NAM		2	1	218.880,00	54.720,00
41	JAPAN	FORM IJEP	23	2	306.844,23	233.950,24

42	BRAZIL	FORM GSTP	1	1	49.005,00	24.632,00
43	AUSTRALIA	FORM AANZ	27	1	1.768.800,00	899.274,00
44	INDIA	FORM AI	15	2	75.092.003,09	521.915,04
45	MALAYSIA		5	1	3.819.000,00	1.371.600,00
46	SINGAPORE		17	2	3.601.669,71	407.741,95
47	VIET NAM		312	1	203.741.940,41	117.237,76
48	PAKISTAN	FORM IP	17	1	5.429.219,86	6.449,81
TOTAL			2177	103	3.043.850.834,95	68.138.925,99

Sumber : Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2021



Indikator Kinerja persentase pertumbuhan industri ini didukung oleh program:

1. Program penataan struktur industri
2. Program peningkatan kemampuan teknologi industri

Data persentase pertumbuhan industri 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.29
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja pertumbuhan industri Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Pertumbuhan Industri	7,20%	100%	8,21%	110,95%	19,42%	255,53%	11,08%	142,05%	8,00%	138,50%

Dari tabel diatas terlihat bahwa pertumbuhan industri di Sulawesi Tengah selama empat tahun berturut-turut mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2017 pertumbuhan industri tercatat sebesar 7,20% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Tahun 2018 terealisasi sebesar 8,21% dengan capaian kinerja 110,95% atau naik 1,01% dari tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2019 pertumbuhan industri terealisasi sebesar

19,42% dengan capaian kinerja mencapai 242,75% atau naik 11,21% dari tahun 2018 dan pada tahun 2020 pertumbuhan industri terealisasi sebesar 11,08% dengan capaian kinerja mencapai 142,05%. Capaian pertumbuhan industri tahun 2020 ini telah melampaui target akhir RPJMD, karena telah terealisasi sebesar 138,50%.

Berikut dapat dilihat perkembangan jumlah unit usaha industri di Sulawesi Tengah tahun 2019 dan tahun 2020.

Tabel 3.30
Jumlah Unit Usaha Industri Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Kelompok Industri

No.	Kelompok Industri	Unit Usaha Industri per-Tahun					Pertumbuhan Industri per-Tahun		Rata-rata Pertumbuhan Industri	
		2016	2017	2018	2019	2020*	2019	2020*	2019	2020*
1	Kecil	5.718	6.233	7.016	8.358	8.640				
2	Menengah	42	47	55	36	19				
3	Besar		37	43	50	68				
TOTAL		5760	6317	7114	8.444	8.727	18,70	3,35	13,66	11,08

(* data sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021)

Ada beberapa kabupaten yang pertumbuhan IKM nya meningkat karena adanya beberapa kawasan industri & industri besar yang dibangun seperti Kabupaten Morowali (PT. IMIP), Morut, Touna, Banggai (PT. Donggi Senoro LNG) sehingga memicu pertumbuhan disekitarnya.

Industri kecil menengah yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan adalah industri : pangan, furnitur, alat angkut, sandang, barang dari kayu, logam, kimia, mesin, kerajinan, aneka kemasan/percetakan dan elektronika.

Berikut Rekapitulasi unit usaha industri Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.31
Jumlah Unit Usaha Industri Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2017 - 2020

No	Kabupaten/Kota	Unit Usaha Tahun				Pertumbuhan (%) Tahun		Rata-Rata Pertumbuhan (%) Tahun	
		2017	2018	2019	2020*	2019	2020*	2019	2020*
1	Palu	1.259	1.367	1.515	1878	10,83	23,96	9,10	12,81
2	Donggala	533	574	633	648	10,28	2,37	8,05	6,63
3	Sigi	594	710	734	350	3,38	-52,32	9,85	-5,69
4	Parimo	287	318	393	445	23,58	13,23	15,50	14,93
5	Poso	501	536	574	583	7,09	1,57	7,04	5,67
6	Tojo Una-Una	575	623	803	1040	28,89	29,51	15,38	18,91
7	Morowali	660	714	740	632	3,64	-14,59	7,64	2,08
8	Banggai	125	145	206	308	42,07	49,51	24,25	30,57
9	Banggai Kepulauan	509	549	823	858	49,91	4,25	21,95	17,52
10	Tolitoli	408	622	657	367	5,63	-44,14	29,90	11,39
11	Buol	598	646	815	530	26,16	-34,97	14,31	1,99
12	Morowali Utara	215	248	276	273	11,29	-1,09	10,51	7,61
13	Banggai Laut	53	62	275	815	343,55	196,36	127,93	145,04
Total		6.317	7.114	8.444	8.727	18,70	3,35	13,66	11,08

(* data sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021)

Pada tahun 2020, terdapat peningkatan akumulasi jumlah unit usaha industri menjadi sebanyak 8.727 jika dibandingkan dengan jumlah unit industri tahun 2019 yang berjumlah sebanyak 8.444. Peningkatan signifikan ini terjadi seperti pada Kabupaten Banggai Laut, disebabkan baru terbentuknya dinas perindustrian dan perdagangan pada Kabupaten Banggai Laut, sehingga telah dilakukan pendataan yang menyeluruh di wilayah tersebut menyebabkan peningkatan akumulasi jumlah unit usaha industri yang telah terdaftar pada sistem SIINas. Selain Banggai Laut Kota Palu juga mengalami peningkatan jumlah unit usaha industri yang terdaftar pada sistem SIINas. Unit usaha industri yang mengalami peningkatan ini yaitu pada industri pengolahan pangan yang didukung dengan adanya sarana transportasi online yang memudahkan akses antara penjual dan pembeli olahan pangan.

Namun meski mengalami pertumbuhan, pada tahun 2020 hasil yang diperoleh lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Pertumbuhan industri pada tahun 2020 cenderung menurun dikarenakan banyak unit usaha

yang terkena dampak adanya pandemi covid-19. Seperti pada Tabel 3.30 dapat dilihat pada beberapa kabupaten pertumbuhan industrinya bernilai negatif atau dengan kata lain pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hasil capaian ini juga didukung dengan pencapaian 1 (Satu) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang **Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038** yang akan menjadi acuan Penyusunan RPIK di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Perda tersebut merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permenperind Nomor 110 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan RPIP/RPIK bahwa Gubernur dan Bupati / Walikota yang wilayah administrasinya memiliki Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian dan atau mempunyai potensi Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) / Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK). RPIP Sulteng merupakan pedoman bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam menunjang pelaksanaan pembangunan industri, serta tolok ukur kemajuan dan keberhasilan pembangunan industri dalam jangka waktu 20 tahun yang dapat ditinjau dan di evaluasi kembali setiap 5 tahun.

Keberhasilan capaian sasaran strategis terwujudnya industri yang tangguh, professional dan mandiri, juga berkaitan erat dengan kesiapan SDM Sulawesi Tengah menghadapi tantangan di era Industri 4.0, sebuah strategi Indonesia untuk mencapai 10 Besar Ekonomi Dunia di Tahun 2030.

Program Strategi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam menghadapi tantangan di era Industri 4.0 :

1. Meningkatkan Skill/SDM Para Pelaku IKM yang ada di daerah
2. Memfasilitasi Para IKM berkaitan dengan Legal, Produk dan Pasar
3. Memfasilitasi Para IKM untuk masuk ke market place
4. Memberikan Pendampingan/Mentoring Kepada Para Pelaku IKM

5. Melakukan Workshop/Pelatihan Kewirausahaan bagi para Alumni SMK/Perguruan Tinggi/Masyarakat Umum
6. Mendirikan Pusat Inkubator Bisnis Teknologi Informasi

SASARAN STRATEGIS 9

Meningkatnya Nilai dan Realisasi Investasi

Indikator Kinerja Nilai realisasi investasi PMDN & PMA ini didukung oleh program:

1. Program peningkatan kualitas perencanaan.
2. Program peningkatan daya saing penanaman modal.
3. Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan.

Data realisasi investasi PMDN dan PMA 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.32
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja nilai realisasi investasi PMDN dan PMA Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp. 000.000)	Rp1.929.657.000.000	175,42%	Rp12.689.562.560.000	1046%	Rp4.438.790.800.000	333%	Rp5.261.315.800.000	1052%	Rp6.250.000.000.000	84,18%
2	PMA (Rp. 000.000)	Rp16.335.000.000.000	110%	Rp9.010.437.440.000	55,16%	Rp27.075.580.350.000	151%	Rp25.617.411.570.000	1066%	Rp16.940.000.000.000	151,22%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi kinerja nilai investasi PMDN selama 4 tahun berturut-turut mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 nilai investasi PMDN tercatat sebesar Rp 1.929.657.000.000,- dengan capaian kinerja 175,42%. Kemudian tahun 2018 nilai investasi PMDN tercatat sebesar Rp 12.689.562.560.000,- dengan capaian kinerja mencapai 1.046% atau terjadi kenaikan 557,60% dibandingkan realisasi tahun 2017. Selanjutnya nilai investasi PMDN tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 4.438.790.800.000,- dengan capaian kinerja 333%, turun 185,87% dibandingkan realisasi tahun 2018. Pada tahun 2020 terealisasi sebesar

Rp 5.261.315.800.000,- dengan capaian kinerja 1052%. Capaian realisasi nilai investasi PMDN tahun 2020 ini telah memberikan kontribusi sebesar 84,18% dari target akhir RPJMD tahun 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 6.250.000.000.000,-

Sementara untuk nilai investasi PMA selama 4 tahun berturut-turut juga mengalami fluktuasi, dimana tahun 2017 nilai investasi PMA tercatat sebesar Rp. 16.335.000.000.000,- dengan capaian kinerja 110%. Tahun 2018 nilai investasi PMA terealisasi sebesar Rp. 9.010.437.440.000,- dengan persentase capaian hanya sebesar 55,16% atau turun 81,30% dibandingkan realisasi tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2019 nilai investasi PMA tercatat naik hingga 200,49% dibandingkan tahun 2018, dimana nilai investasi PMA terealisasi sebesar Rp. 27.075.580.350.000,- dengan capaian kinerja mencapai 151%. Kemudian pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 25.617.411.570.000,- dengan capaian kinerja 1066%. Realisasi kinerja tahun 2020 terhadap RPJMD tahun 2021 telah mencapai 151,22% yang artinya telah melebihi target yang ditargetkan sebesar Rp. 16.940.000.000.000,-

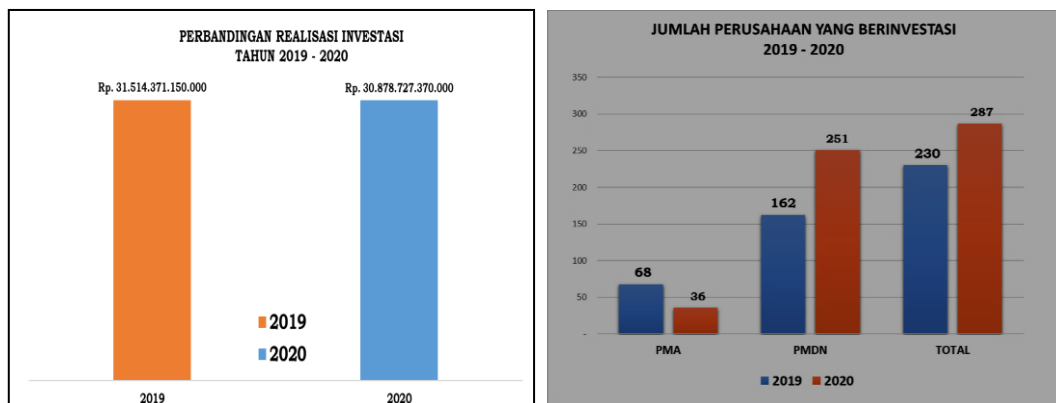
Pemicu pencapaian nilai investasi PMDN dan PMA tahun 2020 yang melebihi target tersebut adalah banyaknya jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Sulawesi Tengah. Terdapat 251 perusahaan PMDN yang baru masuk dari target 4 perusahaan dengan capaian kinerja 6.275% dan 36 perusahaan PMA yang masuk dari target 4 perusahaan dengan capaian kinerja 900%. Sedangkan jika dilihat dari dokumen perizinan yang dikeluarkan pada tahun 2020 telah terealisasi sebanyak 1.197 dokumen perizinan dengan persentase capaian 239% dari target 500 dokumen. Waktu proses pembuatan proses perizinan di tahun 2020 juga telah mencapai target yaitu 100 % dengan proses perizinan khusus izin usaha dapat diselesaikan dalam waktu 1-15 hari, Izin Non Usaha dapat diselesaikan dalam waktu 1-4 hari kerja dan harapannya pada masa akhir RPJMD tahun 2021 akan mencapai target yang telah ditetapkan yakni 10 hari kerja untuk izin usaha dan 3 hari kerja untuk izin non Usaha. Kualitas

pelayanan yang diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga telah memenuhi target dengan kategori sangat baik.

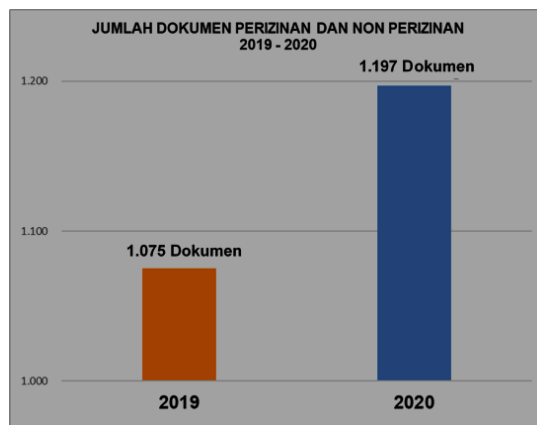
Data perbandingan realisasi investasi, jumlah perusahaan yang berinvestasi, jumlah dokumen perizinan yang dikeluarkan dan Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 dan 2020 tergambar pada gambar berikut ini :

Gambar 3.9

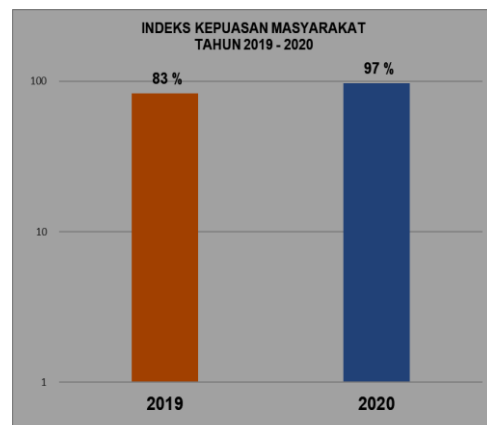
Perbandingan Realisasi Investasi dan Perbandingan Perusahaan Yang Masuk



Perbandingan dokumen perizinan dan non perizinan



Perbandingan Nilai IKM (%)



Sumber: DPMPTSP Prov. Sulteng, 2021

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan realisasi investasi di Sulawesi Tengah antara lain sebagai berikut :

- Perencanaan pengembangan penanaman modal yang bertujuan agar terciptanya kesamaan visi diantara instansi terkait dan *stakeholder* mengenai arah kebijakan dan strategi pengembangan penanaman

modal, serta penyusunan dan pemetaan potensi unggulan serta komoditi unggulan Provinsi Sulawesi Tengah.

- Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Promosi dan Investasi bertujuan untuk menginformasikan potensi dan peluang investasi 5 (lima) komoditi unggulan Sulawesi Tengah melalui kegiatan-kegiatan pameran investasi. Melalui kegiatan-kegiatan pameran ini terjalin interaksi langsung antara Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dengan para calon investor, pengusaha, penyedia teknologi, maupun konsumen langsung.
- Penyelenggaraan fasilitasi penyelesaian masalah dan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan penanaman modal dan meningkatnya kualitas SDM aparatur akan tata kelola penanaman modal di lingkup wilayah Sulawesi Tengah. Selain itu juga melakukan evaluasi serta pembinaan tentang Pemanfaatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) baik secara manual maupun secara online dengan instansi terkait di kabupaten/kota.
- Melakukan kegiatan koordinasi dan fasilitasi kemitraan dunia usaha yang bertujuan untuk memfasilitasi pemberdayaan dan kemitraan usaha daerah. Kegiatan koordinasi dan fasilitasi dunia usaha ini menitik beratkan pada membantu mitra usaha untuk dapat memasarkan hasil usahanya sekaligus menjadi potensi utama komoditi Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini dilakukan dengan membentuk satu aplikasi yang bertajuk e-kaledos yang merupakan aplikasi yang memuat beberapa potensi hasil dari usaha.
- Kegiatan peningkatan kualitas strategi dan pengembangan promosi penanaman modal yang berkaitan dengan pengkajian strategi promosi yang hendak dikembangkan. Tujuan kegiatan ini adalah bagaimana menganalisa keunggulan dan potensi yang akan dijadikan sebagai pencitraan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Pengolahan dan penyusunan data penanaman modal modal perizinan dan non perizinan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan data

dan informasi penanaman modal yang bersumber dari perizinan dan non perizinan.

- Penyediaan sarana dan prasarana penanaman modal yang merupakan kegiatan dalam rangka menyediakan bahan informasi potensi penanaman modal berupa brosur, majalah, video dan multimedia lainnya dalam mendukung kualitas penyelenggaraan promosi penanaman modal. Tujuan kegiatan ini adalah menyediakan bahan promosi penanaman. Target kegiatan ini meningkatkan kualitas penyelenggaraan pameran dan penyediaan sarana promosi penanaman modal. Realisasi target kinerja kegiatan penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal berupa informasi potensi penanaman modal berupa brosur, majalah, video dan multimedia.
- Kegiatan Fasilitasi Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal yaitu kegiatan pengkajian pengembangan iklim penanaman modal di daerah, termasuk peraturan-peraturan terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan kajian-kajian kebijakan penanaman modal dan kemudahan berusaha di Provinsi Sulawesi Tengah.
- Penyelenggaraan Pengawasan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal merupakan kegiatan guna mengetahui seberapa banyak perusahaan yang mendapat fasilitas penanaman modal. Tujuannya yaitu untuk mengetahui jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan fasilitas penanaman modal yang telah diberikan.
- Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Promosi Investasi Daerah (SIPID) yang bertujuan untuk menyediakan informasi potensi investasi daerah yang akurat dan *up-date* yang ditampilkan dalam bentuk website, sebagai salah satu sarana informasi bagi investor potensial untuk memantau potensi investasi di Sulawesi Tengah.
- Pemantauan perkembangan realisasi penanaman modal merupakan kegiatan guna mengetahui kendala dan masalah yang dihadapi oleh

penanaman modal baik asing maupun dalam negeri dalam menjalankan usahanya melalui rapat koordinasi penanaman modal terkait pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

- Penyusunan Analisis dan Evaluasi Data penanaman Modal Perizinan dan Non Perizinan yang bertujuan untuk menyediakan hasil analisa data penanaman modal serat perizinan dan Non Perizinan sebagai bahan untuk evaluasi arah investasi penanaman modal baik dari segi sektor maupun bidang investasi.
- Penyusunan peta potensi investasi daerah yang bertujuan untuk menyediakan informasi potensi yang akurat dan *up-date* yang melalui aplikasi Geografi informasi sistem (GIS). kegiatan pengembangan aplikasi GIS merupakan salah satu kegiatan utamanya untuk mengupdate kebutuhan aplikasi dalam menyediakan informasi peta potensi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada tahun 2020 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia menargetkan realisasi investasi untuk Provinsi Sulawesi Tengah cukup besar yaitu Rp. 24,20 Triliun, yang memacu Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP melakukan kerja keras dalam upaya peningkatan realisasi investasi di Sulawesi Tengah walaupun dalam situasi dan kondisi pandemi Covid-19 sehingga target pusat tersebut dapat dicapai dengan baik bahkan jauh melebihi target, dengan nilai total realisasi investasi sebesar Rp.30,80 Triliun atau 127% dari target realisasi BKPM RI.

Selanjutnya untuk Prestasi dan Penghargaan di Tingkat Nasional Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendapatkan penghargaan sebagai berikut :

1. Penghargaan sebagai Peringkat Pertama (Terbaik I) Tingkat Nasional pada Lomba Inovasi Daerah Dalam Penyiapan dan Rencana Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 Tahun 2020 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

2. Penghargaan kepada Provinsi Sulawesi Tengah “*The Outstanding Leader In Investment*” dari CNBC Indonesia Award 2020.
3. Penghargaan kepada Provinsi Sulawesi Tengah tentang “Peningkatan Layanan Publik” Inews Indonesia Award 2020” dari iNEWS.

SASARAN STRATEGIS 10

Meningkatnya Kesejahteraan Gender Dalam Pembangunan Ekonomi

Sasaran Strategis 10 “Meningkatnya Kesejahteraan Gender Dalam Pembangunan Ekonomi” memiliki 2 indikator kinerja, yaitu Peningkatan indeks pembangunan gender (IPG) dan Peningkatan indeks pemberdayaan gender (IDG). Rinciannya sebagai berikut :

1. Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) ini didukung dengan program peningkatan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan. Data capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.33
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Peningkatan Indeks Pembangunan Gender Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,66%	100%	92,08%	100%	92,20%	100%	92,43%	100%	93,00%	99,38%

Gambar diatas menunjukkan bahwa Peningkatan Indeks Pembangunan Gender di Sulawesi Tengah terus meningkat selama 4 tahun berturut-turut. Pada tahun 2017 Peningkatan Indeks Pembangunan Gender terealisasi sebesar 91,66% dengan persentase capaian 100%, lalu pada tahun 2018 terealisasi sebesar 92,08% dengan persentase capaian 100%. Selanjutnya tahun 2019 Indeks Pembangunan Gender terealisasi sebesar 92,20% dengan persentase capaian 100, lalu pada tahun 2020 terealisasi sebesar 92,43% dengan persentase capaian 100%. Sementara

untuk target akhir RPJMD tahun 2021 capaian Indeks Pembangunan Gender telah mencapai 99,38%.

Berdasarkan data dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah bulan September 2020, menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di lembaga legislatif khususnya di Tingkat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, belum mencapai 30%, yaitu berjumlah 12 orang atau 27% dan laki-laki 33 orang. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di lembaga legislatif sesuai ketentuan masih kurang 3%.

Meskipun keterlibatan perempuan di ranah politik sudah mulai kelihatan dan diakui eksistensinya, namun jika dibandingkan dengan keterlibatan laki-laki memang masih belum menunjukkan kesetaraan, khususnya pada beberapa aspek pembangunan. Disamping itu juga, pada tahun 2020 masih belum bergeser eksistensi perempuan dalam bidang legislatif, hal ini dapat dilihat dari pencapaian realisasi kinerja keuangan yang disebabkan karena dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi selama setahun, sehingga pelaksanaan program kegiatan, tidak maksimal hanya dilakukan secara daring (*Zoom Meeting*).

Upaya kedepan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di legislatif perlunya melakukan peningkatan pemahaman melalui sosialisasi politik dan pelatihan politik bagi perempuan dan penguatan politik perempuan yang berdaya saing, sehingga kuota 30% di parlemen dapat dioptimalkan dengan terwujudnya peningkatan partisipasi perempuan di Parlemen setiap tahunnya.

2. Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator kinerja peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ini didukung oleh program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan. Data capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.34
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Peningkatan
Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan
capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,38%	100%	73,95%	100%	74,50%	100%	75,50%	100%	76,00- 77,00 %	98,05%

Data peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dimana realisasi kinerjanya juga terus mengalami peningkatan selama 4 tahun berturut-turut. Tahun 2017 Indeks Pemberdayaan Gender tercatat sebesar 70,38% dengan persentase capaian kinerja 100%. Tahun 2018 Indeks Pemberdayaan Gender terealisasi sebesar 73,95% dengan persentase capaian 100% atau naik 5,07% dibandingkan tahun 2017. Kemudian pada tahun 2019 terealisasi sebesar 74,50% dengan persentase capaian 100%, lalu pada tahun 2020 Indeks Pemberdayaan Gender terealisasi sebesar 75,50% dengan persentase capaian 100%. Sementara untuk target akhir RPJMD tahun 2021, capaian Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2020 ini telah mencapai 98,05%.

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Berbagai hal telah dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan gender yang antara lain melalui kegiatan-kegiatan seperti Pengembangan forum peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (PPEP) dan pembinaan Industri Rumahan Perempuan, Fasilitasi Forum Peningkatan

Kualitas Hidup Perempuan dan sosialisasi percepatan pemberantasan buta aksara perempuan, Bimbingan teknis manajemen usaha dan keterampilan bagi perempuan dalam mengelola usaha dan Pencegahan dampak negatif lingkungan yang responsif gender.



Indikator meningkatnya jumlah wisatawan ini didukung oleh program :

- Program pengembangan pemasaran pariwisata
- Program pengembangan destinasi pariwisata
- Program Pengembangan industri pariwisata
- Program pengembangan kelembagaan pariwisata

Data jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.35
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Jumlah kunjungan wisman dan wisnus Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	63.207 Org	341%	25.471 Org	135%	24.660 Org	126%	11.921 Org	59,60%	21.500 Org	55,44%
2	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	3.200.614 Org	100,02%	3.432.178 Org	99%	3.090.171 Org	86%	1.812.995 Org	47,7%	4.000.000 Org	45,32%

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Tengah mengalami fluktuasi. Tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 63.207 orang dengan persentase capaian 341%. Kemudian tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Tengah tercatat sebanyak 25.741 orang dengan persentase capaian 135%. Lalu pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan yang disebabkan adanya bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang melanda Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten

Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong sehingga jumlah kunjungan hanya sebanyak 24.660 orang dengan capaian kinerja 126% atau turun 7,14% dari tahun 2018.

Selanjutnya untuk tahun 2020 adalah tahun dimana sektor pariwisata mengalami dampak yang sangat signifikan akibat merebak dan menyebarnya pandemi virus corona (covid-19). Kunjungan wisatawan mancanegara hanya berjumlah 11.921 orang dengan capaian kinerja 59,60% atau turun 70,44% dari tahun 2019, sangat jauh mengalami penyusutan dan ini terjadi secara global di seluruh dunia. Mobilitas masyarakat yang terbatas dengan diberlakukannya *lockdown* di mancanegara dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di dalam negeri serta penutupan berbagai tempat rekreasi dan wisata sebagai bentuk antisipasi penyebaran pandemi, berimbas besar terhadap perputaran roda ekonomi, termasuk juga pada pengurangan tenaga kerja di sektor pariwisata. Adapun terhadap target akhir RPJMD tahun 2021, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2020 ini hanya memberikan kontribusi sebesar 55,44%.

Selanjutnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Sulawesi Tengah selama 4 tahun berturut-turut mengalami fluktuasi. Tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan nusantara tercatat sebanyak 3.200.614 orang dan persentase capaian kinerja 100,02%. Kemudian tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan nusantara tercatat sebanyak 3.432.178 orang dan persentase capaian kinerja 99%. Pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan nusantara menurun menjadi 3.090.171 orang dengan capaian kinerja 86%, terjadi penurunan 11,06% dari tahun 2018. Seperti halnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan nusantara pun terimbas dengan adanya pandemi covid-19, yakni hanya sebesar 1.812.995 orang dengan capaian kinerja 47,7% atau turun 70,44% dari tahun 2019. Terhadap target RPJMD 2021, jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun 2020 baru mencapai 45,32%.

Perencanaan pembangunan pariwisata Sulawesi Tengah memerlukan sebuah analisis faktor lingkungan internal berupa kekuatan (Strength) dan kelemahan (weaknesses) dan juga perlu memperhatikan faktor lingkungan eksternal yang meliputi peluang (opportunities) dan tantangan (threats). Untuk mengembangkan sektor pariwisata di Sulawesi Tengah, kedua faktor ini sangat diperlukan untuk mengetahui peluang serta kendala apa saja yang harus dipertimbangkan untuk selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam tahap selanjutnya yaitu perencanaan.

1. Kekuatan (Strengths)

- Posisi geografis Sulawesi Tengah yang berada pada kawasan garis khatulistiwa.
- Posisi Sulawesi Tengah sangat strategis karena diapit oleh 2 daerah tujuan wisata yang sudah maju yaitu Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.
- Potensi sumber daya alam dan budaya yang sangat beragam dan memadai untuk mengembangkan sektor kepariwisataan.
- Tersedianya obyek wisata alam dan budaya yang unik dan menarik, bervariasi, dan sebagian masih asli dan alami.
- Memiliki keragaman budaya yang tersebar di 12 etnis pada 12 Kabupaten dan 1 Kota.
- Bertambahnya jumlah usaha wisata karena adanya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk berinvestasi di bidang pariwisata.
- Adanya dukungan pemerintah daerah untuk lebih giat mengembangkan pariwisata di daerah Sulawesi Tengah.
- Adanya kerjasama yang baik bidang promosi pariwisata antara pemerintah, pemerintah daerah dan swasta yang semakin meningkat.
- Komitmen pemerintah untuk mendukung pariwisata.
- Pengembangan potensi wisata Geowisata, Geopark dan Cagar Biosfer.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- Kualitas kemampuan SDM professional bidang pariwisata belum optimal.
- Ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata masih terbatas meliputi aksesibilitas dana menitas.
- Database pariwisata yang tersedia belum mampu mendukung kebutuhan dalam proses pengambilan keputusan untuk pengembangan sektor pariwisata.
- Belum optimalnya pengelolaan destinasi, khususnya dalam pengemasan daya tarik wisata kedalam produk wisata dan paket-paket wisata.
- Bandara Mutiara Sis Aldjufri belum menjadi Bandara Internasional dan tidak beroperasinya Bandara Tanjung Api Kab.Tojo Una-Una.
- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan keragaman seni budaya berupa asset seni dan film nasional menjadi sebuah produk yang siap saji.
- Promosi dan pemasaran produk pariwisata belum terlaksana secara optimal dan terpadu diantara pihak yang terkait.
- Adanya krisis nilai budaya yang berdampak pada nilai-nilai solidaritas sosial, keramahmatan, rasa cinta tanah air dan jati diri bangsa yang cenderung menurun.

2. Peluang (*Opportunities*)

- Adanya komitmen pemerintah menjadikan Sektor Pariwisata sebagai salah satu sumber utama devisa negara.
- Kondisi keamanan daerah Sulawesi Tengah semakin kondusif dan terbukanya peluang berinvestasi di sektor pariwisata.
- Meningkatnya minat masyarakat internasional untuk mengadakan perjalanan wisata.
- Adanya objek wisata unggulan yang memiliki daya tarik dan keunikan.
- Makin matangnya tingkat kehidupan berdemokrasi, sehingga

membuka kesempatan besar bagi seniman dan budayawan dalam menciptakan karya seni dan film.

- Meningkatnya jumlah lembaga/ swasta/ masyarakat luar negeri yang tertarik akan kekayaan budaya bangsa baik berupa peninggalan sejarah purbakala dan budaya bangsa maupun budaya non material (*intangible*).
- Kondisi pemerintahan yang semakin stabil, sehingga memberikan peluang lebih besar untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan infrastruktur kepariwisataan.
- Tahun 2020 merupakan tahun ujian bagi Indonesia dan dunia karena adanya Pandemi virus covid-19. Tetapi masa pandemi juga menciptakan peluang- peluang usaha ekonomi baru mulai dari bisnis penjualan secara online, yang berdampak terhadap peningkatan penggunaan jasa kurir barang. Mobilitas masyarakat yang terbatas untuk keluar rumah menjadi peluang rezeki bagi transportasi online. Adanya tatanan kehidupan baru yang mengharuskan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan, menjadi berkah bagi usaha pembuatan masker kain dan masih banyak peluang lainnya yang dapat kita ciptakan.

3. Ancaman (*Threats*)

- Persaingan yang semakin tinggi antara Negara khususnya ASEAN dalam upaya menarik wisatawan mancanegara sebanyak-banyaknya.
- Masih terbatasnya sarana infrastruktur dan aksesibilitas ke lokasi objek wisata.
- Kekayaan budaya bangsa baik yang berupa benda (*tangible*) dan yang bukan benda (*intangible*) belum dikelola secara sinergis dalam rangka pembangunan nasional.
- Masih lemahnya kemampuan SDM pengelola kekayaan budaya baik di tingkat pusat, daerah dan masyarakat.
- Lajunya pembangunan ekonomi yang kurang diimbangi oleh pembangunan karakter bangsa dan mengakibatkan krisis budaya

yang selanjutnya memperlemah jati diri bangsa (nasional) dan ketahanan budaya.

- Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan masyarakat tapi juga berimbas ke semua sendi kehidupan lainnya. Penurunan kualitas kesehatan masyarakat, terhambatnya pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan kepariwisataan, menjadi ancaman bagi masa depan bangsa.

Solusi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata khususnya dimasa pandemi Covid-19 antara lain :

- Dengan mendorong terciptanya kreasi dan kreatifitas masyarakat agar dapat meningkatkan pendapatan, dengan melaksanakan beberapa pelatihan ketrampilan usaha.
- Demikian pula untuk mendukung program Pemerintah dalam penanganan covid-19, dilaksanakan pembagian perlengkapan kebersihan dan kesehatan kepada masyarakat khususnya pada obyek-obyek wisata seperti masker kain, hand sanitizer, desinfektan, tissue basah dan suplemen vitamin.



Sasaran Strategis 12 “Terciptanya Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja” memiliki 2 indikator kinerja, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Rinciannya sebagai berikut :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Data dan capaian tingkat pengangguran terbuka (TPT) 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut :

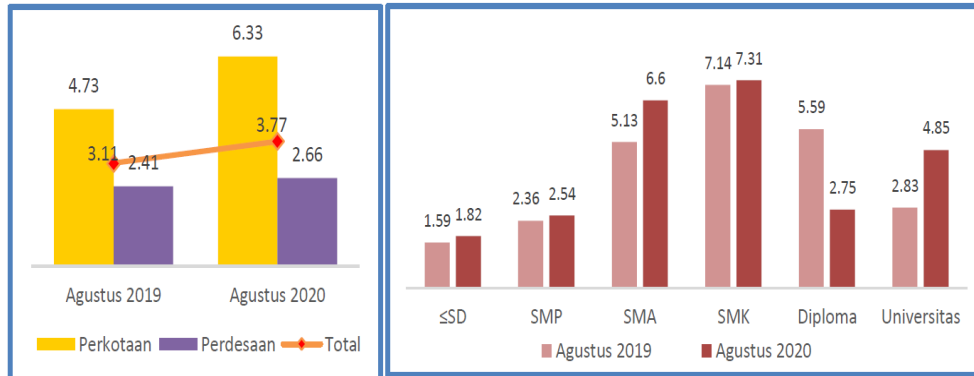
Gambar 3.10
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tingkat pengangguran terbuka Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD



Gambar diatas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka selama 4 tahun berturut-turut mengalami fluktuasi. Tahun 2017 realisasi tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,81% dengan capaian kinerja 88,3%. Sedangkan tahun 2018 realisasi tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,43% dengan capaian kinerja mencapai 99.71% (penurunan 11.07% dari tahun 2017). Sedangkan pada tahun 2019 realisasi tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,15% dengan capaian kinerja 90% atau terjadi penurunan 8,8% dari tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2020 realisasi tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,77% dengan capaian kinerja mencapai 84%. Pencapaian tahun 2020 ini telah memberikan kontribusi 74,33% dari target akhir RPJMD tahun 2021.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Gambar dibawah ini menunjukkan perkembangan TPT menurut daerah tempat tinggal dan menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada periode 2019-2020.

Gambar 3.11
Perkembangan TPT menurut daerah tempat tinggal dan menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada periode 2019-2020



Sumber: BPS Prov. Sulteng, 2020

Dari gambar diatas terlihat bahwa TPT di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan TPT di perdesaan. Pada Agustus 2020, TPT di perkotaan sebesar 6,33 persen, sedangkan TPT di perdesaan sebesar 2,66 persen. Dibandingkan setahun yang lalu, terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka di daerah perkotaan sebesar 1,60 persen poin, begitu juga dengan TPT di perdesaan yang meningkat 0,25 persen poin.

Dilihat dari tingkat pendidikan pada Agustus 2020, TPT pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 7,31 persen, kemudian diikuti oleh Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 6,6 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang lebih terutama pada tingkat pendidikan SMK dan SMA.

Mereka yang berpendidikan rendah, cenderung mau menerima pekerjaan yang tersedia di pasar kerja, dapat dilihat dari TPT untuk pendidikan SD ke bawah memiliki nilai paling kecil diantara semua tingkat pendidikan yaitu sebesar 1,82 persen. Pada Agustus 2020 jika dibandingkan kondisi setahun yang lalu, TPT yang mengalami penurunan terjadi pada tingkat pendidikan Diploma I/II/III, sedangkan peningkatan terjadi pada tingkat pendidikan SD kebawah, SMP, SMA, SMK, dan Universitas.

Tabel berikut menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (persen) periode Agustus 2019 - Agustus 2020.

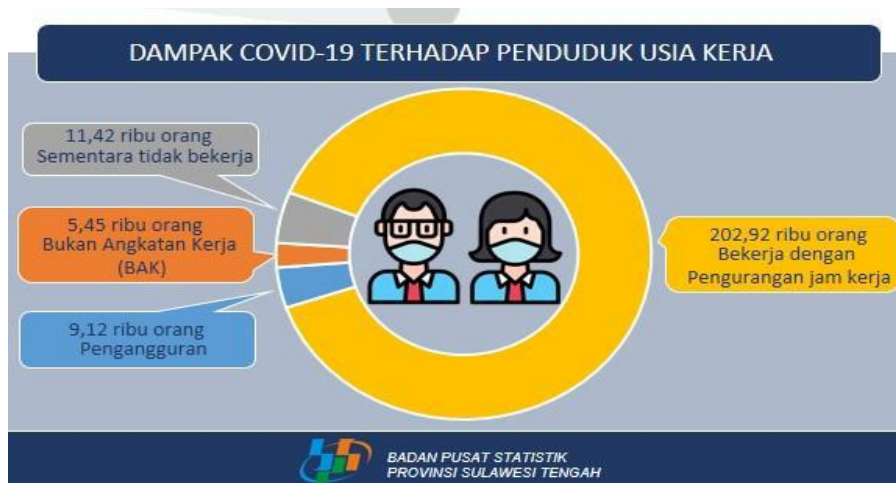
Tabel 3.36
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (persen) periode Agustus 2019 - Agustus 2020

Kabupaten/Kota	TPAK			TPT		
	2019	2020	Perubahan	2019	2020	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7201 Banggai Kepulauan	73,66	72,97	-0,69	2,00	2,47	0,47
7202 Banggai	67,11	69,79	2,68	2,18	2,42	0,24
7203 Morowali	62,96	64,70	1,74	2,97	5,21	2,24
7204 Poso	72,6	74,78	2,18	2,18	2,39	0,21
7205 Donggala	65,69	63,93	-1,76	2,76	2,58	-0,18
7206 Toli-Toli	62,38	65,95	3,57	3,10	3,74	0,64
7207 Buol	67,14	69,75	2,61	3,01	4,36	0,35
7208 Parigi Moutong	68,30	72,50	4,20	2,36	2,70	0,34
7209 Tojo Una-Una	78,69	75,33	-3,36	2,92	2,84	-0,08
7210 Sigi	69,16	69,24	0,08	2,54	3,36	0,82
7211 Banggai Laut	65,41	67,20	1,79	3,04	3,09	0,05
7212 Morowali Utara	65,76	69,85	4,09	3,05	5,16	2,11
7271 Palu	65,63	66,46	0,83	6,32	8,38	2,06
Total	67,80	69,44	1,64	3,11	3,77	0,66

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2020

Dengan adanya pandemi covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Penurunan yang sempat terjadi pada triwulan II berdampak pada dinamika ketenagakerjaan. Namun pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah sudah berangsur pulih pada triwulan III. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.

Gambar 3.12
Dampak Covid-19 Keadaan Ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah
Periode Agustus 2020



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2020

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) ini didukung oleh program :

- Program Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktifitas.
- Program penempatan dan perluasan kesempatan kerja.

Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.37
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan
capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,14%	90,12%	69,52%	92,39%	67,59%	92,52%	69,44%	90,47%	70,01%	99,18%

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tahun 2017 realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sulawesi Tengah 67,14% dengan capaian kinerja 90,12%, kemudian tahun 2018 naik sebesar 2,37% sehingga Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2018 terealisasi sebesar 69,52%

dengan capaian kinerja 92,39%. Pada tahun 2019 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tercatat sebesar 67,59% dengan capaian kinerja 92,52% atau turun 1,93% dibandingkan tahun 2018. Selanjutnya pada kondisi Bulan Agustus 2020 terealisasi sebesar 69,44% dengan capaian kinerja 90,47%. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2020 ini telah memberikan kontribusi sebesar 99,18%.

Pada Agustus 2020 tercatat jumlah Angkatan Kerja Sulawesi Tengah sebanyak 1,58 juta orang, mengalami peningkatan sebanyak 62,69 ribu orang dibanding Agustus 2019. Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2020 sebanyak 1,52 juta orang, meningkat sebanyak 50,31 ribu orang dibanding keadaan setahun yang lalu. Beberapa hal yang menyebabkan kondisi meningkatnya penduduk yang bekerja adalah musim panen di berbagai daerah sehingga banyak menyerap tenaga kerja, selain itu adanya perusahaan pertambangan juga banyak menyerap tenaga kerja yang ada. Sementara itu, jumlah pengangguran sebanyak 59,38 ribu orang, mengalami peningkatan sekitar 12,39 ribu orang dibanding setahun yang lalu. Hal ini merupakan sebagian dari dampak adanya pandemi Covid-19.

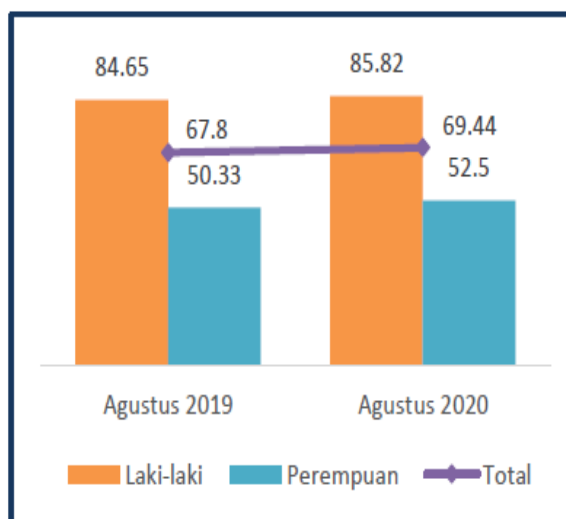
Tabel 3.38
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama
2019 – 2020

Status Keadaan Ketenagakerjaan	1 Tahun lalu Agustus 2019 (ribu orang)	Saat ini Agustus 2020 (ribu orang)	Perubahan 1 Tahunan (Agust 2019- Agust 2020)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penduduk Usia Kerja	2 231,72	2 269,14	37,43	1,68
Angkatan Kerja	1 513,04	1 575,73	62,69	4,14
Bekerja	1 466,04	1 516,35	50,31	3,43
Pengangguran	46,99	59,38	12,39	26,36
Bukan Angkatan Kerja	718,68	693,42	-25,27	-3,52
	Persen	Persen	Persen Poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,11	3,77	0,66	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,8	69,44	1,64	

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2020

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Agustus 2019. TPAK pada Agustus 2020 tercatat sebesar 69,44 persen, meningkat 1,64 persen poin dibanding setahun yang lalu. Peningkatan TPAK memberikan indikasi adanya peningkatan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja. Berikut disajikan perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin tahun 2019-2020.

Gambar 3.13
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Menurut Jenis Kelamin di Sulawesi Tengah, 2019-2020



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2020

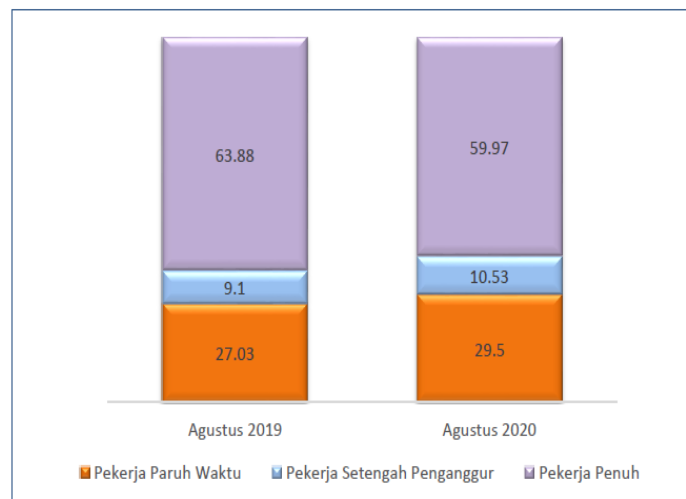
Dari gambar diatas nampak bahwa berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2020, TPAK laki-laki sebesar 85,82 persen, sementara TPAK perempuan hanya 52,50 persen. Dibandingkan kondisi setahun yang lalu, TPAK laki-laki meningkat 1,17 persen poin dan TPAK Perempuan juga mengalami peningkatan sebesar 2,17 persen poin.

Indikator lain yang lebih mendalam menyangkut angkatan kerja adalah pekerja penuh dan pekerja tidak penuh. Indikator ini mampu menjelaskan bahwa tidak semua penduduk bekerja memiliki produktivitas yang tinggi, diindikasikan oleh perbedaan jam kerja. Pekerja tidak penuh terbagi

menjadi dua kelompok yaitu pekerja setengah penganggur dan pekerja paruh waktu.

Persentase pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam perminggu) pada Agustus 2020 sebesar 59,97 persen mengalami penurunan jika dibandingkan keadaan Agustus 2019 (63,88 persen). Sedangkan persentase pekerja tidak penuh sebesar 40,03 persen meningkat sebesar 3,90 persen poin jika dibandingkan Agustus 2019 (36,13 persen). Sementara itu, pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua yaitu pekerja paruh waktu (27,03 persen) dan pekerja setengah penganggur (9,10 persen) pada keadaan Agustus 2020.

Gambar 3.14
Persentase Pekerja Penuh, Setengah Penganggur dan Paruh Waktu
Sulawesi Tengah, 2019-2020



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2020

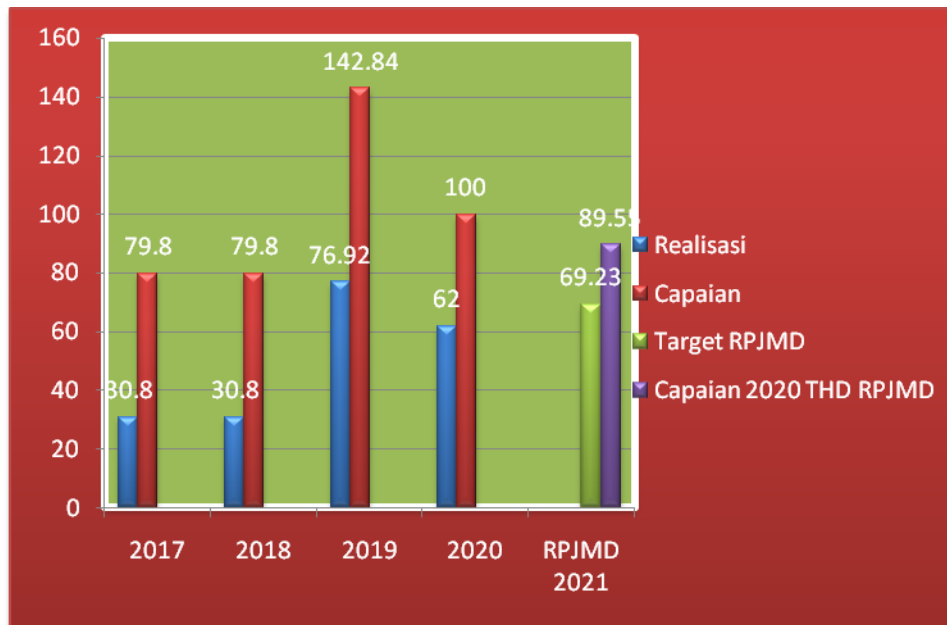
**SASARAN
STRATEGIS 13**

**Terbukanya Keterisolasian Daerah-daerah
Terpencil**

Sasaran terbukanya keterisolasian daerah-daerah terpencil yang diukur dengan indikator Persentase kabupaten/kota tidak tertinggal ini didukung oleh program pembangunan daerah tertinggal.

Data realisasi dan capaian Persentase kabupaten/kota tidak tertinggal 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.15
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase
Kabupaten/Kota tidak tertinggal Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian
Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD



Gambar diatas menunjukkan bahwa persentase kabupaten/kota tidak tertinggal tahun 2017 dan tahun 2018 realisasi dan capaian kinerjanya sama yaitu masing-masing 30,8% untuk realisasi kinerja dan 79,8% untuk capaian kinerjanya. Selanjutnya pada tahun 2019 persentase kabupaten/kota tidak tertinggal terealisasi sebesar 76,92% dengan capaian kinerja mencapai 142,84% atau naik 46,12% dibandingkan kondisi tahun 2017 dan 2018, lalu pada tahun 2020 terealisasi sebesar 62% dengan capaian kinerja mencapai 100%. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021, capaian persentase kabupaten/kota tidak tertinggal tahun 2020 ini telah memberikan kontribusi sebesar 89,11%.

Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 131 Tahun 2015 Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria :

- Perekonomian masyarakat;
- Sumber Daya Manusia;
- Sarana dan prasarana;
- Kemampuan keuangan daerah;
- Aksesibilitas;
- Karakteristik daerah.

Pada tahun 2020 masih terdapat beberapa daerah tertinggal belum terhentaskan berada di wilayah Sulawesi tengah yang terletak di Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi. Melalui program pemerintah dalam upaya untuk mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kedepan perlu ada review dan evaluasi untuk lebih memfokuskan program pembangunan desa di daerah tertinggal dengan cara mengubah strategi dan memformulasikan fungsi kelembagaan. Salah satu opsinya, untuk pembangunan desa di daerah tertinggal perlu mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah khususnya pada bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal (PKTDT) dengan alokasi dana tambahan kegiatan guna menghentikan 3 (tiga) Kabupaten yang masih berada dalam kategori tertinggal.

Adapaun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menuntaskan kabupaten/kota yang tertinggal di Sulawesi Tengah antara lain :

1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk ditingkatkan lagi fungsinya di wilayah terpencil
2. Mendorong tata kelola sumberdaya alam.
3. Mendorong peningkatan kualitas SDM, melalui kegiatan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah berupa penyuluhan/pelatihan kepada warga.
4. Mendorong kebijakan sinergis antara pusat dan daerah.
5. Mendorong stakeholders untuk mempunyai cara pandang yang sama dan keberpihakan pada percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Indikator kinerja kontribusi PDRB sub sektor kehutanan ini didukung oleh program :

- Program pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan.
- Program planologi dan tata lingkungan hidup
- Program pengendalian perubahan iklim
- Program penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- Program pengendalian DAS dan hutan lindung
- Program perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.

Data kontribusi PDRB sub sektor kehutanan 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.39
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Kontribusi PDRB sub sektor kehutanan Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan Capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Kontribusi PDRB Sub Sektor Kehutanan	3%	100%	856.82%	95.14%	1541.04%	171.21%	607.05%	67,45%	9%	67.45%

Tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi PDRB sub sektor kehutanan tahun 2017 sebesar 3% dengan persentase capaian 100%. Sedangkan tahun 2018 target penerimaan pendapatan daerah bertambah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 yaitu Dana Reboisasi (DR) dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), maka mempengaruhi realisasi yang sangat tinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 856,82% dengan capaian kinerja mencapai 95,14%. Kemudian pada tahun 2019 kontribusi PDRB sub sektor kehutanan mencapai 1541,04% dengan capaian kinerja 171,21%. Selanjutnya pada tahun 2020 kontribusi PDRB sub sektor kehutanan terealisasi 607.05% dengan capaian kinerja 67.45%.

Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021, capaian kontribusi PDRB sub sektor kehutanan tahun 2020 telah jauh melampaui target yaitu telah mencapai 67.45%.

Pencapaian ini ditunjang oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Jumlah unit yang melaksanakan atau mengakses Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) dan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SI-PNBP) dalam rangka Pemanfaatan Hasil Hutan secara tertib selama tahun 2020 adalah 1.411 unit, yang terdiri dari IUPHHK 5 Unit (PT. Sentral Pitulempa, PT. Taman Hutan Asri, PT. Bina Balantak Raya, PT. Wana Rinda Lestari dan PT. Satya Guna Sulajaya), IPK 2 unit (PT. Cipta Agro Sakti dan PT. Touna Raya Coconut) serta Pemungutan HHBK yang berasal dari 11 KPH dari skema Perjanjian Kerjasama (KPH. Kulawi, KPH. Dolago Tanggunung, KPH. Dampelas Tinombo, KPH. Sintuwu Maroso, KPH. Banawa Lalundu, KPH. Sivia Patuju, KPH. Pogogul, KPH. Gunung Dako, KPH. Balantak, KPH. Toili Baturube dan KPH. Tepe AsaMoroso). Adapun jumlah Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang menggunakan Sistem Pengendalian Bahan Baku (RPBBI) Online adalah sebanyak 62 Unit.
2. Jumlah realisasi penerimaan PNBP Tahun 2020 yang berasal dari
 - PSDH sebesar Rp. 708.769.461,- atau 93,43 % dari target penerimaan.
 - DR sebesar Rp. 3.100.046.857,- atau 129,24 % dari target penerimaan.
 - IIUPH sebesar Rp. 585.325.150,- atau 87,87% dari target penerimaan.

Realisasi penerimaan PNBP ini diperoleh dari jumlah penyetoran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan (yang terdiri dari IIUPH atau Iuran Izin usaha Pemanfaatan Hutan, PSDH atau Provisi Sumber Daya Hutan dan DR atau Dana Reboisasi dimana yang menjadi bagian provinsi sebesar 16% dari kewajiban PNBP dan telah disalurkan ke rekening kas daerah (BPKAD Prov. Sulawesi Tengah) per triwulannya dengan total sebesar Rp. 4.394.141.468,-

Pada Triwulan III Tahun 2020 terdapat penyetoran kurang bayar DBH SDA Kehutanan Tahun 2018 yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 140/PMK.07/2019 tentang Penetapan Kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2018.

3. Realisasi produksi Hasil Hutan Kayu berupa :

- Kayu Bulat sebesar 64.863,50 m³
- Kayu Gergajian sebesar 24.465,1790 m³
- Kayu hitam sebesar 137,52 m³
- Kayu veneer sebesar 605,5303 m³

Realisasi produksi Hasil Hutan Bukan Kayu diperoleh dari skema perjanjian kerjasama antara pihak mitra dengan 11 unit pengelola hutan (UPTD KPH Se-Sulawesi Tengah) diperoleh dari jenis Rotan 4.748 ton, Getah Pinus 760 ton dan Damar Kopal 647 ton.

**SASARAN
STRATEGIS 15**

**Optimalnya Tata Kelola Hutan Untuk Pengendalian
Kerusakan DAS dan Hutan Lindung**

Indikator persentase kerusakan kawasan hutan ini didukung oleh program:

- Program pengendalian DAS dan hutan lindung.
- Program planologi dan tata lingkungan hidup.
- Program pengendalian perubahan iklim.
- Program konservasi sumberdaya alam dan ekosistem.

Data Persentase kerusakan kawasan hutan 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.40
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase Kerusakan
kawasan hutan Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020
terhadap target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan	0,01%	5,55%	0,01%	5,9%	0,01%	6,25%	0,06%	40%	0,14%	42,85%

Dari data yang tersaji diatas nampak bahwa Persentase kerusakan kawasan hutan di Sulawesi Tengah selama 4 tahun berturut-turut mengalami peningkatan namun reaisasi masih sangat rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Tahun 2017 persentase kerusakan hutan terealisasi sebesar 0,01% dengan capaian kinerja 5,55%. Kemudian tahun 2018 persentase kerusakan hutan terealisasi sebesar 0,01% dengan capaian kinerja 5.9%. Selanjutnya tahun 2019 terealisasi sebesar 0,01% dengan capaian kinerja 6,25%. Pada tahun 2020 persentase kerusakan hutan terealisasi sebesar 0,06% dengan capaian kinerja 40%. Sementara untuk target akhir RPJMD tahun 2021 persentase kerusakan hutan telah mencapai 42,85%.

Upaya bersama berbagai pihak Polisi kehutanan Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tengah dengan Kepolisian dan GAKUM LHK Wilayah II Sulawesi serta kesadaran masyarakat yang meningkat, namun kerusakan kawasan hutan yang di akibatkan oleh Perambahan pemukiman liar dan perladangan liar yang dilaporkan masih terjadi seluas 2.501,1 Ha. Pelaksanaan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan dilaksanakan dengan skala prioritas dan pemilihan penanganan yang memberikan dampak/efek jera bagi para pelanggar, mampu memberikan pesan yang jelas dan tegas, meskipun terdapat keterbatasan personil dan anggaran serta tingginya aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan untuk tambang dan perambahan. Kerjasama dengan Kepolisian dan GAKUM LHK dalam penegakan hukum memberikan hasil yang baik dengan terpenuhinya capaian kegiatan.

Gambar 3.16
Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan



Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga tetap terjaga daya dukung, produktivitas serta peranan hutan dan lahan dalam mendukung sistem penyangga kehidupan.

Pada tahun 2020 Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Sulawesi Tengah mencapai 3.477,7 Ha. Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mencakup seluruh kegiatan Pembuatan Tanaman RHL seluas 1.102 Ha, Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai seluas 1.350,7 Ha, Pola penanaman Mangrove 200 Ha, maupun Penghijauan Lingkungan seluas 825 Ha, pada Dinas Kehutanan Provinsi bersama UPT TAHURA/KPH seSulteng. Kegiatan pembuatan tanaman hutan maupun penghijauan lingkungan di berbagai wilayah penyangga UPT KPH yang berada di Kabupaten/Kota se Sulteng dengan jenis tanaman produktif yang dapat menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi baik kayu maupun turunannya. Adapun kegiatan lain Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kab/Kota se Sulteng sebagai berikut :

- a. Kegiatan Rehabilitasi dengan Pola Hutan Rakyat pada UPT KPH Balantak Ha tersebar di Kec. Lobu Desa Uha-uha, Kec. Pagimana

Desa Bungawon, Kec. Balantak Utara Desa Pangkalaseang, Desa Talima A, Kec. Bualemo Desa Lembah Makmur, Kec Lamala Desa Kagitakan, Desa Labotan.

- b. Kegiatan Rehabilitasi dengan Pola Hutan Rakyat pada UPT KPH Banawa Lalundu tersebar di Kec. Banawa Selatan Desa Lumbulama, dan Pembuatan Tanaman Reboisasi Kec. Banawa Selatan Desa Malino, Kec. Rio Pakava Desa Tinauka, Kec. Pinembani Desa Dangara.
- c. Kegiatan Rehabilitasi dengan Pola Hutan Rakyat pada UPT KPH Dampelas Tinombo tersebar pada Kecamatan Moutong Desa Giro, Desa Lobu, Desa Ogobagis, Desa Ambason.
- d. Kegiatan Rehabilitasi pada UPT KPH Dolago Tanggunung di Kec. Sigi Biromaru Desa Oloboju, Desa Vatunonju, Kec.Sirenja Desa Ujumbou, dengan Pola Hutan Rakyat di Kecamatan Sirenja Desa Ombo dan Kec. Sigi Biromaru Desa Vatunonju.
- e. Kegiatan Rehabilitasi dengan Pengembangan Model Tanaman HHBK pada UPT KPH Gunung Dako tersebar di Kec. Galang Desa Aung, Kec. Lampasio Desa Oyom, Kec. Basidondo Desa Labonu.
- f. Kegiatan Pemulihan Hutan dan Lahan Pola Hutan Rakyat pada UPT KPH Kulawi tersebar Kec. Dolo Selatan Desa Bangga.
- g. Kegiatan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Konservasi Tanah dan Air pada UPT KPH Pogogul tersebar di Kec. Palele Barat Desa Timbulon, Kec. Biau Desa Kelurahan Leok 1, Kec.Palele Barat Desa Oyak.
- h. Kegiatan Rehabilitasi pada UPT KPH Pulau Peling dengan Pola Hutan Rakyat di Kec. Bulagi Utara Desa Sabang, Kegiatan Pengkayaan Reboisasi Kec.Bulagi Utara Desa Ombuli, Kec. Bulagi Selatan Desa Boluni, Kec Tinangkung Desa Ambelang, Desa Koakon.
- i. Kegiatan Rehabilitasi pada UPT KPH Sintuwu Maroso dengan Pola Hutan Rakyat di Kec. Lage Desa Pandiri, Kegiatan Pengkayaan Reboisasi Kec.Lore Peore Desa Watutau.
- j. Kegiatan Rehabilitasi pada UPT KPH Sivia Patuju dengan Pola Hutan Rakyat di Kec. Ampana Tete Desa Wanasari,Desa Mpoa, Desa Sukamaju, Desa Girimulyo, Kec. Tojo Barat Desa Matako, Kec. Tojo

Desa Pancuma, Desa Tojo, Kec. Ulubongka Desa Mire, Desa Takibangke, Desa Marowo, Desa Uekambuno, Kec. Nuhon Desa Obo Balingara.

- k. Kegiatan Rehabilitasi pada UPT KPH Tepe Asa Maroso dengan Pola Hutan Rakyat di Kec. Bungku Barat Desa Ambunu, Kec. Bungku Tengah Desa Tofuti.
- l. Kegiatan Rehabilitasi pada UPT KPH Tepo Asa Aroa dengan Pola Hutan Rakyat di Kec.Soyo Jaya Desa Malino.
- m. Kegiatan Rehabilitasi pada UPT KPH Toili Baturube dengan Pola Hutan Rakyat dan Pola Agroforestry di Kec. Nambo Desa Lumbe, Kegiatan Pengkayaan Tanaman Reboisasi pada Areal Penyangga KPH Di Kec.Toili Desa Uemea, Kec. Mamosalato Desa Tanasumpu, Kegiatan Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat di Kec. Luwuk Selatan Desa Bubung, Kec Nambo Desa Koyoan.

Gambar 3.17
Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan



Sesuai arahan Presiden RI yang tertuang dalam “Nawa Cita” posisi dan peran pembangunan kehutanan dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2016-2021 yang mengacu pada kebijakan pembangunan kehutanan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, areal kelola masyarakat serta penyelesaian konflik tenurial. Dalam P.83/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Hingga tahun 2020 Luas Perhutanan Sosial di Sulawesi Tengah mencapai 43.370,61 Ha. Sebelum penerbitan izin dari Kementerian LHK, Dinas dan KPH selaku perangkat daerah melakukan sosialisasi terhadap perangkat Desa/Dusun maupun masyarakat setempat, membantu dalam pengajuan perda serta pembuatan peta usulan penyiapan kawasan perhutanan sosial.

Kewenangan Hak kelola berada di Kementerian dan Setelah Penerbitan hak atau izin oleh Kementerian, daerah sebagai fasilitasi maupun pendamping masyarakat dalam pembuatan Rencana Kerja usaha, Pemanfaatan Potensi Usaha serta penghubung dengan pihak swasta. Peraturan Menteri dimaksudkan dapat memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan Hutan Adat di Bidang Perhutanan Sosial serta bertujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan.

Indikator indeks kualitas lingkungan hidup ini didukung oleh program :

- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
- Program pembinaan kajian lingkungan hidup strategis
- Program penataan dan penegakan hukum lingkungan
- Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
- Program peningkatan penyuluhan dan sumber daya manusia

Data indeks kualitas lingkungan hidup 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.41

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Indeks kualitas lingkungan hidup Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,39 Poin	102,04%	69,50 Poin	84,75%	80,23 Poin	114,61%	77,53 Poin	110%	71 Poin	109,19%

Tabel diatas menggambarkan bahwa indeks kualitas lingkungan hidup di Sulawesi Tengah setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 indeks kualitas lingkungan hidup tercatat sebesar 69,39 poin dengan capaian kinerja 102,04%, kemudian tahun 2018 indeks kualitas lingkungan hidup terealisasi sebesar 69,50 poin dengan capaian kinerja 84,75%. Selanjutnya pada tahun 2019 indeks kualitas lingkungan hidup tercatat sebesar 80,23 poin dengan capaian kinerja 114,61% atau terjadi kenaikan 35% dibandingkan tahun 2018. Untuk tahun 2020 realisasi indeks kualitas lingkungan hidup tercatat sebesar 77,53 poin dengan capaian kinerja 110%. Pencapaian tahun 2020 ini telah melebihi target akhir RPJMD 2021 dengan persentase 109,19%.

Nilai IKLH nasional merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia, dimana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas hidup seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep IKL dan konsep EPI. IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan 7 parameter yaitu TSS, DO, BOD, COD, total fosfat, fecal coli, dan total coliform; (2) Kualitas udara, menggunakan metode indeks pencemar dengan konsep semakin tinggi nilai indeks pencemar semakin buruk kualitas airnya dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Untuk penghitungan nilai indeks kualitas air digunakan data hasil sampling di sungai Iriang (Sigi dan Poso) dan untuk indeks kualitas udara menggunakan metode *passive sampler* yang dilaksanakan di 9 Kabupaten/Kota. Sehingga dengan menggunakan rumus : $IKLH_{Provinsi} = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$. Maka nilai IKLH provinsi Sulawesi Tengah adalah 80,23 Poin.



Indikator kinerja nilai tukar petani (NTP) ini didukung oleh program :

- Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan;

- Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Holtikultura Berkelanjutan.

Data nilai tukar petani (NTP) 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.42
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Nilai Tukar Petani Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Nilai Tukar Petani	96,01%	97,48%	108,68	107,30%	99,41%	94,92%	88,87%	84,72%	99,5-100,5%	88,42%

Tabel diatas menggambarkan bahwa realisasi nilai tukar petani tahun 2017 sebesar 96,01% dengan capaian kinerja 97,48%. Kemudian tahun 2018 terealisasi sebesar 108,68% dengan capaian kinerja 107,30% lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar 99,41% dengan capaian kinerja sebesar 94,92%. Sedangkan nilai tukar petani (NTP) gabungan pada bulan Oktober Tahun 2020 mengalami penurunan 12,03% dengan realisasi sebesar 88,87% dan capaian kinerja 84,72%. Hal ini disebabkan karena indeks yang diterima petani di tahun 2020 lebih rendah dibandingkan tahun 2019 begitu pula indeks yang dibayarkan petani di tahun 2020 lebih tinggi di banding tahun 2019. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021 Nilai tukar petani tahun 2020 ini telah mencapai 88,42%.

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu proksi indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani. NTP diatas angka 100 dapat diartikan bahwa petani mengalami surplus (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha melebihi pertumbuhan pengeluaran rumah tangga). NTP sama dengan 100 berarti petani mengalami titik impas (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha sama dengan pengeluaran rumah tangga dan NTP di bawah 100 berarti petani mengalami defisit (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha dibawah

pertumbuhan pengeluaran rumah tangga). Secara sederhana angka NTP diperoleh dari hasil perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib).

Adapun solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan indeks yang diterima petani, upaya yang dilakukan adalah bagaimana harga jual produk hasil pertanian tanaman pangan dapat ditingkatkan melalui peningkatan mutu, kontrol pasokan produk di pasar produsen, distribusi produk pertanian ke pasar konsumen dan terjadinya tunda jual saat memasuki musim panen.
- (2) Stabilitas atau penurunan indeks yang dibayar petani, upaya yang dilakukan adalah menjaga stabilitas barang konsumsi meliputi bahan makanan, makanan jadi dan sandang, disamping itu bagaimana menekan biaya transportasi dari tingkat petani menuju pasar tingkat produsen.
- (3) Menekan biaya biaya produksi dan menekan penambahan biaya modal, upaya yang dilakukan adalah stabilitas biaya transportasi barang konsumsi dan bahan modal menuju ke pasar produsen, disamping itu terjaminnya ketersediaan benih dan bibit juga akan mengurangi naiknya indeks yang harus dibayar petani.

Selain hal tersebut diatas, solusi lain yang dilakukan adalah efisiensi penggunaan sumber daya yang dapat dilakukan melalui :

- (1) Peningkatan penggunaan pupuk kandang/organik sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk organik, dengan demikian volume penggunaan pupuk anorganik dapat ditekan sehingga kelangkaan pupuk ditingkat konsumen dapat dikurangi dan harga pupuk non subsidi tidak meningkat;
- (2) Penggunaan pestisida didasarkan pada hasil pengamatan perkembangan hama dan penyakit, keadaan ini akan menekan penggunaan pestisida.

- (3) Meningkatkan mekanisme dalam pertanian, hal ini akan mencegah peningkatan upah buruh ditingkat petani.
- (4) Stabilitas dan penurunan harga BBM akan berdampak pada stabilitas dan penurunan biaya transport menuju pasar produsen.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk menunjang peningkatan NTP adalah dengan melakukan peningkatan indeks yang diterima petani melalui peningkatan harga hasil produk yang dihasilkan petani, melalui pengendalian pasokan petani ke pasar produsen dengan perlunya pengembangan program yang terkait dengan Resi Gudang, Program LPDM, Program Cadangan Pangan, Pembelian Bulog. Program tersebut semuanya akan dapat mengurangi masuknya produk hasil pertanian dalam jumlah yang besar sehingga penurunan harga hasil pertanian dapat dicegah.

**SASARAN
STRATEGIS 18**

**Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Holtikultura,
Tanaman Pangan dan Perkebunan**

Sasaran Strategis 18 “Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Holtikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan” memiliki 2 indikator kinerja, yaitu Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dan Jumlah PDRB sub sektor perkebunan. Rinciannya sebagai berikut :

1. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Lapangan Usaha) adalah merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota) dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender). Adapun kegiatan ekonomi yang dimaksud kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan sampai dengan jasa. Data capaian kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.43
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	28,98%	94,27%	26,14%	94,03%	24,33%	85,67%	26,24%	93,31%	28,92%	90,73%

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Tahun 2017 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tercatat sebesar 28,98% dengan capaian kinerja 94,27%. Selanjutnya tahun 2018 terealisasi sebesar 26,14% dengan capaian kinerja 94,03% lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar 24,33% dengan capaian kinerja mencapai 85,67%. Kemudian terjadi kenaikan 8,91% pada tahun 2020, dimana kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB terealisasi sebesar 26,24% dengan capaian kinerja 93,31%. Sedangkan terhadap target akhir RPJMD tahun 2021, pencapaian tahun 2020 ini telah memberikan kontribusi sebesar 90,73%.

Menurunnya kontribusi pertanian terhadap PDRB Sulawesi Tengah tahun 2020 disebabkan karena sub sektor pertambangan dan penggalian serta sub sektor industri pengolahan mengalami peningkatan. Berdasarkan Angka Sementara (ASEM) Tahun 2020 rata-rata capaian produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan pencapaian produksi sesuai Angka Tetap (ATAP) pada tahun 2019, hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

Adapun upaya untuk meningkatkan kontribusi pertanian terhadap PDRB Sulawesi Tengah pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah antara lain sebagai berikut :

- a. Perluasan dan pengembangan sistem pertanian tanaman pangan dan peningkatan bantuan Pemerintah untuk petani berupa sarana produksi benih, pupuk, pestisida dan alat dan mesin pra dan pasca panen.
- b. Untuk menjamin status kepemilikan lahan bagi petani dalam mendukung peningkatan kesejahteraan perlu dilaksanakan sertifikasi lahan bagi petani.
- c. Penyediaan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura dapat menggerakkan para penangkar benih/bibit serta mengoptimalkan fungsi balai benih tanaman pangan dan hortikultura.
- d. Penyediaan fasilitas dalam menjembatani petani ke sumber permodalan tanpa memerlukan administrasi yang berbelit-belit.
- e. Peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya petani dalam penerapan teknologi pengolahan dan manajemennya melalui gabungan kelompok tani maupun kelompok tani itu sendiri.
- f. Mengubah paradigma berpikir petani terhadap budidaya usaha taninya, dimana dalam mengusahakan budidaya pertanian sebaiknya terfokus pada satu jenis komoditi tanaman.
- g. Peningkatan pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura telah didukung oleh beberapa sektor dalam mencapai target produksi yang telah ditetapkan.

2. Jumlah PDRB Sub Sektor Perkebunan

Indikator kinerja jumlah PDRB Sub Sektor Perkebunan ini didukung oleh program :

- Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan.
- Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pengolahan serta pemasaran hasil perkebunan.

Data jumlah PDRB sub sektor perkebunan 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.44
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Jumlah PDRB sub sektor perkebunan Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Jumlah PDRB Sub Sektor Perkebunan	Rp.11.551.515	96,33%	Rp.12.009.909	97,23%	Rp.12.480.042	98,10%	Rp.12.480.042	95,24%	Rp.13.497.176	92,46%

Tabel diatas menggambarkan bahwa realisasi jumlah PDRB sub sektor perkebunan pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp 11.551.515 dengan capaian 96,33%. Kemudian pada tahun 2018 jumlah PDRB sub sektor perkebunan tercatat sebesar Rp. 12.009.909 dengan capaian kinerja 97,23%, tahun 2019 meningkat 3,91% dimana terealisasi sebesar Rp. 12.480.042 dengan capaian kinerja 98,10% namun pada tahun 2020 masih menggunakan data PDRB sub sektor perkebunan menurut lapangan usaha tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 12.480.042 dengan capaian kinerja mencapai 95,24%. Sedangkan terhadap target akhir RPJMD tahun 2021 jumlah PDRB sub sektor perkebunan telah memberikan kontribusi sebesar 92,46%.

Sub sektor perkebunan merupakan pemberi sumbangan terbesar terhadap PDRB Sulawesi Tengah yaitu 39,71%, lebih besar dibandingkan dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 27,73%. Hal ini didukung oleh meningkatnya produksi beberapa komoditas unggulan perkebunan Sulawesi Tengah.

Dari 8 komoditas unggulan perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 5 komoditas yang telah mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu Kelapa Dalam, Pala, Lada, Kelapa Sawit, dan Karet. Sedangkan untuk komoditi Cengkeh, Kopi dan Kakao belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Bantuan bibit, peremajaan, pengendalian OPT dan bantuan pupuk untuk komoditas Kelapa Dalam, Pala, Lada, Kelapa Sawit dan Karet yang

diberikan tahun 2012-2015 telah menunjukkan keberhasilan, melalui bimbingan penyuluh dan tenaga lapangan, sehingga produksi kelima komoditas tersebut dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi produksi komoditas Kelapa dalam mencapai 191.669 ton (110,43%) pada tahun 2020 dari target sebesar 173.561 ton dan mencapai 108,23% terhadap target jangka menengah (177.092 ton). Produksi komoditas Pala mencapai realisasi sebesar 423 ton (154,95%) dari target tahun 2020 yaitu sebesar 273 ton dan mencapai 144,86 % terhadap target jangka menengah (292 ton). Produksi Lada juga mencapai realisasi sebesar 229 ton (231,31%) dari target tahun 2020 sebesar 97 ton dan mencapai 229% terhadap target jangka menengah (100 ton). Realisasi produksi komoditas Kelapa Sawit mencapai 421.526 ton (127,74%) dari target tahun 2020 sebesar 329.994 ton dan mencapai 124,02% terhadap target jangka menengah (339.893 ton). Sedangkan untuk komoditas Karet realisasi produksinya mencapai 2.978 ton (117,94%) dari target tahun 2020 yaitu sebesar 2.525 ton dan 114,54% terhadap target jangka menengah (2.600 ton).

Peningkatan produksi ke 5 komoditas unggulan tersebut sangat dipengaruhi oleh dukungan kesuburan tanah, adanya intensitas dan distribusi curah hujan yang cukup tinggi dan merata yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020. Keadaan ini sangat mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dimana tanaman mendapat cukup banyak air yang diperlukan pada proses penyerapan hara dan proses fotosintesis sehingga proses pembentukan bunga dan buah lebih maksimal.

Peningkatan produksi Kelapa diantaranya disebabkan oleh masih tingginya minat masyarakat dalam mengelola dan merawat komoditi kelapa, hal ini dapat terlihat dari penambahan luas areal sebanyak 1.372 Ha yang terdiri dari swadaya petani, bantuan yang bersumber dari dana APBD I dan APBD II. Berdasarkan data statistik, penambahan tanaman menghasilkan sebanyak 569 Ha menyebabkan terjadinya peningkatan produksi sebanyak 2.532 ton pada tahun 2019.

Peningkatan produksi Pala diantaranya disebabkan oleh tingginya minat masyarakat dalam mengelola dan merawat komoditi pala, hal ini dapat terlihat dari penambahan luas areal tanaman Pala pada tahun 2019 mencapai 1.374 Ha yang terdiri dari bantuan yang bersumber dari dana APBN sebanyak 501 Ha, APBD I sebanyak 226 Ha dan selebihnya bersumber dari APBD II, Swadaya dan Anggaran Dana Desa (ADD).

Sebaliknya komoditas Cengkeh, Kopi dan Kakao menunjukkan hal yang berbeda, dimana ketiga komoditas ini belum dapat mencapai target produksi pada tahun 2020 secara maksimal. Produksi Cengkeh mencapai 99,18% atau sebesar 18.108 ton dari target yang ditetapkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 18.258 ton dan apabila disandingkan dengan target Jangka menengah maka dapat diperoleh hasil produksi cengkeh mencapai 92,36% dari target jangka menengah sebesar 19.606 ton. Untuk produksi komoditas Kopi pada tahun 2020 mencapai nilai kinerja sebesar 90,45% atau sebesar 2.548 ton dari target yang ditetapkan sebesar 2.817 ton. Capaian produksi kopi tersebut sama apabila disandingkan dengan target Jangka menengah karena target produksi kopi yang sama pada tahun 2021. Produksi komoditi Kakao mencapai 89,63% atau capaian sebesar 128.154 ton dari target yang ditetapkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 142.985 ton dan apabila disandingkan dengan target jangka menengah maka dapat diperoleh hasil produksi kakao 89,50% atau sebesar 143.185 ton.

Capaian produksi dari komoditas Cengkeh, Kakao dan Kopi pada tahun 2020 dapat dikatakan sangat baik walaupun seluruhnya tidak mencapai target 100%. Banyak faktor yang sangat mempengaruhi sehingga target produksi 3 komoditas tersebut tidak tercapai, diantaranya adalah bibit tanaman yang kurang bermutu dan tidak bersertifikat, tingginya jumlah tanaman tua dan tanaman yang kurang terawat, sulitnya petani dalam mengakses pupuk dan pestisida, masih cukup tingginya serangan hama dan penyakit tanaman, peningkatan intensitas curah hujan yang terjadi pada akhir tahun 2019 dan berlanjut pada tahun 2020 juga merupakan hal

yang mempengaruhi tingkat produksi komoditi Cengkeh, Kakao dan Kopi, karena secara fisiologis tingkat curah hujan yang tinggi akan mempengaruhi proses pembungaan dan pembuahan pada tanaman. Selanjutnya proses pasca panen juga akan terganggu mengingat komoditi Cengkeh, Kakao dan Kopi sangat membutuhkansinar matahari yang cukup banyak untuk proses pengeringan, yang jika hal ini tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi mutu hasil produksinya.

Khusus untuk produksi kakao secara nasional mengalami penurunan yang cukup besar dalam satu dekade terakhir. Beberapa hal spesifik selain yang dikemukakan di atas yang menyebabkan target produksi kakao belum tercapai pada tahun 2020 diantaranya disebabkan oleh terjadinya alih fungsi komoditi dari komoditi kakao ke komoditi palawija dan kelapa sawit sebanyak 4.328 Ha sehingga menyebabkan pengurangan luasan kakao. Selanjutnya hal spesifik yang menyebabkan target produksi Cengkeh belum tercapai yaitu tanaman cengkeh memiliki siklus panen raya setiap 4 tahun sekali.

Tabel 3.45
Jumlah produksi komoditas unggulan Prov. Sulteng
Tahun 2020

No.	Komoditas	Jumlah produksi (ToN)
1.	Kelapa dalam	191.669
2.	Cengkeh	18.108
3.	Kopi	2.548
4.	Kakao	128.154
5.	Pala	423
6.	Lada	229
7.	Kelapa sawit	421.526
8.	Karet	2.978

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2021

Sasaran Strategis 19 “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Nelayan dan Perikanan Budidaya” memiliki 2 indikator kinerja, yaitu Nilai tukar nelayan dan Nilai ekspor hasil perikanan. Rinciannya sebagai berikut :

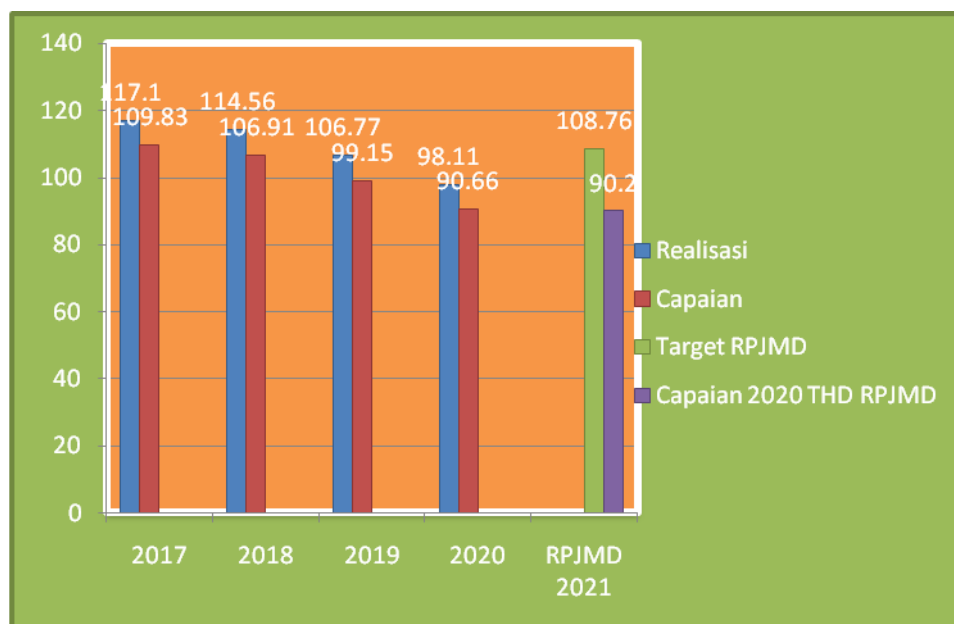
1. Nilai tukar nelayan

Indikator Nilai Tukar Nelayan ini didukung oleh Program :

- Program pengelolaan perikanan tangkap
- Program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya

Data Nilai tukar nelayan 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD tersaji pada gambar berikut :

Gambar 3.18
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Nilai tukar nelayan Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD



Gambar diatas menunjukkan bahwa realisasi nilai tukar nelayan setiap tahun mengalami penurunan selama 4 tahun berturut-turut. Pada tahun 2017 nilai tukar nelayan terealisasi sebesar 117,1% dengan capaian kinerja 109,83%, lalu pada tahun 2018 realisasi nilai tukar nelayan tercatat

sebesar 114,56% dengan capaian kinerja 106,91%, terjadi penurunan nilai sebesar 7,82% dimana realisasi nilai tukar nelayan tahun 2019 sebesar 106,77% dengan capaian kinerja 99,15%. Selanjutnya pada tahun 2020 realisasi nilai tukar nelayan tercatat sebesar 98,11% dengan capaian kinerja sebesar 90,66% atau turun 9,36% dari tahun 2019. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021 realisasi nilai tukar nelayan tahun 2020 ini telah memberikan kontribusi sebesar 90,2%.

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu proksi indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani/ nelayan/ pembudidaya dari waktu ke waktu. NTP di atas angka 100 dapat diartikan bahwa petani/nelayan/pembudidaya mengalami surplus (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha melebihi pertumbuhan pengeluaran rumah tangga), NTP sama dengan 100 berarti petani/ nelayan/ pembudidaya mengalami titik impas (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha sama dengan pengeluaran rumah tangga) dan NTP di bawah 100 berarti petani/nelayan/pembudidaya mengalami defisit (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha di bawah pertumbuhan pengeluaran rumah tangga). Secara sederhana angka NTP diperoleh dari hasil perbandingan indeks harga yang diterima petani/nelayan/pembudidaya (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani/nelayan/pembudidaya (Ib).

Mulai Januari 2020 dilakukan perubahan tahun dasar penghitungan NTP dari tahun dasar (2012=100) menjadi tahun dasar (2018=100) baik untuk It maupun Ib.

Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan/pergeseran pola produksi hasil pertanian/perikanan dan pola konsumsi rumah tangga pertanian/perikanan di pedesaan dan perluasan cakupan subsektor pertanian. Pada tahun dasar yang baru, terdapat peningkatan cakupan komoditas baik pada paket komoditas It maupun Ib. Penghitungan NTP juga mengalami perluasan khususnya pada sub sektor perikanan, yang kompilasinya dilakukan secara terpisah antara Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPPi) sehingga input data dimulai

dari 0. Tahun 2019 target Nilai Tukar Perikanan Budidaya 85,00 dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap 107,68. Realisasi Nilai Tukar Perikanan yang dicapai oleh kedua sub sektor ini adalah untuk perikanan budidaya adalah sebesar 87,11 (102,49%) dan perikanan tangkap sebesar 112,98 (104,93%). Berikut disajikan capaian NTN dan NTPPi selama tahun 2020:

Tabel 3.46
Capaian NTN dan NTPi Sulawesi Tengah
Tahun 2020

Bulan	NTN	NTPi	NTNP (Nilai Tukar Petani subsektor Perikanan)
Januari	97.72	101.21	97,99
Februari	98.42	100.10	98,55
Maret	99.49	101.26	99,63
April	96.98	98.71	97,12
Mei	98.21	99.00	98,27
Juni	99.48	99.96	99,51
Juli	98.95	100.23	99,05
Agustus	98.43	99.21	98,49
September	96.84	99.48	97,04
Oktober	95.93	100.44	96,28
November	97.40	100.72	97,66
Desember	99.47	99.75	99,49

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulteng, 2021

Nilai tukar subsektor perikanan berfluktuasi sepanjang 2020, untuk perikanan tangkap dan budidaya mencapai titik tertinggi pada bulan Maret. Banyak hal yang diduga turut andil pada fluktuatif NTP Perikanan sepanjang 2020 dimana (1) keterbatasan ketersediaan BBM bersubsidi pada depot SPBU dan SPDN sehingga berpengaruh pada hari operasi; (2) keterbatasan aktifitas melaut bagi masyarakat nelayan terutama pada awal masa pandemi; (3) keterbatasan benih sebagai akibat pengurangan aktivitas unit-unit perbenihan dan transportasi logistik (pesawat terbang) yang mengurangi jadwal terbangnya; (4) sulitnya memasarkan hasil

tangkapan dan budidaya ikan serta terbatasnya pembeli dan pedagang ikan disebabkan adanya kebijakan *lock down* pada awal masa pandemi Covid-19 yang diterapkan oleh kabupaten dan kota baik di Sulawesi Tengah maupun diluar Sulawesi Tengah. Kondisi ini pada kuartal selanjutnya mempengaruhi aktivitas perikanan karena pendapatan yang menurun tidak seimbang dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan; serta (5) Kondisi cuaca yang ekstrim yang menimpa Sulawesi Tengah berpengaruh pada usaha-usaha perikanan.

Menghadapi hal-hal diatas, kemudian dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya diantaranya dengan pembelian langsung ikan dari nelayan dan pembudidaya yang distribusikan ke unit pelayanan kesehatan dan masyarakat yang membutuhkan, penyediaan ikan murah pada kegiatan pasar murah, peningkatan dan pengembangan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan provinsi sebagai sentra nelayan, pola fasilitasi penyediaan BBM dan es balok serta pengembangan budidaya air tawar sistem bioflok dan kolam terpal.

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan dan perikanan budidaya dengan indikator kinerja nilai tukar nelayan adalah sebagai berikut :

➤ Jumlah produksi perikanan budidaya.

Perikanan budidaya meliputi budidaya laut, budidaya tambak, budidaya kolam, budidaya karamba dan budidaya sawah. Komoditi unggulan perikanan budidaya Sulawesi Tengah adalah rumput laut dan ikan air tawar (nila, mas dan lele). Dominasi produksi yang cukup besar terdapat pada pengembangan komoditi rumput laut, yaitu *Euchema Cottoni* yang banyak diusahakan pada budidaya laut dan *Glacillaria sp* yang diusahakan pada budidaya tambak.

Target produksi budidaya pada tahun 2020 adalah sebesar 1.110.780 ton dengan pencapaian sementara tahun 2020 adalah sebesar 588.746,45 ton atau mencapai 53,00%. Produksi ini lebih rendah dari target yang ditetapkan karena belum selesainya proses validasi data

perikanan budidaya tahun 2020. Berdasarkan data sementara produksi perikanan budidaya terbesar berasal dari Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 337.424,07 ton dan disusul oleh Kabupaten Morowali sebesar 202.794,99 ton. Data produksi sementara budidaya tahun 2020 per kabupaten kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.47
Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2020 Per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Produksi
1	Banggai Kepulauan	337.424,07
2	Banggai Laut	13.664,33
3	Banggai	265,00
4	Morowali	202.794,99
5	Morowali Utara	1.174,94
6	Poso	1.714,73
7	Donggala	11.488,10
8	Toli-toli	1.389,47
9	Buol	1.097,27
10	Parigi Moutong	15.044,24
11	Tojo Una Una	2.293,11
12	Kota Palu	85,18
13	Sigi	311,00
	Total	588.746,45

Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulteng, 2021

- Jumlah produksi perikanan tangkap
Perikanan tangkap meliputi perikanan laut dan perairan umum daratan (PUD). Target produksi perikanan tangkap di Sulawesi Tengah pada tahun 2020 adalah 239.700 ton dan terealisasi sementara sebesar 201.101,80 ton*. Meskipun capaian tahun 2020 lebih rendah dari target tetapi capaian ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai

196.519,30 ton atau sebesar 2,33%.Data produksi tangkap tahun 2020 per kabupaten kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.48
Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020 Per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Produksi
1	Banggai Kepulauan	12.017,50
2	Banggai	19.859,90
3	Morowali	39.351,80
4	Poso	9.824,90
5	Donggala	21.679,90
6	Toli-toli	24.601,70
7	Buol	12.449,30
8	Parigi Moutong	16.996,90
9	Tojo Una Una	13.579,70
10	Morowali Utara	1.945,70
11	Banggai Laut	27.789,50
12	Palu	998,50
13	Sigi	6,5
	Total	201.101,80

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulteng, 2021

Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga mengembangkan beberapa inovasi dibidang kelautan perikanan yang bertujuan untuk peningkatan dan pengelolaan produksi perikanan. Inovasi-inovasi yang dikembangkan tersebut adalah :

a. Bandeng bebas duri (BABERI)

Sebagai ikan komoditas pangan, bandeng menempati urutan pertama dalam pemenuhan omega 3 sebesar 14,20% diatas Sarden, Salmon dan Tuna. Energi yang dihasilkan Bandeng adalah sebesar 129 kkal, protein sebesar 20 gr, lemak 4,8 gr, kalsium 20 mg, fosfor 150 mg, zat

besi 2 mg serta mengandung vitamin A dan B1. Bandeng bebas duri merupakan salah satu diversifikasi produk olahan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Produk ini cukup diminati yang dapat dilihat dari permintaan pasar yang besar terutama pada bandeng dengan ukuran 500-600 gram perekorannya. Proses pengolahan bandeng bebas duri tidak hanya dilakukan oleh karyawan dinas kelautan dan perikanan provinsi Sulawesi tengah, namun juga ditularkan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pelatihan. Tahun 2020 dilakukan pelatihan cabut duri untuk bandeng bagi UMKM di Kota Palu.

Gambar 3.19
Pelatihan Bandeng Bebas Duri



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulteng, 2021

b. Pengembangan Rumput Laut Sistem Kultur Jaringan

Sistem kultur jaringan merupakan salah satu solusi dalam menyediakan bibit rumput laut berkualitas. Inovasi ini telah dimulai sejak tahun 2018 melalui MoU dengan BIOTROP, pelatihan aparatur serta ujicoba pengembangan RL bibit kultur jaringan.

Gambar 3.20
Pengembangan Rumput Laut Sistem Kultur Jaringan



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulteng, 2021

c. Kolam budidaya hemat air

Kolam budidaya hemat air merupakan inovasi dibidang budidaya ikan yang dikembangkan dengan menggunakan terpal. Budidaya ini diaplikasikan terutama pada daerah-daerah sulit air, misalnya Sigi dimana pasca bencana mengalami sulit air. Budidaya ini menggunakan terpal yang dapat dipadukan dengan sistem bioflok dengan komoditas ikan nila, lele dan mas.

Gambar 3.21
Kolam Budidaya Hemat Air di Kabupaten Sigi



d. Kolam Ikan Semi Intensif Teknologi Bioflok

Bioflok berasal dari kata “Bios” artinya kehidupan dan “Floc atau Flock” artinya gumpalan. Bioflok bias diartikan sebagai kumpulan dari berbagai campuran heterogen mikroba (plankton, protozoa, fungi), partikel, polimenorganik, koloid dan kaiton yang saling berinteraksi dengan sangat baik di dalam air yang tergabung dalam gumpalan (flok). Teknologi bioflok adalah teknik manajemen kualitas air yang didasarkan padapertumbuhan dan pengendalian bakteri Heterotrof di dalam sistem budidaya dengan *zero water exchange* (sistem pemeliharaan tanpa adanya pergantian air).

Penerapan sistem bioflok dalam budidaya ikan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan budidaya ikan sistem konvensional diantaranya: (1) Mengurangi beban limbah yang berada padamedia budidaya, (2) Hemat air (Efisiensi penggunaan Air), (3) Padat tebar tinggi hingga 250 ekor/m³ pada Ikan Nila, (4) Produktivitas tinggi, (5) Meningkatkan efisiensi pakan/ Food Conversion Ratio (FCR) hingga 0.7–0.9, (6) Pemanfaatan lahan lebih efisien (pemanfaatan lahan sempit), (7) Produksi dan hasil limbah yang lebih sedikit dan (8) Ramah lingkungan.

Gambar 3.22

Kolam Ikan Semi Intensif Teknologi Bioflok



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulteng, 2021

2. Nilai Ekspor Hasil Perikanan

Indikator kinerja nilai ekspor hasil perikanan ini didukung oleh program :

- Program pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
- Program pengelolaan daya saing produk kelautan dan perikanan
- Program pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Data nilai ekspor hasil perikanan⁴ tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.49
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja nilai ekspor hasil perikanan Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Nilai Ekspor Hasil Perikanan	US\$ 3.227.836	68,31%	US\$ 4.961.250	100,2%	US\$ 3.763.124,02	117,60%	US\$ 3.763.124,02	106,90%	US\$ 3.784.000	99,45

Tabel diatas menunjukkan bahwa Nilai ekspor hasil perikanan tahun 2017 terealisasi sebesar US\$ 3.227.836 dengan capaian 68,31%, lalu pada tahun 2018 terealisasi terealisasi US\$ 4.961.250 dengan capaian 100,2% sedangkan pada tahun 2019 terealisasi US\$ 3.763.124,02 dengan capaian 117,60% atau terjadi peningkatan sebesar 17,36% dibandingkan tahun 2018. Namun pada tahun 2020 Nilai ekspor hasil perikanan mengalami penurunan sebesar 10% karena hanya terealisasi sebesar US\$ 3.763.124,02 dengan capaian kinerja 106,90%, akan tetapi nilai ini masih angka sementara karena data penerbitan *Health Certificate* (HC) yang merupakan data yang digunakan untuk menghitung nilai ekspor perikanan masih dalam proses validasi sehingga nilai ini masih akan berubah nantinya. Tingginya capaian kinerja ini disebabkan karena adanya

revisi target Nilai ekspor hasil perikanan dalam RPJMD. Pencapaian tahun 2020 ini telah memberikan kontribusi sebesar 99,45% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

Jenis komoditi perikanan yang diekspor dari Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 antara lain: Gurita beku, fillet ikan beku dan sotong beku, dengan negara tujuan Perancis, China, Malta, USA, Vietnam, Slovenia dan Reunion. Komoditas dan nilai ekspor hasil perikanan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.50
Nilai Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2020

No	Komoditas	Volume (kg)	Nilai Ekspor (US\$)
1	Gurita beku	514.069,78	2.917.790,67
2	Fillet ikan beku	68.996,06	381.180,16
3	Sotong beku	99.735.000	464.153,02
	TOTAL	682.800,04	3.763.124,02

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulteng, 2021

SASARAN
STRATEGIS 20

Tuntasnya Angka Melek Aksara

Angka Melek Aksara adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Dalam perencanaan pembangunan wilayah, Angka Melek Aksara digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah.

Data persentase angka melek aksara di Sulawesi Tengah 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel bawah ini :

Tabel 3.51
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase angka melek aksara Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Persentase Angka Melek Aksara	96,1%	98,11%	96,50%	98,65%	96,53%	97,75%	96,50%	97,13%	99,25-100%	96,50%

Dari tabel diatas diketahui bahwa persentase angka melek aksara di Sulawesi Tengah selama 4 tahun berturut-turut mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 persentase angka melek aksara terealisasi sebesar 96,1% dengan capaian kinerja sebesar 98,11%. Terjadi kenaikan 0,41% pada tahun 2018, dimana persentase angka melek aksara tahun 2018 terealisasi sebesar 96,50% dengan persentase capaian 98,65%. Kemudian pada tahun 2019 persentase angka melek aksara tercatat sebesar 96,53% atau naik sebesar 0,03% dari tahun 2018, lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,03% dimana persentase angka melek aksara terealisasi sebesar 96,50% dengan persentase capaian 97,13%. Terhadap target RPJMD tahun 2021, pencapaian persentase angka melek aksara ini telah memberikan kontribusi sebesar 96,50%.

Target penuntasan melek aksara merupakan bagian dari fokus pembangunan di Sulawesi Tengah, mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara, maupun karena daya ungkit pendidikan terhadap tujuan pembangunan seperti pembangunan pemerataan ekonomi dan sosial.

Strategi yang digunakan dalam rangka mengurangi melek aksara di Sulawesi Tengah adalah melalui program Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar berdasarkan data by name by address. Dalam pemberantasan buta

aksara harus jelas sasarannya, siapa orangnya dan dimana tempat tinggalnya. Program ini akan fokus dilaksanakan di wilayah-wilayah khusus atau wilayah yang sulit dijangkau, karena sebagian besar penduduk buta aksara pada umumnya tinggal di wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau seperti pada beberapa daerah di Kabupaten Sigi, Donggala, Parigi Moutong dan Tojo Una-una. Kendala yang menjadi tantangan dalam program ini selain wilayahnya yang terpencil, juga adalah faktor kemauan warga belajar, karena itu perlu pendekatan khusus yang menggunakan bahasa lokal (daerah) dari para tutor untuk bagaimana memotivasi warga sasaran untuk mau menjadi warga belajar.



Sasaran Strategis 21 “Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Untuk Menuntaskan Pendidikan Dasar dan Pengembangan Pendidikan Menengah” memiliki 2 indikator kinerja, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Rinciannya sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usia pada jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B dan SMA/MA/SMK/Paket C di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel bawah ini :

Tabel 3.52

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	104,00%	97,7%	103%	98,10%	104,30%	105,62%	104,00%	100%	102,75-103,75%	100,24%
2	SMP/MTs/Paket B	91,50%	99,6%	92%	99,66%	92,30%	99,66%	92,50%	99,19%	93,00-93,75%	98,66%
3	SMA/MA/SMK/Paket C	83,50%	99,6%	83,75%	99,41%	84,75%	99,88%	85,25%	100%	85,00-85,75%	99,41%

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 APK SD/MI/Paket A terealisasi 104,00% dengan capaian kinerja 97,7%, sementara tahun 2018 turun menjadi 103% dengan capaian kinerja 98,10%. Sedangkan tahun 2019 APK SD/MI/Paket A tercatat sebesar 104,30% dengan capaian kinerja 105,62% atau naik 1,26% dibanding tahun 2018. APK SD/MI/Paket A Pada tahun 2020 terealisasi sebesar 104,00% dengan capaian kinerja 100%. Pencapaian APK SD/MI tahun 2020 ini terhadap akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 100,24% dan telah melebihi target yang ditentukan.

Selanjutnya APK SMP/MTs/Paket B tahun 2017 terealisasi sebesar 91,50% dengan capaian kinerja 99,6%, lalu terjadi peningkatan 0,55% di tahun 2018 dimana APK SMP/MTs/Paket B terealisasi sebesar 92% dengan capaian kinerja 99,66%. Kemudian pada tahun 2019 terealisasi sebesar 92,30% dengan capaian kinerja sebesar 99,66% dan pada tahun 2020 APK SMP/MTs/Paket B terealisasi sebesar 92,50% dengan capaian kinerja 99,19%. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021 telah memberikan kontribusi sebesar 98,66%.

Sedangkan APK SMA/MA/SMK/Paket C selama 4 tahun berturut-turut mengalami peningkatan. Tahun 2017 terealisasi sebesar 83,50% dengan capaian kinerja 99,6%, lalu pada tahun 2018 terealisasi sebesar 83,75% dengan capaian kinerja 99,41% atau naik 0,29% dibanding tahun 2017. Kemudian tahun 2019 APK SMA/MA/SMK/Paket C terealisasi sebesar 84,75% dengan capaian kinerja 99,88% dan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 85,25% dengan capaian kinerja 100%. Terhadap target RPJMD tahun 2021 APK SMA/MA/SMK/Paket C telah memberikan kontribusi sebesar 98,41%.

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah ditingkat pendidikan tertentu. APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah disetiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi akses penduduk suatu daerah terhadap pendidikan dan semakin tinggi tingkat kemampuan daerah tersebut dalam menyelenggarakan otonomi daerah. APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM ini digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Pencapaian APM SD/ MI/ Paket A, SMP/ MTs/ Paket B dan SMA/ MA/ SMK/ Paket C di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.53

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	92,50%	99,7%	103%	93,00%	94,00%	99,47%	94,00%	99,20%	94,5-96,25%	97,66%
2	SMP/MTs/Paket B	72,00%	99,4%	73,00%	99,32%	74,00%	99,66%	74,00%	98,99%	74,50-75,25%	98,33%
3	SMA/MA/SMK/Paket C	64,50%	99,36%	64,75%	98,85%	65,75%	99,62%	66,00%	99,24%	66,00-70,00%	94,28%

Tabel diatas menunjukkan bahwa tahun 2017 APM SD/MI/Paket A terealisasi 92,50% dengan capaian kinerja 99,7%, sementara tahun 2018 naik menjadi 103% dengan capaian kinerja 93,00%. Kemudian pada tahun 2019 APM SD/MI/Paket A kembali turun karena hanya terealisasi sebesar 94,00% dengan capaian kinerja 99,47% dan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 94,00% dengan capaian kinerja 99,20%. Pencapaian APM SD/MI tahun 2020 ini telah memberikan kontribusi sebesar 97,66% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

Selanjutnya APM SMP/MTs/Paket B tahun 2017 terealisasi sebesar 72,00% dengan capaian kinerja 99,4%, terjadi peningkatan 1,39% di tahun 2018 dimana APM SMP/MTs/Paket B terealisasi sebesar 73% dengan capaian kinerja 99,32%. Kemudian pada tahun 2019 APM SMP/MTs/Paket B terealisasi sebesar 74,00% dengan capaian kinerja 99,66% dan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 74,00% dengan capaian kinerja 98,99%. Pencapaian APM SMP/MTs/Paket B tahun 2020 ini telah memberikan kontribusi sebesar 98,33% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

Sedangkan APM SMA/MA/SMK/Paket C tahun 2017 terealisasi sebesar 64,50% dengan capaian kinerja 99,36% dan pada tahun 2018 terealisasi sebesar 64,75% dengan capaian kinerja 98,85%. Kemudian tahun 2019 APM SMA/MA/SMK/Paket C terealisasi sebesar 65,75% dengan capaian kinerja 99,62% atau naik 1,54% dibanding tahun 2018, dan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 66,00% dengan capaian kinerja 99,24%. Terhadap target RPJMD tahun 2021, pencapaian tahun 2020 telah memberikan kontribusi sebesar 94,28%.

Pencapaian sasaran meningkatnya akses dan mutu pendidikan untuk menuntaskan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan menengah ini didukung oleh kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang memasukan kurikulum muatan lokal agar selaras dengan kebutuhan hidup sehari-hari sehingga dapat meningkatkan akses

keterampilan hidup bagi peserta didik. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pengembangan dan pencapaian pelaksanaan pendidikan ditingkat sekolah terutama dalam rangka mengatasi pengaruh krisis ekonomi di era globalisasi.

Dalam rangka perluasan akses pendidikan, upaya yang dilakukan adalah menambah ketersediaan sekolah yakni ketersediaan sarana pendidikan yang memadai. Selain keberadaan gedung sekolah yang memadai, ketersediaan guru terhadap murid akan berkorelasi terhadap peningkatan mutu dan pemenuhan hak warga atas pendidikan. Pada Tahun 2020, rasio guru terhadap murid (SD/MI) perkelas rata-rata 27 siswa/guru, rasio guru terhadap murid pada tingkat SMP/MTs perkelas rata-rata 27 siswa/guru dan rasio guru terhadap murid pada tingkat SMA/MA/SMK perkelas rata-rata juga mencapai 27 siswa/guru.

Capaian yang telah diuraikan diatas berkaitan dengan 2 sasaran strategis yaitu tuntasnya angka melek aksara dan meningkatnya akses dan mutu pendidikan untuk meningkatkan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan menengah telah dilakukan melalui program-program berikut ini:

- Program fasilitasi tugas pembantuan kependidikan.
- Program pembinaan pendidikan menengah atas.
- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
- Program pendidikan menengah kejuruan.
- Program BOS di Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.



Sasaran meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan indikator kinerja Angka Usia Harapan Hidup ini didukung oleh Program:

1. Program manajemen pembangunan kesehatan.
2. Program upaya kesehatan masyarakat.
3. Program upaya perbaikan gizi masyarakat.

4. Program upaya kesehatan lingkungan.
5. Program upaya pengendalian penyakit menular dan imunisasi.
6. Program upaya pengendalian penyakit tidak menular.
7. Program upaya kesehatan perorangan.
8. Program upaya pembiayaan jaminan kesehatan.
9. Program upaya pelayanan kesehatan primer.
10. Program upaya penyediaan SDM kesehatan.

Data usia harapan hidup di Sulawesi Tengah 4 tahun dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.54
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Usia Harapan Hidup Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Angka Usia Harapan Hidup	67,35 Thn	101%	67,32 Thn	99,96%	67,78 Thn	99,5%	68,69%	100,99%	68,2 Thn	101%

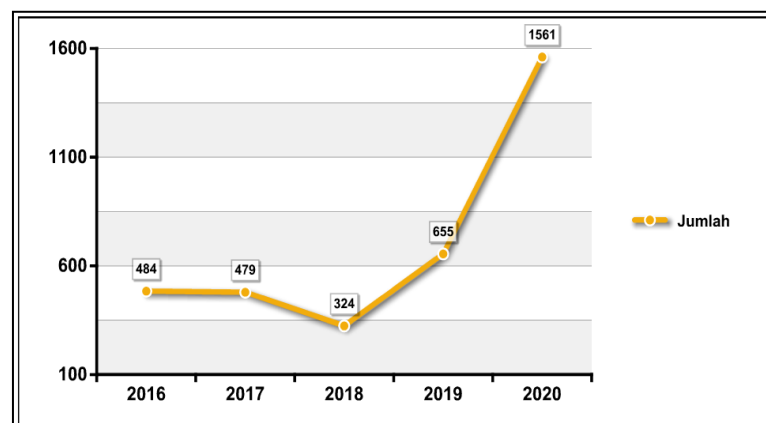
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Usia Harapan Hidup di Sulawesi Tengah tahun 2017 sebesar 67,35 tahun dengan capaian kinerja 101%, namun pada tahun 2018 turun 0,04% menjadi 67,32 tahun dengan capaian kinerja 99,96%. Selanjutnya pada tahun 2019 angka usia harapan hidup di Sulawesi Tengah tercatat 67,78 tahun dengan capaian kinerja 99,5% atau naik 0,68% dibandingkan tahun 2018, dan pada tahun 2020 realisasi angka usia harapan yaitu 68,69 tahun dengan capaian kinerja 100,99%. Pencapaian angka usia harapan hidup tahun 2020 ini telah memenuhi target akhir RPJMD tahun 2021 yaitu sebesar 101 %.

Interprestasi dari angka kelahiran hidup ini adalah seorang bayi yang di lahirkan di provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2020 mempunyai harapan untuk hidup selama 68,69 tahun kedepan. Indikator usia harapan hidup ini merupakan keberhasilan program bidang kesehatan, yang mana

bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan dalam pencapaiannya melainkan menjadi tanggung jawab kita bersama antara unsur pemerintah, swasta, akademisi serta masyarakat secara keseluruhannya.

Beberapa trend juga menunjukkan dinamika dalam pencapaian derajat kesehatan masyarakat Sulawesi Tengah. Sebagai contoh adalah trend tentang gizi buruk dan angka kematian bayi. Masalah gizi adalah masalah kesehatan masyarakat yang penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja. Masalah gizi disamping merupakan sindrom kemiskinan yang erat kaitannya dengan masalah ketahanan pangan di tingkat rumah tangga juga menyangkut aspek pengetahuan serta perilaku yang kurang mendukung seperti pola hidup sehat. Keadaan gizi masyarakat akan mempengaruhi tingkat kesehatan dan umur harapan hidup yang merupakan salah satu unsur utama dalam penentuan keberhasilan pembangunan negara yang dikenal dengan istilah Human Development Index (HDI).

Gambar 3.23
Trend Jumlah Kasus Gizi Buruk di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2016 – 2020

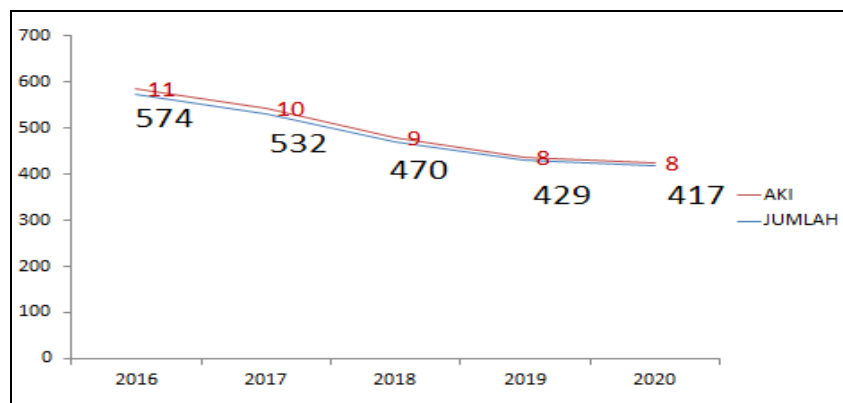


Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus gizi buruk tahun 2019 berjumlah 655 kasus, tahun 2020 jumlah kasus meningkat menjadi 1.561. Jumlah kasus gizi buruk yang menjadi indikator

merupakan jumlah kasus yang ditangani secara rawat jalan maupun rawat inap dengan penanganan sesuai prosedur tatalaksana Gizi Buruk. Penanganan kasus gizi buruk juga dilakukan di Therapic Feeding Centre (TFC), Community Feeding Centre (CFC), Puskesmas Perawatan maupun Rumah Sakit.

Gambar 3.24
Trend Jumlah dan Angka Kematian Bayi
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2020



Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sulteng, 2021

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa dari 5 tahun terakhir jumlah dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Sulawesi Tengah sudah mengalami penurunan meskipun belum signifikan. Jumlah kematian tahun 2016 sebanyak 574 turun menjadi 532 pada tahun 2017 dan turun menjadi 429 tahun 2019 dan tahun 2020 juga mengalami penurunan yaitu sebanyak 417. Dengan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan diharapkan jumlah kematian bayi (neonates dan post neonatus) diharapkan akan terus mengalami penurunan. Intervensi-intervensi yang dapat mendukung kelangsungan hidup anak ditujukan untuk dapat menurunkan AKB menjadi 16 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2024.

Dengan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan diharapkan jumlah kematian bayi (neonates dan post neonatus) diharapkan akan terus mengalami penurunan. Intervensi-intervensi yang dapat mendukung kelangsungan hidup anak ditujukan untuk dapat menurunkan AKB menjadi 16 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2024. Upaya yang tetap berjalan di

Kab/Kota untuk menunjang akselerasi kematian neonatal, bayi dan balita adalah dengan tetap meningkatkan kualitas pelayanan Neonatal melalui kunjungan 0-28 hari dengan tetap mempertahankan standar dan tatalaksana penanganan kasus komplikasi serta rujukan yang adekuat bagi balita.

Pada tahun 2020, penyebab kematian neonatal terbanyak adalah kondisi berat badan lahir rendah (BBLR) dan diikuti dengan penyebab kematian lainnya di antaranya asfiksia, kelainan bawaan, sepsis, tetanus neonatorum, dan lainnya. Penyakit infeksi menjadi penyumbang kematian pada kelompok anak usia 29 hari - 11 bulan. Berdasarkan data tahun 2020, pneumonia dan diare masih menjadi masalah utama. Dari 81 kasus kematian, 20 kasus kematian disebabkan oleh pneumonia dan 16 kematian karena diare. Penyebab kematian lain di antaranya adalah kelainan saluran cerna, dan lainnya.

Adapun hambatan dalam pencapaian angka usia harapan ini antara lain :

1. Masih tingginya kasus-kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular
2. Distribusi tenaga kesehatan yang berkompeten dalam penanganan kasus penyakit belum terdistribusi di fasilitas kesehatan
3. Pengetahuan di masyarakat masih kurang mengenai upaya-upaya preventif dan promotif dibidang kesehatan
4. Jumlah kematian bayi baru lahir diatas target

Strategi dan upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator angka usia harapan hidup ini antara lain :

1. Melakukan pencegahan penyakit menular dan tidak menular melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan sosialisasi.
2. Advokasi dengan Pemerintah Daerah tentang kebutuhan tenaga kesehatan sesuai kompetensi dan pemenuhan kebutuhan berdasarkan wilayah kerja.
3. Penguatan kemitraan dengan kelompok masyarakat dalam hal pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan.

Sasaran Strategis 23 “Suksesnya Keluarga Berencana dan Terciptanya Keluarga Berkualitas” memiliki 2 indikator kinerja, yaitu Cakupan Peserta KB Aktif dan Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I. Rinciannya sebagai berikut :

1. Cakupan Peserta KB Aktif

Data Realisasi dan capaian kinerja peserta KB aktif 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.55
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Cakupan
peserta KB aktif Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun
2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Cakupan Peserta KB Aktif	78%	90,2%	77%	88,74%	78%	89,85%	78,1%	89,96%	87,01%	89,75%

Data yang tersaji pada tabel di atas menunjukkan bahwa cakupan peserta KB aktif tahun 2017 sebesar 78% dengan capaian kinerja 90,2%. Terjadi penurunan 1% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar 77% dengan capaian kinerja 88,74%. Selanjutnya pada tahun 2019 cakupan peserta KB aktif terealisasi sebesar 78% dengan capaian kinerja 89,85%, dan pada tahun 2020 jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Sulawesi Tengah sebesar 554.709 dengan cakupan peserta KB aktif sebesar 433.304 atau sebesar 78,1% dengan capaian kinerja sebesar 89,96%. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021, cakupan peserta KB aktif tahun 2020 ini telah memberikan kontribusi sebesar 89,75%.

Tabel 3.56
Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi Tahun 2020

NO.	KABUPATEN/ KOTA	IUD	MOW	MOP	KDM	IMP	SUNTIK	PIL	TOTAL PA	JUMLAH PUS	% PA THDP JUMLAH PUS	PPM	PA/PPM
1.	BANGGAI	4.172	1.096	99	405	8.539	23.125	16.425	53.861	65.961	81,7	47.085	114,4
2.	POSO	3.050	1.528	163	112	2.940	12.466	8.739	28.998	44.082	65,8	34.365	84,4
3.	DONGGALA	1.438	803	254	500	6.922	22.585	17.713	50.215	59.883	83,9	37.268	134,7
4.	TOLI TOLI	1.383	551	80	187	5.140	12.405	8.503	28.249	40.094	70,5	24.777	114,0
5.	BUOL	896	708	97	165	2.422	8.825	6.753	19.866	24.797	80,1	18.546	107,1
6.	MOROWALI	8.480	777	14	211	2.940	10.377	3.735	26.534	31.182	85,1	16.484	161,0
7.	BANGGAI KEPULAUAN	536	212	5	63	1.839	7.123	6.013	15.791	21.488	73,5	11.243	140,5
8.	PARIGI MOUTONG	3.483	2.963	195	901	8.611	34.633	22.823	73.609	93.624	78,6	66.380	110,9
9.	TOJO UNAUNA	1.211	730	6	276	2.960	10.531	6.898	22.612	29.519	76,6	24.375	92,8
10	SIGI	3.439	1.087	116	354	5.285	18.834	14.069	43.184	51.675	83,6	38.850	111,2
11	BANGGAI LAUT	311	122	12	82	1.497	3.225	2.768	8.017	11.467	69,9	7.294	109,9
12	MOROWALI UTARA	1.221	724	15	63	3.928	6.694	3.828	16.473	20.705	79,6	12.040	136,8
13	KOTA PALU	5.794	2.412	61	1.794	4.592	17.937	13.305	45.895	60.232	76,2	45.835	100,1
	SULAWESI TENGAH	35.414	13.713	1.117	5.113	57.615	188.760	131.572	433.304	554.709	78,1	384.542	112,7

Sumber : BKKBN Perwakilan Sulteng, 2021

Kendala/permasalahan ketidakefektifan capaian indikator kinerja ini juga disebabkan adanya faktor lain seperti :

1. Kegiatan pembinaan dan koordinasi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi belum maksimal
2. Pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB baru selain dilayani pada klinik KB dan tenaga kesehatan, mereka juga adalah peserta KB mandiri yang secara mandiri membeli pil KB, kondom pada apotik sehingga tidak tercatat sebagai peserta KB baru.
3. Meningkatnya pasangan usia subur yang menggunakan KB alami seperti pantang berkala maupun unmednet, dimana mereka tidak terlayani oleh pelayanan KB karena berada di wilayah kepulauan dan perbatasan;
4. Jumlah penyuluh KB (PLKB) yang terbatas disebabkan karena terjadinya alih tugas dan fungsi dari jabatan fungsional ke jabatan struktural;
5. Terbatasnya tenaga penyuluh yang ada dilapangan sebagai ujung tombak dalam memberikan informasi tentang KB dan kesehatan reproduksi;
6. Belum optimalnya penyuluhan para pelayanan kontrasepsi yang dilakukan tenaga kesehatan dan PLBK sehingga pasangan usia subur belum mendapatkan informasi yang akurat tentang jenis dan alat kontrasepsi yang sesuai untuk mereka.

Keberhasilan program Keluarga Berencana akan sangat berkorelasi dengan Laju Pertumbuhan Penduduk. Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk mengindikasikan keberhasilan program Keluarga Berencana yang didukung oleh perbaikan ekonomi secara umum. Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk ini untuk mencegah terjadinya ledakan penduduk yang akan mempengaruhi kualitas dan kesejahteraan penduduk itu sendiri. Program KB dirancang untuk menekan angka kelahiran, menciptakan norma keluarga kecil yang bahagia sehingga terbuka peluang bagi suatu keluarga untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

2. Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I

Sasaran Strategis suksesnya keluarga berencana dan terciptanya keluarga berkualitas dengan indikator persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I ini didukung oleh program :

- Program pelayanan kontrasepsi
- Program pembinaan peran serta masyarakat dalam KB
- Program Keluarga Berencana.

Data realisasi capaian persentase keluarga dan pra sejahtera I dengan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Tabel 3.57
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	68,4%	50,4%	68.13%	45,41%	65,48%	60,77%	65,48%	54.65%	35%	12,91%

Gambar diatas menunjukan bahwa persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I tahun 2017 sebesar 68,4% dengan capaian kinerja 50,4%, terjadi kenaikan 0,39% pada tahun 2018, dimana tahun 2018 persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I terealisasi sebesar 68,13% dengan capaian kinerja hanya sebesar 45,41%. Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi kinerja persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I adalah sebesar 65,48% dengan capaian kinerja sebesar 60,77% dan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 65,48% dengan capaian kinerja sebesar 54,65%. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021, persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I tahun 2020 sebesar 12,91%.

Tabel 3.58
Rekapitulasi Tahapan Keluarga Sejahtera
Sulawesi Tengah Tahun 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELUARGA	TAHAPAN KELUARGA SEJAHTERA		
			PRA SEJAHTERA	SEJAHTERA 1	SEJAHTERA 2
(1)	(2)	(3)	(27)	(28)	(29)
1.	Banggai	96.523	16.990	49.911	29.622
2.	Poso	56.546	8.527	25.803	22.216
3.	Donggala	71.979	8.976	42.324	20.679
4.	Toli-Toli	54.182	3.833	30.615	19.735
5.	Buol	34.138	4.573	17.470	12.095
6.	Morowali	29.156	2.700	14.964	11.492
7.	Banggai Kepulauan	33.106	7.682	17.050	8.374
8.	Parigi Mautong	112.638	19.259	52.009	41.370
9.	Tojo Una-Una	36.408	5.932	17.190	13.286
10.	Sigi	62.698	11.951	29.921	20.826
11.	Banggai Laut	17.455	2.539	8.702	6.214
12.	Morowali Utara	28.488	4.618	13.838	10.032
13.	Kota Palu	76.181	9.691	37.515	28.975
JUMLAH		709.498	107.271	357.312	244.916

Sumber : BKKBN Sulteng, 2021

Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 709.498 keluarga. Dari jumlah tersebut sebanyak 107.271 keluarga yang masuk dalam kategori keluarga pra sejahtera dan 357.312 keluarga yang masuk dalam kategori keluarga sejahtera I. Sehingga jika dipersentasekan, terdapat 65,48% keluarga yang termasuk dalam kategori keluarga pra sejahtera dan sejahtera I.

Kesejahteraan keluarga banyak dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal dan unsur manajemen keluarga. Faktor internal keluarga yang mempengaruhi kesejahteraan meliputi: pendapatan, pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, umur, kepemilikan aset dan tabungan; sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kesejahteraan adalah kemudahan akses finansial pada lembaga keuangan, akses bantuan pemerintah, kemudahan akses dalam kredit barang/peralatan dan lokasi tempat tinggal. Sementara itu, unsur manajemen sumber daya keluarga yang mempengaruhi kesejahteraan adalah perencanaan, pembagian tugas dan pengontrolan kegiatan.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2016-2021 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Pada awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid-19). Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi dan sosial. Dampak yang dirasakan juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri, UMKM, dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah pada Triwulan I-2020. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian, adanya pandemi Covid-19 maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kebijakan realokasi program/kegiatan dan refocusing APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung sektor kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19, jaringan pengaman sosial, serta stimulus ekonomi terutama sektor yang terdampak pandemi Covid-19.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2020 memaparkan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan

menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggung jawabkan.

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.58
Realisasi anggaran terhadap pencapaian indikator sasaran

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi kinerja	Program	Anggaran (rp)	Realisasi (rp)	Persentase realisasi anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien.	- Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	62,51-81,25%	119,38%	Prog. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan.	653.492.575	643.767.297	98,51%
2.	Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas dan reformasi birokrasi.	- Opini BPK.	WTP	WTP	Program Peningkatan dan Pengembangan Anggaran Daerah	4.339.226.000	4.288.789.254	98,8%
					Program Peningkatan dan Pengembangan Perbendaharaan Daerah	2.423.610.000	2.419.744.600	99,8%
					Program Peningkatan dan Pengembangan Akuntansi Daerah	2.792.028.642	2.603.658.095	93,2%
					Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	2.737.680.300	2.691.956.200	98,3%
		- Nilai akuntabilitas Kinerja	B	B	Prog. Pembinaan kinerja dan pelayanan publik.	324.997.050	322.944.950	99,37 %
		- Indeks Reformasi Birokrasi	67	62,92				

3.	Tersedianya berbagai infrastruktur yang memadai.	- Persentase kemandapan jaringan jalan.	61%	61,78%	• Prog. Penyelenggaraan jalan.	142.301.050.668,8	142.006.821.473	99,79%
					• Prog. Pengaturan jasa konstruksi.	145.599.650	144.741.635	99,41%
					• Prog. Pemberdayaan jasa konstruksi.	1.137.093.500	1.136.638.516	99,91%
		- Persentase rumah tangga pengguna listrik	89,79%	97,01 %	• Program Pembinaan dan pengembangan Ketenagalistrikan	525.641.958	523.726.733	99,64%
		- Persentase rumah tangga pengguna air bersih.	71,73%	75,38 %	• Prog. Penyediaan dan pengelolaan air baku. • Prog. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.	95.712.500	91.184.000	95,27 %
		- Persentase rumah layak huni.	73,45%	68,65%	• Prog. Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial.	7.758.965.131	6.841.586.511	88,2%
		- Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB.	14,75%	13,4 %	• Prog. Pengelolaan kegiatan usaha pertambangan • Prog. Pengembangan bidang energy baru terbarukan.	685.970.780	652.915.093	95,2%
						623.870.800	222.376.406	35,6%

4.	Menurunnya angka kemiskinan.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan.	86,71-87,11%	99,92 %	• Prog. Pemberdayaan fakir miskin , KAT dan PMKS lainnya. • Prog. Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.082.870.000 373.404.800	1.008.692.763 371.327.500	93% 99%
5.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi.	- Indeks gini	0,31-0,35	0,326%	• Prog. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	850.067.000	849.318.450	99,9%
6.	Terwujudnya koperasi daya saing, dan UKM yang tangguh, berdaya saing, profesional dan mandiri.	Persentase koperasi aktif	65,72%	55,50%	• Prog. Peningkatan Pengembangan UPT Pelatihan Koperasi dan UKM	2.477.430.000	1.760.368.300	71,06%
7.	Meningkatnya daya saing, efisiensi dan produktivitas perdagangan	Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB Ekspor bersih perdagangan	10,99 % 1.100 Juta USD	7,07 % 5.095,71 %	• Prog. pengamanan perdagangan dalam neger. • Prog. pengamanan perdagangan luar negeri.	804.111.323 1.322.040.250	776.111.150 1.287.372.577	96,51 % 97,37 %
8.	Terwujudnya industri yang tangguh, profesional dan mandiri.	Pertumbuhan industri	7,60-7,80%	11,08%	• Prog. Penataan struktur industri. • Prog. Peningkatan kemampuan teknologi industri.	1.201.177.500 1.054.355.800	1.098.884.652 1.012.480.265	91,48 % 96,03 %
9.	Meningkatnya nilai dan realisasi investasi	Nilai realisasi Investasi : ➤ PMDN (Rp)	5.000.000.000.000	5.261.315.800.000	• Prog. Peningkatan daya saing	700.370.300	694.378.126	98,86%

		➤ PMA (Rp)	15.400.000.000.00	25.617.411.570.00	penanaman modal • Prog. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan.	653.492.575	643.767.297	98,51%
10.	Meningkatnya kesejahteraan genser dalam pembangunan ekonomi.	Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	68,5-69,0 %	92,43%	• Prog. Peningkatan kualitas hidup perempuan.	589.845.700	576.050.600	97,66%
		Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	71,29-71,45 %	75,50%	• Program Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	343.813.800	333.507.300	97%
11.	Meningkatnya jumlah wisatawan.	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	20.000 Org	11.921 Org	• Prog. Pengembangan pemasaran pariwisata	1.334.349.000	1.312.367.843	98,35 %
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	3.800.000 Org	1.812.995 Org	• Prog. Pengembangan destinasi pariwisata	2.640.885.274	2.296.842.671	86,97 %
					• Prog. Pengembangan industri pariwisata	1.157.500.000	1.150.216.550	99,37 %
					• Prog. Pengembangan kelembagaan kepariwisataan.	727.953.053	726.585.071	99,81 %
12.	Terciptanya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja serta hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat.	Tingkat pengangguran terbuka	3,5-3,25%	3,77%	• Prog. Peningkatan Kompetensi tenaga kerja dan produktifitas..	959.412.575	934.187.100	97,37%
		Tingkat partisipasi angkatan.	76,75%	69,44%	• Prog. Penempatan dan Perluasan kesempatan kerja.	324.527.500	324.104.600	99,87 %
13.	Terbukanya keterisolasian daerah-daerah terpencil.	Persentase kabupaten/kota tidak tertinggal	62%	62%	• Prog. Pembangunan daerah tertinggal.	184.896.000	184.596.000	99,84 %

14.	Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan dan lahan ditingkat tapak.	- Kontribusi PDRB Sub sektor kehutanan.	8-9%	607,05%	Prog. Pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan.	283.229.900	283.229.900	100%
					Prog. Perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.	334.518.500	334.518.500	100%
15.	Optimalnya tata kelola hutan untuk pengendalian kerusakan DAS dan hutan lindung.	- Persentase Kerusakan kawasan hutan	0,15%	0,06%	Prog. Planologi dan tata lingkungan hidup..	124.660.000	124.660.000	100%
					Prog. Pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan.	283.229.900	283.229.900	100%
					Prog. Pengendalian perubahan iklim.	141.919.100	141.919.100	100%
					Prog. Konservasi SDA dan ekosistem.	299.628.000	299.615.475	99,99%
16.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Indeks kualitas lingkungan hidup.	70,5 poin	77,53 poin	Prog. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.	683.227.000	674.291.000	98,69%
					Prog. Pembinaan kajian lingkungan hidup strategis.	191.125.000	165.313.000	86,49%
					Prog. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.	51.100.000	51.100.000	100%
17	Meningkatnya kesejahteraan petani.	- Nilai tukar petani	104,73	88,87%	Prog. Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan	630.000.000	626.379.525	99,42%

					Prog. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Holtikultura Ramah Lingkungan	744.675.250	740.243.400	99,40%
18.	Meningkatnya produksi dan mutu tanaman holtikultura, tanaman pangan dan perkebunan.	- Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. - Jumlah PDRB sub sektor perkebunan	28,40%	26,24%	- Prog. Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan - Prog. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pengolahan serta pemasaran hasil perkebunan.	630.000.000	626.379.525	99,42 %
			Rp. 12.722.383	Rp. 12.480.042		13.764.666.739,52	13.742.305.185	99,84 %
19.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan dan perikanan budidaya.	- Nilai tukar nelayan. - Nilai ekspor hasil Perikanan (USD)	108,22	98,11	- Prog. Pengembangan SDM kelautan dan perikanan. - Prog. Pengelolaan perikanan tangkap. - Prog. Pengelolaan sumber daya perikanan budidaya. - Prog. Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.	360.000.000	360.000.000	100 %
			3.520.000	3.763.124,02		6.102.901.700	6.086.522.452	99,73 %
						2.604.455.600	2.573.209.645	98,80 %
						1.066.969.000	1.052.250.650	98,62 %
20.	Tuntasnya angka melek aksara.	Persentase angka melek aksara	98,50-99,35	96,50	- Prog. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun - Prog. Pembinaan	254.966.952	248.249.125	97,37%
						102.969.529.385	100.938.062.125	98,03%

					Pendidikan Menengah Atas			
21.	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan untuk menuntaskan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan menengah	- APK ➤ SD/MI/ Paket A ➤ SMP/MTs/Pkt B ➤ SMA/MA/SMK/ Paket C - APM ➤ SD/MI/ Paket A ➤ SMP/MTs/Pkt B ➤ SMA/MA/SMK/ Paket C	103,25-104,00% 92,50-93,25% 84,50-85,25% 93,75-94,50% 74,00-74,75% 65,00-66,50	104% 92,50% 85,25% 94,00% 74,00% 66%	• Prog. Fasilitas tugas pembantuan kependidikan. • Prog. Pembinaan pendidikan menengah atas. • Prog. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. • Prog. Pendidikan menengah kejuruan.. • Prog. Bantuan Operasional Sekolah (BOS).	404.010.000 102.969.529.385 1.089.895.755 159.712.467.948 194.937.698.498	402.090.250 100.938.062.125 1.062.010.060 130.750.987.969 193.367.920.000	99,52 % 98,03 % 97,44 % 81,87 % 99,19 %
22.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan.	Angka usia harapan hidup.	68,1 Tahun	68,69 Tahun	• Prog. Perencanaan dan Penganggaran pembangunan kesehatan. • Prog. Upaya kesehatan masyarakat • Prog. Upaya perbaikan gizi masyarakat. • Prog. Upaya kesehatan lingkungan. • Prog. Upaya pengendalian penyakit menular dan imunisasi. • Prog. Upaya	2.888.308.500 7.322.719.200 1.122.136.800 2.390.157.900 4.062.314.102 1.119.806.400	1.712.958.400 6.958.077.050 873.967.300 2.305.196.750 3.717.546.963 1.109.709.365	59,31 % 95,02 % 77,88 % 96,45 % 91,51 % 99,10 %

					pengendalian penyakit tdk menular • Prog. Upaya kesehatan perorangan. • Prog. Upaya pembiayaan jaminan kesehatan. • Prog. Upaya penyediaan SDM kesehatan.	190.823.600 42.215.382.157 162.575.200	190.823.600 41.193.320.768 161.475.082	100 % 97,58 % 99,32 %
23.	Suksesnya Keluarga Berencana dan terciptanya keluarga berkualitas.	- Cakupan peserta KB aktif. - Persentase keluarga Pra sejahtera dan Sejahtera I.	68% 45,05%	78,1% 65,48%	• Prog. Pelayanan kontrasepsi.. • Prog. Pembinaan peran serta masyarakat dalam KB. • Prog. Keluarga Berencana.	126.886.750 81.500.000 95.901.224	126.886.750 57.930.000 95.641.100	100 % 71,08 % 99,73 %

Bab 4

Penutup



Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Secara umum, capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan sangat baik, karena dari 23 sasaran yang terdiri dari 42 indikator kinerja utama yang ditetapkan, 27 indikator kinerja utama memenuhi kriteria sangat baik, 6 indikator kinerja utama memenuhi kriteria tinggi, 1 indikator kinerja utama dengan kriteria sedang, 3 indikator kinerja utama dengan kriteria rendah, 2 indikator kinerja utama dengan kriteria sangat rendah serta 1 indikator masih menunggu hasil pemeriksaan BPK dan 2 indikator juga masih menunggu hasil evaluasi Kemenpan RB. Selain keberhasilan yang ada juga terdapat kendala yang dapat diidentifikasi dalam pencapaian sasaran yaitu perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik, ditambah lagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang berkontribusi besar terhadap kurangnya penyerapan anggaran.

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

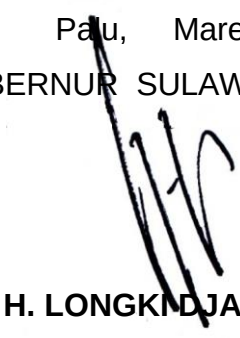
- 1) Mengoptimalkan peran Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- 2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
- 3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Akhirnya kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi tugas pengabdian kita sekalian pada Bangsa dan Negara.

Pa'u, Maret 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



Drs. H. LONGKINDJANGGOLA, M.Si

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	T A R G E T
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	- Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	62,51% - 81,25%
2	Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.	- Opini BPK - Nilai Akuntabilitas Kinerja - Indeks Reformasi Birokrasi	WTP B 67
3	Tersedianya berbagai infrastruktur yang merata dan memadai	- Persentase kemantapan jaringan jalan dalam kondisi mantap - Persentase rumah tangga pengguna listrik - Persentase rumah tangga pengguna air bersih - Persentase rumah layak huni - Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	61% 89,79% 71,73% 73,45% 14,75%
4	Menurunnya angka kemiskinan	- Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	86,71 - 87,11 %
5	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi.	- Indeks Gini	0,31-0,35
6	Terwujudnya koperasi yang tangguh, berdaya saing, profesional dan mandiri	- Persentase koperasi aktif	65,72%
7	Meningkatnya daya saing, efisiensi dan produktif perdagangan	- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB - Ekspor bersih perdagangan	10,99% 1.100 Juta USD
8	Terwujudnya industri yang tangguh, profesional dan mandiri	- Pertumbuhan Industri	7,60-7,80%
9	Meningkatnya nilai dan realisasi investasi	- Nilai realisasi investasi PMDN PMA	Rp.5.000.000.000.000 Rp.15.400.000.000.000
10	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan ekonomi	- Peningkatan Indeks Pembangunan gender (IPG) - Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender	68,5-69,0% 71,29-71,45%
11	Meningkatnya Jumlah Wisatawan	- Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara - Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	20.000 org 3.800.000 org
12	Terciptanya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	- Tingkat pengangguran terbuka	3,5-3,25%
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	T A R G E T

1	2	3	4
		- Partisipasi Angkatan Kerja	76,75%
13	Terbukanya keterisolasian daerah-daerah terpencil	- Persentase Kabupaten/Kota Tidak tertinggal	62%
14	Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan dan lahan di tingkat lapak	- Kontribusi PDRB sub sektor kehutanan	8-9 %
15	Optimalnya tatakelola hutan untuk pengendalian kerusakan DAS dan hutan lindung.	- Persentase kerusakan kawasan hutan	0,15 %
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Indeks kualitas lingkungan hidup	70,5 Poin
17	Meningkatnya kesejahteraan petani	- Nilai tukar petani	104,73
18	Meningkatnya produksi dan mutu tanaman hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan	- Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	28,40 %
		- Jumlah PDRB sub sektor perkebunan	Rp.12.722.383
19	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan dan perikanan budidaya	- Nilai tukar nelayan	108,22
		- Nilai ekspor hasil perikanan	US\$3.520.000
20	Tuntasnya angka melek aksara	- Persentase angka melek aksara	98,50-99,35%
21	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan untuk meningkatkan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan menengah	- Angka Partisipasi Kasar (APK) * SD / MI / Paket A * SMP / Mts / Paket B * SMA / MA / SMK / Paket C	103,25-104,00% 92,50-93,25% 84,50-85,25%
		- Angka Partisipasi Murni (APM) * SD / MI / Paket A * SMP / Mts / Paket B * SMA / MA / SMK / Paket C	93,75-94,50% 74,00-74,75% 65,50-66,50%
22	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	- Angka Usia Harapan Hidup	68 Tahun
23	Suksesnya Keluarga Berencana dan terciptanya keluarga berkualitas.	- Cakupan peserta KB aktif	68%
		- Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	45,05%

PROGRAM

- Program Pembinaan kinerja dan pelayanan publik
- Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan
- Program Peningkatan dan Pengembangan Anggaran Daerah

ANGGARAN

658.080.598
884.167.000
4.272.740.000

- Program Peningkatan dan pengembangan Perbendaharaan Daerah	2.650.000.000
- Program Pembinaan dan Pengembangan Akuntansi Keuangan Daerah	3.049.999.758
- Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	3.046.743.242
- Program Penyelenggaraan jalan	127.955.766.271
- Program Pengaturan jasa konstruksi	667.383.100
- Program pemberdayaan jasa konstruksi	1.383.213.400
- Program Pegawasan jasa konstruksi	324.424.700
- Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	7.236.617.200
- Program Penyediaan dan pengelolaan air baku	638.800.000
- Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	7.716.129.572
- Program pengembangan perumahan	18.142.660.994
- Program lingkungan sehat perumahan	1.424.709.901
- Program Pengelolaan kegiatan usaha pertambangan	1.029.288.585
- Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan	949.725.350
- Program pengembangan bidang energi baru terbarukan.	1.731.738.200
- Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	1.716.410.000
- Program Pemberdayaan sosial	283.000.000
- Program pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial	512.000.000
- Program perlindungan dan jaminan sosial	432.600.000
- Program pelayanan dan rehabilitasi sosial	1.019.000.000
- Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi	1.330.000.000
- Program Peningkatan usaha koperasi	1.180.000.000
- Program pengembangan UPT pelatihan koperasi dan UMKM	2.740.430.000
- Program pengembangan dan pengamanan perdagangan dalam negeri	840.357.000
- Program pengembangan dan pengamanan perdagangan luar negeri	1.692.117.000
- Program penataan struktur industri	1.375.326.400
- Program peningkatan kemampuan teknologi industri	1.486.239.300
- Program penempatan dan perluasan kesempatan kerja	226.220.000
- Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas	1.512.681.000
- Program pembangunan daerah tertinggal	192.396.000
- Program pengendalian DAS dan hutan lindung	2.774.876.600
- Program planologi dan tata lingkungan hidup	855.974.600
- Program penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan	1.057.513.900
- Program peningkatan daya saing penanaman modal	3.475.459.600
- Program Peningkatan kualitas hidup perempuan	346.000.000
- Program pengarusutamaan gender dalam Pembangunan	166.000.000
- Program Destinasi Pariwisata	3.669.897.774
- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.217.200.000
- Program Pengembangan kelembagaan kepariwisataan	1.355.000.000
- Program Pengembangan industri pariwisata	1.631.800.000
- Program pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan	529.242.100
- Program konservasi sumberdaya alam dan ekosistem	352.039.500
- Program pengendalian DAS dan hutan lindung	2.774.876.600
- Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.057.513.900
- Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	752.619.050
- Program Kajian Lingkungan Hidup Strategis	379.504.800
- Program peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk tanaman perkebunan berkelanjutan	10.013.940.550
- Program Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengolahan	14.286.264.800

serta pemasaran hasil perkebunan	
- Program Pengelolaan perikanan tangkap	15.667.282.400
- Program Pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya	7.322.748.438
- Program Penuatan daya saing produk kelautan dan perikanan	346.696.000
- Program Peningkatan produksi dan mutu hasil produksi tanaman pangan	5.455.346.300
- Program Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian	24.482.877.600
- Program pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani	987.000.000
- Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan	68.915.864.000
- Program tugas pembantuan kependidikan	3.031.434.975
- Program pembinaan pendidikan menengah atas	37.609.718.537
- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	4.582.654.790
- Program pendidikan menengah kejuruan	96.738.808.860
- Program BOS	58.397.630.323
- Program Upaya penyediaan SDM kesehatan	560.000.000
- Program Upaya pelayanan kesehatan primer	400.000.000
- Program upaya perbaikan gizi masyarakat	1.475.000.000
- Program upaya pengendalian penyakit menular dan imunisasi	4.491.000.000
- Program upaya kesehatan masyarakat	2.035.000.000
- Program upaya pembiayaan dan jaminan kesehatan	40.300.000.000
- Program upaya pelayanan kesehatan perorangan	450.000.000
- Program pelayanan kontrasepsi	610.035.875
- Program pembinaan peran serta masyarakat dalam ber KB	321.824.000
- Program Pelayanan Keluarga Berencana	371.738.000

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, M.Si

